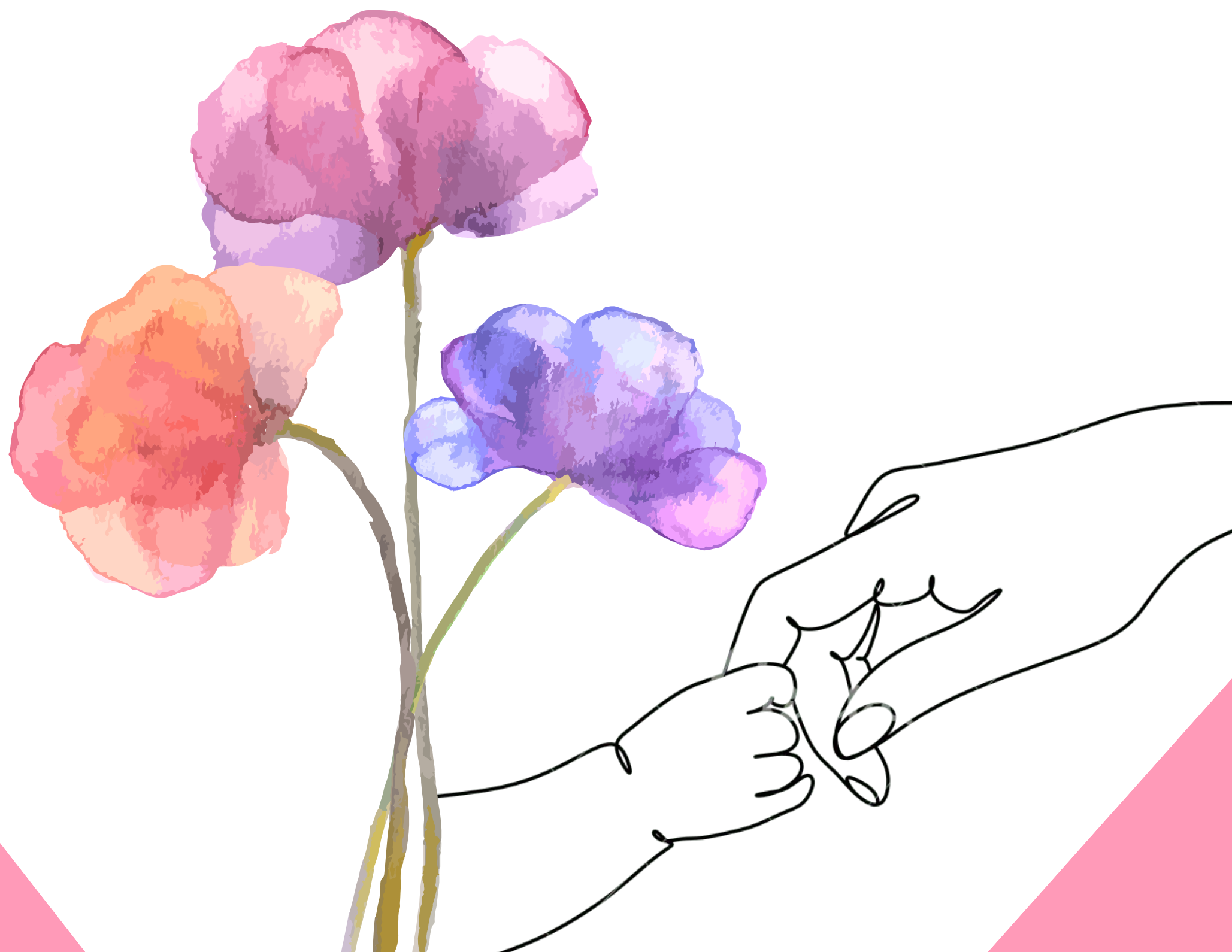


PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN DATA
TIM KERJA DATA INFORMASI GENDER ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

..... **LAPORAN EVALUASI DAN ANALISIS**
..... **DATA GENDER DAN ANAK**
..... **TAHUN 2023**



Jl. Kenari No. 56 Kota Yogyakarta 55165

Telp. (0274) 551060

Email: dp3ap2kb@jogjakota.go.id

Website: dp3ap2kb.jogjakota.go.id



YK
YOGYAKARTA
CITY

**LAPORAN EVALUASI DAN ANALISIS DATA
GENDER DAN ANAK
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas berkat dan rahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Evaluasi dan Analisis Data Gender dan Anak ini dengan baik dan lancar. Tentu dengan harapan semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam menyusun program-program pembangunan yang mengarusutamakan gender dan kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang.

Tujuan umum dari penyusunan Laporan Evaluasi dan Analisis Data Gender dan Anak ini adalah untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak (PUHA), terutama dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di Kota Yogyakarta. Beberapa perbaikan kami lakukan dalam edisi ini sebagai tindak lanjut dari berbagai masukan dari para pengguna dan semua pihak yang selalu peduli dalam proses pengembangan data gender dan anak di Kota Yogyakarta. Kedua, kami memasukkan data-data yang bersumber dari dinas dukcapil kota untuk memberikan gambaran lebih lengkap mengenai jumlah dan perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin maupun usia.

Tidak lupa kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam Menyusun Laporan Evaluasi dan Analisis Data Gender dan Anak ini. Semoga koordinasi penyelenggaraan data gender dan anak, yang telah dilaksanakan selama ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi, dan data yang telah diolah dapat kita manfaatkan bersama-sama.

Akhirnya kami menyadari Laporan Evaluasi dan Analisis Data Gender dan Anak ini masih banyak kekurangan baik kelengkapan, akurasi data maupun penyajiannya, untuk itu saran perbaikan dimasa yang akan datang sangat kami harapkan.

Yogyakarta, Juni 2024

Pt. Kepala



Drs. Yuniarto Dwisutono

NIP. 19660628 198602 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR DIAGRAM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan dan Manfaat

C. Dasar Hukum

BAB II DATA GENDER

A. Gender dalam Kependudukan

1. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta

2. Piramida Penduduk Kota Yogyakarta

3. Jumlah Lansia Kota Yogyakarta

4. Status Perkawinan Penduduk Kota Yogyakarta

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Yogyakarta

B. Gender dalam Kesehatan

1. Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Yogyakarta

2. Jumlah Kematian Ibu Kota Yogyakarta

3. Ibu Hamil yang Berisiko Tinggi Kota Yogyakarta

4. Jumlah Kematian *Neonatal* Kota Yogyakarta

5. Jumlah Kematian *Post Neonatal* Kota Yogyakarta

6. Jumlah Kematian Balita Kota Yogyakarta

7. Jumlah Bayi Lahir Hidup Kota Yogyakarta

8. Jumlah dan Persentase Wanita Usia Subur (WUS) Menurut Umur Kawin Pertama Kota Yogyakarta

9. Penyandang Cacat Kota Yogyakarta

10. Status Gizi Baduta dan Balita Kota Yogyakarta

11. Jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) Kota Yogyakarta

C. Gender dalam Pendidikan

1. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kota Yogyakarta
2. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Yogyakarta
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Yogyakarta

D. Gender dalam Ekonomi dan Ketenagakerjaan

1. Jumlah Kepala Keluarga Kota Yogyakarta
2. Jumlah Penduduk Penerima Manfaat Program Keluarga Sasaran Penerima Perlindungan Sosial (KSJPS)
3. Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Yogyakarta
4. Penduduk Bekerja dan Pengangguran Kota Yogyakarta]

E. Gender dalam Kebijakan Publik

F. Gender dalam Politik

1. Jumlah Calon Legislatif Kota Yogyakarta
2. Jumlah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Aktif Tahun 2023

G. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Yogyakarta

1. Jumlah ASN Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Jumlah Mantri Pamong Praja Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Jumlah Lurah Pemerintah Kota Yogyakarta

BAB III DATA ANAK

A. Jumlah dan Persentase Penduduk Anak Kota Yogyakarta

B. Perlindungan Anak Kota Yogyakarta

1. Anak Penyandang Disabilitas
2. Anak Jalanan

C. Pemenuhan Hak Anak (Hak Sipil) Kota Yogyakarta

1. Akta Kelahiran
2. Kartu identitas Anak (KIA)
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

D. Permasalahan Anak (Isu-Isu tentang Anak) Kota Yogyakarta

1. Pernikahan Usia Dini
2. Balita dalam Kondisi Stunting
3. Dapur Balita
4. Angka Putus Sekolah
5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

E. Kelembagaan Kota Layak Anak (KLA)

1. Kampung Ramah Anak (KRA)
2. Puskesmas Ramah Anak (PRA)
3. Sekolah Ramah Anak (SRA)
4. Pesantren Ramah Anak
5. Tempat Peribadatan Ramah Anak
6. Polsek Ramah Anak
7. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
8. Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana) dan Kecamatan Layak Anak (Kelana)

F. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

1. Jumlah Klien
2. Kasus yang Dilaporkan
3. Layanan yang Diakses
4. Assesment Orang Tua Calon Pengantin Usia Dini

BAB IV. KEKERASAN DI KOTA YOGYAKARTA

A. Jumlah Korban Kekerasan di Kota Yogyakarta

B. Prevalensi Korban Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Yogyakarta

1. Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur
2. Korban Kekerasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
3. Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan
4. Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan

5. Korban Kekerasan Berdasarkan Lokasi Kasus
 6. Pelayanan yang Diberikan kepada Korban Kekerasan
 7. Korban Kekerasan Berdasarkan Kondisi Disabilitas
 8. Korban Kekerasan Berdasarkan Kategori KDRT
 9. Korban Kekerasan Berdasarkan Status Pernikahan
- C. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak di Kota Yogyakarta
- D. Prevalensi Korban Kekerasan terhadap Anak di Kota Yogyakarta
1. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kelompok Umur
 2. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 3. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan
 4. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Bentuk Kekerasan
 5. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Lokasi Kasus
 6. Pelayanan yang diberikan Kepada Korban Kekerasan terhadap Anak
7. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kondisi Disabilitas
 8. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kategori KDRT
 9. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Status Pernikahan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023
- Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Lansia Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023
- Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin, Kemantren dan Status Perkawinan Tahun 2023
- Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin, Kemantren dan Status Perceraian Tahun 2023
- Tabel 2.5. IPM Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023
- Tabel 2.6. IPG Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
- Tabel 2.7. AHH Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023
- Tabel 2.8. Jumlah kematian Ibu Tahun 2021-2023
- Tabel 2.9. Jumlah Bumil Risti Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
- Tabel 2.10. Jumlah Kematian Neonatal Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023
- Tabel 2.11. Jumlah Kematian *Post Neonatal* Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023
- Tabel 2.12. Jumlah Kematian Balita Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023
- Tabel 2.13. Jumlah Bayi Lahir Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
- Tabel 2.14. Jumlah dan Persentase Wanita Usia Subur (WUS) Menurut Umur Kawin Pertama
- Tabel 2.15. Jumlah Penyandang Cacat Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022
- Tabel 2.16. Status Gizi Baduta Kota Yogyakarta Tahun 2023 Berdasarkan Puskesmas dan Jenis Kelamin
- Tabel 2.17. Status Gizi Balita Kota Yogyakarta Tahun 2023 Berdasarkan Puskesmas dan Jenis Kelamin

- Tabel 2.18. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kota Yogyakarta
- Tabel 2.19. HLS Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
- Tabel 2.20. RLS Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
- Tabel 2.21. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2023
- Tabel 2.22. Jumlah Penduduk Penerima Manfaat Program KSJPS Kota Yogyakarta Tahun 2023
- Tabel 2.23. Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2023
- Tabel 2.24. Penduduk Kota Yogyakarta yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2023
- Tabel 2.25. Penduduk Bekerja dan Pengangguran Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2023
- Tabel 2.26. OPD di Kota Yogyakarta yang Sudah dan Belum Membuat GAP dan GBS Tahun 2021-2023
- Tabel 2.27. Jumlah Calon Legislatif Kota Yogyakarta Berdasarkan Partai dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024
- Tabel 2.28. Jumlah Anggota DPRD Kota Yogyakarta Berdasarkan Fraksi dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024
- Tabel 2.29. Jumlah Ketua LPMK Kota Yogyakarta
- Tabel 2.30. Jumlah ASN Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
- Tabel 2.31. Jumlah ASN Kota Yogyakarta Berdasarkan Jabatan Tahun 2021-2023
- Tabel 2.32. Jumlah ASN Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2023
- Tabel 2.33. Jumlah MPP Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Jabatan Tahun 2021-2023
- Tabel 2.34. Jumlah Lurah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
- Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2023 Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin

Tabel 3.2. Jumlah Anak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Tahun 2022 Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin

Tabel 3.3. Jumlah Anak Jalanan Kota Yogyakarta Tahun 2022 Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin

Tabel 3.4. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kemantren

Tabel 3.5. Jumlah dan Persentase Kepemilikan KIA Penduduk Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kemantren

Tabel 3.6. Jumlah Calon Pasangan Pernikahan Usia Dini Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren Tahun 2023

Tabel 3.7. Jumlah Calon Pasangan Pernikahan Usia Dini Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren Tahun 2023

Tabel 3.8. Jumlah Balita Stunting Kota Yogyakarta Berdasarkan jenis Kelamin dan Puskesmas Tahun 2023

Tabel 3.9. Jumlah Dapur Balita Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023

Tabel 3.10. Angka Putus Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2023

Tabel 3.11. APS Kota Yogyakarta Tahun 2023

Tabel 3.12. Jumlah KRA Kota Yogyakarta Berdasarkan Tahun Pembentukan

Tabel 3.13. Jumlah KRA Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren s/d Tahun 2023

Tabel 3.14. Jumlah PRA Kota Yogyakarta Berdasarkan Tahun Pembentukan

Tabel 3.15. SRA Kota Yogyakarta Tahun 2023

Tabel 3.16. Jumlah KRA Kota Yogyakarta Berdasarkan Tahun Pembentukan

Tabel 3.17. Jumlah Dekelana Kota Yogyakarta Berdasarkan Tahun Pembentukan

Tabel 3.18. Kelana Kota Yogyakarta Berdasarkan Tahun Pembentukan Tahun 2023

Tabel 3.19. Jumlah Klien Puspaga Kota Yogyakarta Berdasarkan Kasus yang Dilaporkan

Tabel 4.1. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Tabel 4.2. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan

Tabel 4.3. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Tabel 4.4. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kekerasan, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Tabel 4.5. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Bentuk Kekerasan, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Tabel 4.6. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Lokasi Kasus, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Tabel 4.7. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Layanan yang Diberikan, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Tabel 4.8. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Tabel 4.9. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Tabel 4.10. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Tingkat pendidikan, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Tabel 4.11. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Bentuk Kekerasan, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Tabel 4.12. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Lokasi Kasus, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Tabel 4.13. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Layanan yang Diberikan, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1. Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2023

Diagram 2.2. Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2023

Diagram 3.1. Diagram 3.1. Persentase Jumlah Penduduk Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

Diagram 3.2. Persentase Jumlah Penduduk Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia

Diagram 3.3. Persentase Anak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Tahun 2022

Diagram 3.4. Grafik Calon Pasangan Pengantin Usia Dini Setiap Bulan yang Mendaftar di Kelurahan Tahun 2023

Diagram 3.5. Tempat Peribadatan Ramah Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023

Diagram 3.6. Polsek Ramah Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023

Diagram 3.7. Persentase Klien Puspaga Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

Diagram 3.8. Layanan yang Diakses Klien Puspaga Kota Yogyakarta Tahun 2023

Diagram 3.9. Kategori Usia Pasangan Catin Kota Yogyakarta yang Diassesment Tahun 2023

Diagram 3.10. Kategori Usia Catin (jiwa) Kota Yogyakarta yang Diassesment Tahun 2023

Diagram 3.11. Alasan Catin Kota Yogyakarta yang Diassesment Tahun 2023

Diagram 4.1. Persentase Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Tahun 2023

Diagram 4.2. Persentase Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

Diagram 4.3. Persentase Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2023

Diagram 4.4. Persentase Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Bentuk Kekerasan Tahun 2023

Diagram 4.5. Persentase Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Lokasi Kasus Tahun 2023

Diagram 4.6. Persentase Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Layanan yang Diberikan Tahun 2023

Diagram 4.7. Persentase Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Kondisi Disabilitas Tahun 2023

Diagram 4.8. Persentase Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan kategori KDRT Tahun 2023

Diagram 4.9. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Status Pernikahan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Diagram 4.10. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Diagram 4.11. Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023

Diagram 4.12. Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2023

Diagram 4.13. Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2023

Diagram 4.14. Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Bentuk Kekerasan Tahun 2023

Diagram 4.15. Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Layanan yang Diberikan Tahun 2023

Diagram 4.16. Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Kondisi Disabilitas Tahun 2023

Diagram 4.17. Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan kategori KDRT Tahun 2023

Diagram 4.18. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Kategori KDRT dan Jenis Kelamin Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan Kota Yogyakarta Tahun 2023

Gambar 4.2. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak dari berbagai bidang pembangunan. Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Data anak adalah data mengenai kondisi anak perempuan dan anak laki-laki yang terpilah menurut kategori umur. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah kurang memadai, hal ini disebabkan kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam penyelenggaraannya. Akibat ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masih terus berlanjut, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional.

Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan/ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan untuk mewujudkan tata kelola serta ketersediaan data gender dan data anak telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak. Satu Data Gender dan Anak adalah kebijakan tata kelola data gender dan data anak untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Metode pengumpulan data terpilah dapat dilakukan melalui berbagai cara pengumpulan data. Namun dalam keseluruhan proses pengumpulan data harus selalu dengan lensa gender, misalnya dalam perumusan masalah (ada mengandung isu gender, rencana penelitian (informan dan sampel terdiri dari laki-laki dan perempuan), data dipilah menurut jenis kelamin dan umur dan harus selalu memandangnya dari perspektif gender, yang artinya sejak semula pemilahan data menurut jenis kelamin dan umur adalah keharusan.

Penyajian data dalam bentuk narasi atau uraian ringkas dalam buku data terpilah dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang cara membaca tabel, arti data yang mungkin dapat menggambarkan isu gender dan anak, dan sepanjang memungkinkan mencari faktor-faktor yang terkait isu tersebut.

B. Tujuan dan Manfaat

Evaluasi dan Analisis Data gender dan anak dapat digunakan pengambil kebijakan untuk :

1. Mengidentifikasi perbedaan (kondisi dan perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, termasuk anak, dalam dimensi tempat dan waktu yang berbeda;
2. Mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki; dan mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan, laki-laki dan anak-anak yang responsif terhadap masalah, kebutuhan, dan pengalaman mereka.
3. Sebagai data base untuk mengungkapkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki;
4. Sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan Gender;
5. Sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
6. Sebagai input untuk melakukan Gender analisis;
7. Mengidentifikasi masalah, membangun opsi, dan memilih yang paling efektif untuk mendapatkan manfaat secara optimal bagi perempuan maupun laki-laki;
8. Memahami kontribusi ekonomi, keadaan, dan realitas sesungguhnya kehidupan perempuan maupun laki-laki; dan
9. Melihat dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki dengan cara melaksanakan evaluasi, monitoring, mengukur kemajuan dan mengukur outcome.

C. Dasar Hukum

Penyusunan Kajian Data Gender dan Anak didasarkan pada beberapa peraturan perundang undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

DATA GENDER

A. Gender dalam Kependudukan

1. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah seluas 32,5 km² dan dengan tingkat kepadatan penduduk 11.560 jiwa/km² pada tahun 2023. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) dan hasil proyeksi SP2020 jumlah penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebanyak 375.699 Jiwa.

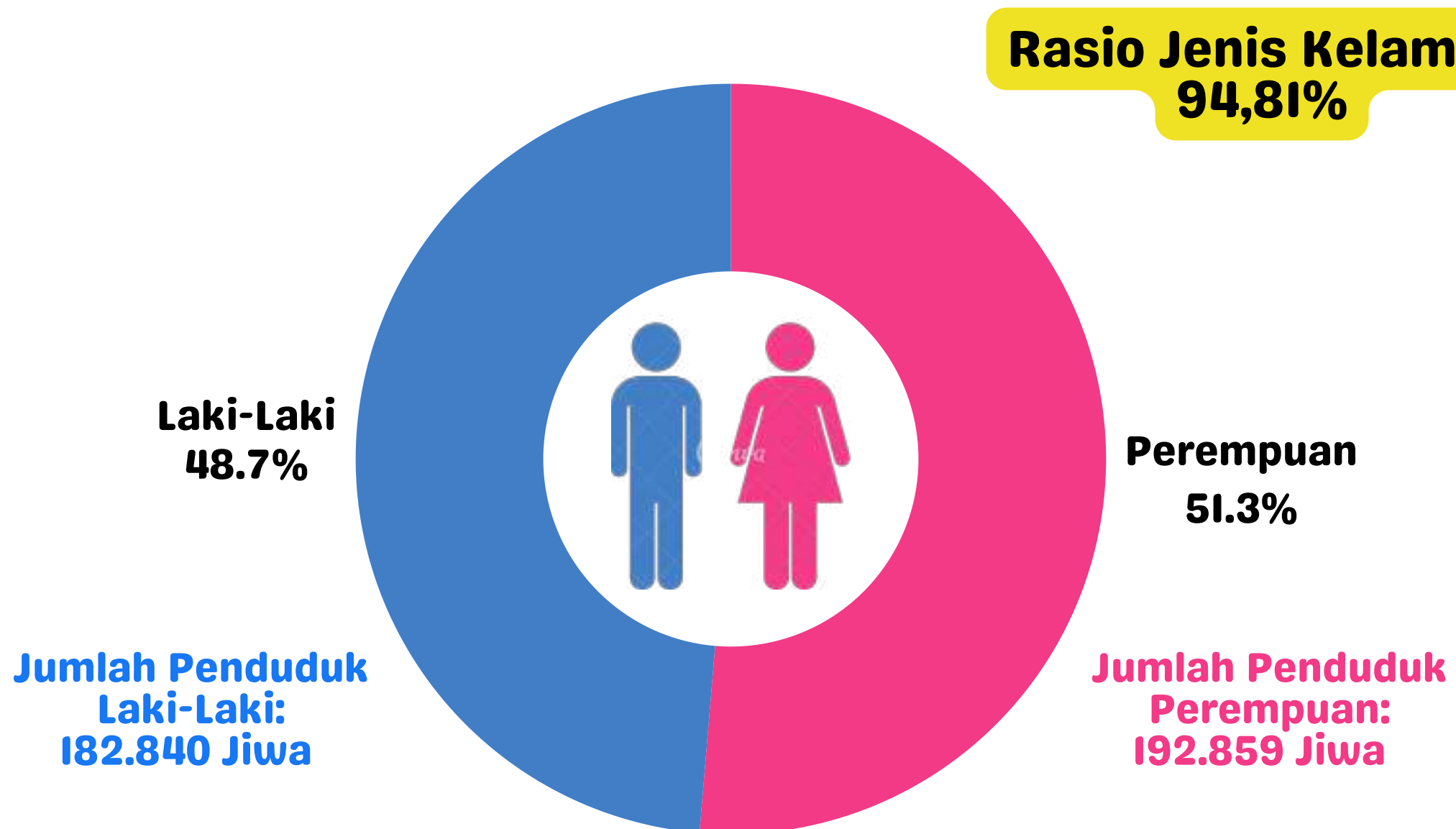


Diagram 2.1. Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2023
Sumber: Sensus Penduduk (SP) dan hasil proyeksi SP2020

Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk berjenis kelamin laki-laki, dengan selisih sebanyak 10.019 jiwa. Perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya 100 penduduk perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebesar 94,81 (Rasio Jenis Kelamin).

Sedangkan berdasarkan hasil rekap Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Kota Yogyakarta hingga Bulan Desember 2023, jumlah penduduk Kota Yogyakarta sejumlah 414.705 jiwa, yang tersebar dalam 14 kemantren sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

KEMANTREN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
TEGALREJO	18327	19110
JETIS	13111	13977
GONDOKUSUMAN	20837	22214
DANUREJAN	10376	10777
NGAMPILAN	8853	9218
GEDONGTENGAN	9413	9800
KRATON	10417	11043
PAKUALAMAN	5061	5561
MANTRIJERON	17122	18100
GONDONANAN	7148	7554
WIROBRAJAN	13772	14334
MERGANGSAN	15310	16355
UMBULHARJO	34928	36630
KOTAGEDE	17387	17970
JUMLAH	202062	212643

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Kota Yogyakarta

2. Piramida Penduduk Kota Yogyakarta

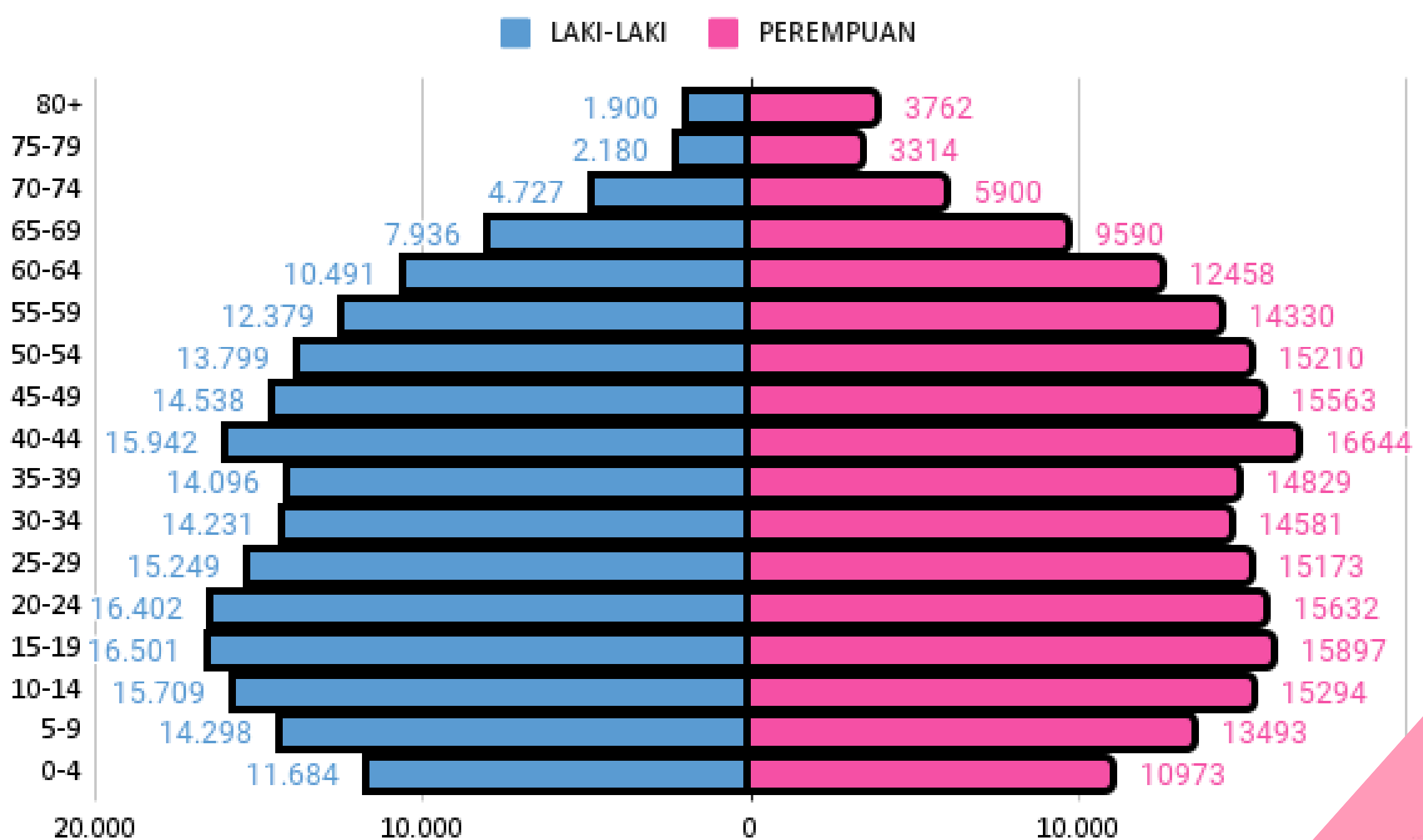


Diagram 2.2. Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2023
Sumber: Sensus Penduduk (SP) dan hasil proyeksi SP2020

Berdasarkan bentuknya, piramida penduduk memiliki tiga jenis bentuk yang berbeda. Pertama, ada piramida penduduk yang berbentuk mengerucut ke atas, yang disebut sebagai piramida ekspansif. Kedua, piramida penduduk berbentuk seperti sarang tawon atau granat, yang disebut sebagai piramida stasioner. Serta yang ketiga adalah piramida berbentuk guci terbalik dan tidak mengerucut, yang disebut sebagai piramida konstruktif. Piramida Penduduk Kota Yogyakarta di atas terklasifikasi sebagai piramida stasioner. Bentuk piramida stasioner menunjukkan jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan penduduk usia tua. Umumnya disebabkan oleh tingkat kelahiran dan kematian yang rendah. Sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif tetap.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pelayanan KB di Kota Yogyakarta telah baik. Sebagaimana TFR Kota Yogyakarta yang menunjukkan angka 1,67 (Buku Parameter Bangsa Kencana BKKBN Tingkat Kabupaten/Kota) yang mencerminkan kelahiran di Kota Yogyakarta sudah di bawah 2 anak di setiap Pasangan Usia Subur (PUS).

3. Jumlah Lansia Kota Yogyakarta

Menurut World Health Organization (WHO), lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahap akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut aging process atau proses penuaan. Jumlah lansia yang ada di Kota Yogyakarta per Desember 2023 adalah sebanyak 62.258 jiwa dengan persebaran per Kemantren sebagai berikut.

KEMANTREN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
TEGALREJO	2439	3001
JETIS	1762	2471
GONDOKUSUMAN	2769	3666
DANUREJAN	1375	1799
NGAMPILAN	1196	1553
GEDONGTENGEN	1358	1753
KRATON	1552	2057
PAKUALAMAN	701	1042
MANTRIJERON	2408	3068
GONDOMANAN	1064	1432
WIROBRAJAN	1807	2294
MERGANGSAN	2201	2869
UMBULHARJO	4381	5423
KOTAGEDE	2221	2596
JUMLAH	27234	35024

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Lansia Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Kota Yogyakarta

Prosentase lansia laki-laki dari keseluruhan penduduk laki-laki di Kota Yogyakarta adalah sebesar 13,48% dan prosentase lansia Perempuan dari keseluruhan penduduk perempuan di Kota Yogyakarta adalah sebesar 16,47%. Sedangkan prosentase lansia paling besar adalah Kemantren Gondomanan

4. Status Perkawinan Penduduk Kota Yogyakarta

a. Kawin dan Belum Kawin

Jumlah Penduduk laki-laki Kota Yogyakarta dengan status Belum Kawin lebih banyak dari pada penduduk perempuannya. Berbanding terbalik dengan jumlah penduduk sengan status kawin, dimana lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan yang kemudian persebarannya per kemantren dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KEMANTREN	JENIS KELAMIN	BELUM KAWIN	KAWIN
TEGALREJO	Laki-laki	8945	8539
	Perempuan	7816	8898
JETIS	Laki-laki	6525	5951
	Perempuan	5900	6170
GONDOKUSUMAN	Laki-laki	10445	9575
	Perempuan	9612	10096
DANUREJAN	Laki-laki	5255	4641
	Perempuan	4526	4852
GEDONGTENGEN	Laki-laki	4771	4168
	Perempuan	4065	4392
NGAMPILAN	Laki-laki	4444	4045
	Perempuan	3851	4246
WIROBRAJAN	Laki-laki	6890	6270
	Perempuan	6064	6489
MANTRIJERON	Laki-laki	8457	7935
	Perempuan	7470	8350
KRATON	Laki-laki	5177	4782
	Perempuan	4476	5066
GONDONANAN	Laki-laki	3506	3277
	Perempuan	3140	3425
PAKUALAMAN	Laki-laki	2539	2301
	Perempuan	2328	2429
MERGANGSAN	Laki-laki	7475	7169
	Perempuan	6732	7480
UMBULHARJO	Laki-laki	17058	16592
	Perempuan	15289	17247
KOTAGEDE	Laki-laki	8450	8319
	Perempuan	7366	8676
TOTAL	Laki-laki	99937	93564
	Perempuan	88635	97816
	Jumlah	188572	191380

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin, Kemantren dan Status Perkawinan Tahun 2023

Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Kota Yogyakarta

a. Cerai Hidup dan Cerai Mati

KEMANTREN	JENIS KELAMIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI
TEGALREJO	Laki-laki	393	450
	Perempuan	579	1817
JETIS	Laki-laki	304	331
	Perempuan	466	1441
GONDOKUSUMAN	Laki-laki	422	395
	Perempuan	559	1947
DANUREJAN	Laki-laki	231	249
	Perempuan	313	1086
GEDONGTENGEN	Laki-laki	229	245
	Perempuan	319	1024
NGAMPILAN	Laki-laki	165	199
	Perempuan	199	922
WIROBRAJAN	Laki-laki	264	348
	Perempuan	393	1388
MANTRIJERON	Laki-laki	303	427
	Perempuan	491	1789
KRATON	Laki-laki	230	228
	Perempuan	332	1169
GONDONANAN	Laki-laki	175	190
	Perempuan	213	776
PAKUALAMAN	Laki-laki	104	117
	Perempuan	179	625
MERGANGSAN	Laki-laki	323	343
	Perempuan	459	1684
UMBULHARJO	Laki-laki	585	693
	Perempuan	1006	3088
KOTAGEDE	Laki-laki	276	342
	Perempuan	433	1495
TOTAL	Laki-laki	4004	4557
	Perempuan	5941	20251
	Jumlah	9945	24808

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin, Kemantren dan Status Perceraian Tahun 2023

Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Kota Yogyakarta

Tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Yogyakarta dengan status cerai hidup dan cerai mati serta sebarannya di setiap kemantren. Berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan menjadi putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Kemudian status cerai dibedakan menjadi cerai hidup dan cerai mati. Dapat dilihat bahwa penduduk yang cerai hidup maupun cerai mati lebih banyak perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa lebih banyak penduduk perempuan Kota Yogyakarta yang bercerai dan kemudian memilih untuk tidak menikah lagi, selaras dengan jumlah kepala keluarga perempuan yang juga menunjukkan peningkatan. Jumlah cerai hidup juga tampak menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu, berbanding terbalik dengan cerai mati yang mengalami penurunan angka. Meningkatnya jumlah perceraian hidup tidak dapat dilepaskan dari jumlah kekerasan di Kota Yogyakarta yang didominasi oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan pelaku adalah pasangannya sendiri (mayoritas suami).

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah metode untuk mengukur bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP (United Nation Development Programme) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala. IPM dibentuk dengan 3 dimensi dasar, antara lain:

- a. Usia yang panjang dan hidup sehat;
- b. Pengetahuan;
- c. Standar hidup layak.

Berikut adalah IPM Kota Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2022 berdasarkan jenis kelamin.

JENIS KELAMIN	(IPM) Indeks Pembangunan Manusia (%)		
	2021	2022	2023
LAKI-LAKI	87.72	88.14	88,83
PEREMPUAN	86.25	86.80	87,47
L+P	87.18	87.69	88,15

Tabel 2.5. IPM Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023
Sumber: bps.go.id

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Yogyakarta

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang menggambarkan rasio capaian antara Indeks Pembangunan Manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Bila angka yang dicapai mulai mendekati angka 100, maka hal ini menunjukkan bahwa semakin setaranya pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Namun bila angka tersebut semakin jauh dari angka 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Angka 100 merupakan indikator paling sempurna yang menunjukkan seimbangya capaian pembangunan laki-laki dan perempuan.

(IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (%)		
2021	2022	2023
98.32	98.48	98.47

Tabel 2.6. IPG Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
Sumber: bps.go.id

B. Gender dalam Kesehatan

1. Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Yogyakarta

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. AHH ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup pada umumnya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. Berikut adalah AHH Kota Yogyakarta beberapa tahun terakhir.

JENIS KELAMIN	(AHH) Angka Harapan Hidup		
	2021	2022	2023
LAKI-LAKI	72.92	72.95	73.18
PEREMPUAN	76.40	76.42	76.83
L+P	74.76	74.83	75.01

Tabel 2.7. AHH Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023
Sumber: bps.go.id

2. Jumlah Kematian Ibu Kota Yogyakarta

Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan, atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

Jumlah Kematian Ibu		
2021	2022	2023
16	4	0

Tabel 2.8. Jumlah kematian Ibu Tahun 2021-2023
Sumber: Denominator Data Riil, kesgadiy.web.id

Tabel diatas menunjukkan angka kematian ibu pada tahun 2023 turun dari tahun sebelumnya, hingga 0 (zero) kasus.

3. Ibu Hamil yang Berisiko Tinggi Kota Yogyakarta

Ibu Hamil Risiko Tinggi (Bumil Risti) atau *High Risk Pregnant Women* menurut Kementerian Kesehatan RI adalah Ibu hamil yang saat melahirkan menghadapi kemungkinan membahayakan, misalnya usia terlalu muda/tua, ibu dengan riwayat kelainan kehamilan dan persalinan.

PUSKESMAS	2021	2022	2023
DN I	13	13	9
DN II	14	9	9
GK I	54	50	41
GK II	10	12	11
GM	20	21	18
GT	23	21	19
JT	42	43	42
KG I	39	33	35
KG II	34	29	24
KT	21	21	18
MG	40	42	33
MJ	53	50	48
NG	27	21	23
PA	13	14	13
TR	64	61	61
UH I	96	89	78
UH II	25	33	30
WB	42	41	41
JUMLAH	630	603	553

Tabel 2.9. Jumlah Bumil Risti Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
Sumber: Denominator Data Riil, kesgadiy.web.id

Dari Tahun 2021 s/d 2023 jumlah bumil risti berturut-turut mengalami penurunan. Tetap menjadi pekerjaan bersama agar jumlah bumil risti konsisten mengalami penurunan melalui sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat agar calon ibu hamil memiliki kesiapan dari faktor fisik hingga psikologis. Selain itu, dampak dari kehamilan risiko tinggi baiknya juga dipersiapkan pencegahan dan penanganannya melalui pemeriksaan rutin kehamilan (*antenatal care*). Pelayanan antenatal dapat mendeteksi dan menangani kasus risiko tinggi secara memadai, pertolongan persalinan yang bersih dan aman, serta pelayanan rujukan kebidanan/perinatal yang terjangkau. Pentingnya *Antenatal Care* terpadu dalam pemeriksaan ibu hamil resiko tinggi diharapkan dapat dilakukan sesuai standar minimal asuhan antenatal yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan menyeluruh sehingga mampu mendeteksi dan menangani risiko tinggi pada ibu hamil.

4. Jumlah Kematian *Neonatal* Kota Yogyakarta

Kematian *Neonatal* (Kematian Bayi Baru Lahir/*Neonatal Death Rate*) merupakan kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari. Masa *neonatal* sendiri dapat dibedakan lagi menjadi neonatal dini (0-6 hari) dan neonatal lanjut (7-28 hari). Berikut adalah jumlah kematian neonatal dalam kurun tahun 2021-2023 di Kota Yogyakarta.

	2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P
0-6 HARI	5	6	6	5	3	4
7-28 HARI	4	5	3	5	3	2

Tabel 2.10. Jumlah Kematian Neonatal Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023

Sumber: Denominator Data Riil, kesgadiy.web.id

Jumlah kematian *neonatal* cenderung menurun sejak Tahun 2021-2023, namun belum bisa mencapai 0 (*zero*) kasus. Masa *neonatal*, terutama saat lahir dan neonatal dini, adalah masa yang rentan dan mudah terjadi komplikasi. Penyebab umum kematian bayi dan neonatal di DIY adalah asfiksia pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit. Selain itu penyebab lain kematian bayi yang sering dijumpai di DIY dikarenakan oleh kelainan bawaan (Dinkes DIY).

5. Jumlah Kematian *Post Neonatal* Kota Yogyakarta

Kematian *Post Neonatal* merupakan kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun (29 Hari-11 Bulan). Berikut adalah jumlah kematian *post neonatal* dalam kurun waktu Tahun 2021-2023 di Kota Yogyakarta.

JENIS KELAMIN	2021	2022	2023
LAKI-LAKI	5	5	4
PEREMPUAN	5	3	4
L+P	10	8	8

Tabel 2.11. Jumlah Kematian *Post Neonatal* Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023

Sumber: Denominator Data Riil, kesgadiy.web.id

Jumlah kematian *Post Neonatal* di Tahun 2023 masih sama dengan tahun sebelumnya, bahkan terjadi penambahan 1 kematian *Post Neonatal* perempuan. Jika kematian neonatal lebih banyak disebabkan oleh kondisi sewaktu masih di dalam kandungan, maka kematian *post neonatal* lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Upaya pencegahan kematian post neonatal ini perlu dilakukan, terutama dengan menjaga kebersihan dan kondusifitas lingkungan sekitar anak.

6. Jumlah Kematian Balita Kota Yogyakarta

Kematian Balita adalah Jumlah kematian anak yang berumur berusia 0-<5 tahun (0-59 bulan) selama satu tahun tertentu. Berikut adalah jumlah kematian anak balita usia 12-59 Bulan dalam kurun waktu Tahun 2021-2023 di Kota Yogyakarta.

JENIS KELAMIN	2021	2022	2023
LAKI-LAKI	2	1	7
PEREMPUAN	1	2	5
L+P	3	3	12

Tabel 2.12. Jumlah Kematian Balita Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023

Sumber: Denominator Data Riil, kesgadiy.web.id

Dari tabel diatas, terlihat penambahan jumlah kematian Balita di tahun 2023 dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi cukup signifikan, yaitu 4 kali lipatnya dan lebih banyak peningkatan terjadi pada balita laki-laki. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian lebih dari semua pihak, terutama pemerintah dalam hal KIE kesehatan anak dan peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh kalangan masyarakat Kota Yogyakarta.

7. Jumlah Bayi Lahir Hidup Kota Yogyakarta

Secara angka absolut jumlah bayi lahir hidup di Kota Yogyakarta dari Tahun 2021 s/d 2023 cenderung menurun, berbanding lurus dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Berikut adalah jumlah bayi lahir hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2021 s/d 2023 dan persebarannya di setiap kemantren.

KEMANTREN	2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P
TEGALREJO	25	27	25	28	20	20
JETIS	30	24	30	23	24	18
GONDOKUSUMAN	119	126	82	80	88	75
DANUREJAN	20	24	24	20	23	20
GEDONGTENGEN	39	39	49	44	34	38
NGAMPILAN	50	48	42	38	48	45
WIROBRAJAN	99	88	86	72	79	87
MANTRIJERON	89	91	64	75	85	76
KRATON	70	63	70	76	45	56
GONDOMANAN	46	55	50	46	47	45
PAKUALAMAN	100	95	73	85	58	73
MERGANGSAN	117	111	128	97	115	93
UMBULHARJO	45	66	50	39	52	41
KOTAGEDE	32	32	33	29	22	32
JUMLAH	1385	1372	1274	1225	1228	1199

Tabel 2.13. Jumlah Bayi Lahir Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
Sumber: Denominator Data Riil, kesgadiy.web.id

8. Jumlah dan Persentase Wanita Usia Subur (WUS) Menurut Umur Kawin Pertama Kota Yogyakarta

Menurut BKKBN Wanita Usia Subur (WUS) Adalah wanita yang berumur 15- 49 tahun baik yang berstatus kawin maupun yang belum kawin atau janda. Berikut adalah sebaran WUS berstatus kawin/pernah kawin di setiap kemantren.

KEMANTREN	2021				2022				2023			
	<20 tahun	%	≥20 Tahun	%	<20 tahun	%	≥20 Tahun	%	<20 tahun	%	≥20 Tahun	%
TEGALREJO	601	14.37	3,581	85.63	573	14.67	3,332	85.33	542	14.55	3,184	85.45
JETIS	395	16.12	2,055	83.88	367	15.91	1,94	84.09	385	15.77	2,056	84.23
GONDOKUSUMAN	439	12.30	3,13	87.70	431	12.73	2,955	87.27	422	12.56	2,939	87.44
DANUREJAN	269	14.51	1,585	85.49	265	14.87	1,517	85.13	252	14.68	1,465	85.32
GEDONGTENGEN	279	17.57	1,309	82.43	279	17.57	1,309	82.43	255	18.16	1,149	81.84
NGAMPILAN	230	13.71	1,447	86.29	230	13.71	1,447	86.29	243	13.94	1,500	86.06
WIROBRAJAN	384	13.80	2,399	86.20	341	13.19	2,244	86.81	330	13.35	2,141	86.65
MANTRIJERON	487	12.83	3,309	87.17	435	12.41	3,07	87.59	437	12.19	3,149	87.81
KRATON	180	10.38	1,554	89.62	180	10.38	1,554	89.62	178	10.19	1,569	89.81
GONDONMANAN	203	14.50	1,197	85.50	203	14.50	1,197	85.50	189	14.95	1,075	85.05
PAKUALAMAN	120	12.49	841	87.51	120	12.49	841	87.51	112	12.98	751	87.02
MERGANGSAN	456	14.07	2,785	85.93	427	13.91	2,643	86.09	431	13.43	2,778	86.57
UMBULHARJO	964	11.86	7,161	88.14	884	11.40	6,871	88.60	863	11.07	6,930	88.93
KOTAGEDE	543	12.29	3,875	87.71	507	12.07	3,692	87.93	507	11.59	3,866	88.41
JUMLAH	5,55	13.28	36,228	86.72	5,242	13.15	34,612	86.85	5,146	12.96	34,552	87.04

Tabel 2.14. Jumlah dan Persentase Wanita Usia Subur (WUS) Menurut Umur Kawin Pertama Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
Sumber: Denominator Data Riil, kesgadiy.web.id

Dari Tahun 2021 s/d 2023 Kemantren Gedongtengen memiliki prosentase WUS <20 tahun paling besar, dan konsisten mengalami peningkatan.

Usia WUS yang baik untuk kehamilan berkisar 20-35 Tahun. Pada usia tersebut alat reproduksi wanita telah berkembang dan berfungsi secara maksimal, begitu juga faktor kejiwaannya sehingga mengurangi berbagai risiko ketika hamil. Wanita Usia Subur (WUS) yang umurnya berkisar antara 20-35 tahun organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik dan sempurna. Puncak kesuburan ada pada rentang usia 20-29 tahun. Wanita dalam rentang usia ini memiliki kesempatan 95% untuk hamil, namun persentasenya menurun menjadi 90% pada usia 30- an tahun. Sedangkan saat memasuki usia 40 tahun, kesempatan hamil berkurang hingga menjadi 40%. Setelah usia 40 tahun, wanita mengalami penurunan sistem reproduksi secara fungsional menjadi 10% (WHO, 2009). Risiko yang dapat ditimbulkan dari kehamilan WUS usia <20 tahun dan >40 tahun telah disikapi oleh pemerintah melalui kebijakan pendewasaan usia pernikahan, bimbingan calon pengantin dan program KB (Keluarga Berkualitas).

9. Penyandang Cacat Kota Yogyakarta

Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik;
- b. Penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental.

Berikut adalah sebaran penyandang disabilitas per kemantren dan jenis kelamin Tahun 2022 yang dihimpun dari data pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

KEMANTREN	CACAT FISIK		CACAT NETRA		CACAT RUNGU		CACAT MENTAL		CACAT FISIK&MENTAL		CACAT LAINNYA	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
TEGALREJO	11	6	8	6	8	15	73	39	5	7	7	8
JETIS	19	15	5	8	18	14	53	27	0	1	13	15
GONDOKUSUMAN	11	11	8	9	17	8	60	37	8	4	23	22
DANUREJAN	3	8	2	1	8	11	31	19	2	0	12	9
GEDONGTENGEN	7	7	4	5	12	10	27	20	5	1	10	5
NGAMPILAN	9	7	3	5	8	3	32	15	0	1	14	5
WIROBRAJAN	14	17	10	5	14	18	61	46	4	2	17	11
MANTRIJERON	18	2	9	10	6	19	49	27	3	3	13	6
KRATON	8	3	2	2	13	7	28	17	4	2	6	10
GONDONANAN	14	17	2	2	8	11	45	15	1	3	12	13
PAKUALAMAN	3	4	3	1	2	3	15	5	3	2	3	4
MERGANGSAN	25	15	6	2	21	11	44	30	2	3	21	16
UMBULHARJO	20	24	14	12	23	20	144	96	8	4	16	13
KOTAGEDE	10	14	12	8	14	11	58	27	4	2	15	17
JUMLAH	172	160	88	76	172	161	720	420	49	35	182	155

Tabel 2.15. Jumlah Penyandang Cacat Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022
Sumber: Dinsos Kota Yogyakarta hasil pendataan

Hak-hak penyandang cacat tertuang pada Undang-Undang nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pemberian hak-hak penyandang cacat dimaksudkan untuk kesamaan kesempatan, yang merupakan keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

10. Status Gizi Baduta dan Balita Kota Yogyakarta

PUSKESMAS	JUMLAH BADUTA		JUMLAH BADUTA DIUKUR			STATUS GIZI INDIKATOR TB/U								STATUS GIZI INDIKATOR BB/TB												WASTING					
						SANGAT PENDEK		PENDEK		NORMAL		TINGGI		STUNTED			GIZI BURUK		GIZI KURANG		NORMAL		RISIKO GIZI LEBIH		GIZI LEBIH				OBESITAS		
	L	P	L	P	%	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	%	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	%		
MJ	181	157	137	123	76,92	4	1	12	7	121	115	0	0	16	8	9,23	3	0	13	5	114	102	5	14	2	2	0	0	16	5	8,08
KT	55	52	45	44	83,18	1	0	10	3	34	41	0	0	11	3	15,73	0	0	4	3	37	38	4	3	0	0	0	0	4	3	7,78
MG	127	138	117	124	90,94	7	2	11	4	99	118	0	0	18	6	9,96	0	1	9	2	90	102	11	16	5	2	2	1	9	3	4,98
UH I	213	233	161	173	74,89	6	9	32	21	123	143	0	0	38	30	20,36	1	1	12	8	137	149	9	10	0	3	1	2	13	9	6,61
UH II	158	155	129	131	83,07	8	1	12	12	109	118	0	0	20	13	12,69	0	0	8	8	99	11	19	8	1	4	1	0	8	8	6,18
KG I	107	103	114	106	76,12	3	2	9	7	102	96	0	1	12	9	9,55	0	0	12	5	93	95	9	3	1	2	0	2	12	5	7,66
KG II	107	103	88	87	83,33	2	0	8	7	78	80	0	0	10	7	9,71	0	0	5	3	77	76	6	4	0	3	0	1	5	3	4,57
GK I	113	115	91	88	78,51	2	2	13	9	75	76	1	1	15	11	14,53	2	1	8	6	75	74	4	3	1	3	1	1	10	7	9,50
GK II	45	35	42	30	90,00	0	1	3	0	39	29	0	0	3	1	5,56	0	0	3	1	35	26	3	2	1	1	0	0	3	1	5,56
DN I	39	45	36	43	94,05	0	0	4	5	32	38	0	0	4	5	11,39	0	0	2	3	30	38	3	1	1	1	0	0	2	3	6,33
DN II	48	40	44	38	93,18	1	3	4	1	39	34	0	0	5	4	10,98	0	1	7	2	34	32	2	3	1	0	0	0	7	3	12,20
PA	47	44	42	37	86,81	0	0	2	0	40	37	0	0	2	0	2,53	1	0	3	2	36	32	2	3	0	0	0	0	4	2	7,59
GM	86	73	68	54	76,73	2	0	3	6	63	48	0	0	5	6	9,02	1	1	1	7	63	44	2	0	1	0	0	2	2	8	8,20
NG	116	73	82	52	70,90	13	1	16	8	52	43	1	0	29	9	28,36	0	1	10	4	56	43	10	4	2	1	2	0	10	5	11,28
WB	155	156	149	146	94,86	2	1	5	9	142	135	0	1	7	10	5,76	1	1	7	11	134	127	6	7	1	0	0	0	8	12	6,78
GT	93	72	77	54	79,39	2	1	10	9	65	44	0	0	12	10	16,79	0	0	2	4	64	47	8	2	2	1	1	0	2	4	4,58
JT	124	122	117	117	95,12	2	1	11	6	103	110	1	0	13	7	8,55	0	0	11	8	99	102	5	6	1	1	1	0	11	8	8,12
TR	245	177	207	164	87,91	5	2	22	6	177	156	3	0	27	8	9,43	2	0	14	6	172	143	11	11	5	4	3	0	16	6	5,93
JMLH	2093	1938	1746	1611	83,28	60	27	187	120	1493	1461	6	3	247	147	11,74	11	7	131	88	1445	1381	119	100	25	28	12	9	142	95	7,06

Tabel 2.16. Status Gizi Baduta Kota Yogyakarta Tahun 2023 Berdasarkan Puskesmas dan Jenis Kelamin
Sumber: Dinkes Kota Yogyakarta hasil pengukuran

PUSKE SMAS	JUMLAH BALITA		JUMLAH BALITA DIUKUR			STATUS GIZI INDIKATOR TB/U								STATUS GIZI INDIKATOR BB/TB												WASTING					
						SANGAT PENDEK		PENDEK		NORMAL		TINGGI		STUNTED			GIZI BURUK		GIZI KURANG		NORMAL		RISIKO GIZI LEBIH		GIZI LEBIH				OBESITAS		
	L	P	L	P	%	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	%	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	%		
MJ	583	463	471	376	80,98	10	10	44	19	417	344	0	3	54	29	9,80	4	2	37	13	389	320	28	34	9	5	4	2	41	15	6,61
KT	221	211	187	175	83,80	3	0	21	16	163	159	0	0	24	16	11,05	1	1	13	10	149	146	15	13	6	4	3	1	14	11	6,91
MG	440	434	404	394	91,30	11	6	33	34	360	354	0	0	44	40	10,53	0	2	33	15	318	320	23	34	16	14	12	8	33	17	6,29
UH I	742	725	554	557	75,73	18	17	72	75	462	465	2	0	90	92	16,38	2	2	38	35	455	448	24	38	7	9	5	7	40	37	7,20
UH II	440	429	362	332	79,86	14	4	46	31	302	197	0	0	60	35	13,69	1	0	33	24	281	277	33	21	6	8	6	2	34	24	8,38
KG I	453	422	336	286	71,09	7	5	48	36	281	244	0	1	55	41	15,43	2	0	33	20	274	243	19	14	6	6	3	4	35	20	8,81
KG II	282	246	204	195	75,57	5	0	19	14	180	181	0	0	24	14	9,52	0	0	11	7	177	169	11	11	3	5	2	3	11	7	4,51
GK I	378	369	301	288	78,85	9	7	35	35	256	245	1	1	44	42	14,60	5	2	23	21	240	233	17	21	6	6	7	4	28	23	8,72
GK II	155	150	139	133	89,18	1	1	14	13	124	119	0	0	15	14	10,66	1	1	12	5	115	112	9	10	2	3	0	2	13	6	6,99
DN I	139	120	130	110	92,66	1	1	14	13	115	96	0	0	15	14	12,08	0	0	6	6	111	94	8	3	5	6	0	0	6	6	5,02
DN II	133	126	123	116	92,28	1	4	12	7	110	105	0	0	13	11	10,04	1	1	12	9	97	94	9	9	2	1	1	2	13	10	9,66
PA	144	125	122	103	83,64	0	0	10	3	112	100	0	0	10	3	5,78	2	0	5	5	103	83	7	13	4	1	1	1	7	5	5,33
GM	231	210	175	154	74,60	2	1	17	13	156	140	0	0	19	14	10,03	2	1	8	14	150	127	9	4	4	2	1	10	15	7,62	
NG	308	226	189	150	63,48	13	5	34	23	141	122	1	0	47	28	22,12	4	1	21	15	134	122	17	9	6	1	6	3	25	16	12,09
WB	440	394	407	369	93,05	5	4	28	32	373	332	1	1	33	36	8,89	1	2	18	23	347	318	24	17	8	3	9	6	19	25	5,67
GT	253	217	209	157	77,87	9	6	35	23	165	128	0	0	44	29	19,95	1	0	6	9	170	136	14	6	8	3	10	3	7	9	4,37
JT	36	357	335	329	92,22	4	1	34	29	296	299	1	0	38	30	10,24	1	0	35	25	271	270	13	23	8	7	6	4	36	25	9,25
TR	713	579	604	506	85,91	14	8	63	41	524	457	3	0	77	49	11,35	2	1	32	25	505	429	34	26	18	18	12	6	34	26	5,47
JMLH	6418	5803	5252	4730	81,68	127	80	579	457	4537	4187	9	6	706	537	12,45	30	16	376	281	4286	3941	314	306	124	102	88	64	406	297	7,11

Tabel 2.17. Status Gizi Balita Kota Yogyakarta Tahun 2023 Berdasarkan Puskesmas dan Jenis Kelamin
Sumber: Dinkes Kota Yogyakarta hasil pengukuran

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi masalah gizi anak, langsung maupun tidak langsung. Masalah gizi bukanlah masalah yang hanya disebabkan oleh kemiskinan. Melainkan juga karena aspek sosial-budaya (kepercayaan, pendidikan, dan pekerjaan) yang ada di masyarakat kita, sehingga menyebabkan tindakan yang tidak menunjang tercapainya gizi yang memadai. Keadaan sosial ekonomi suatu keluarga sangat mempengaruhi tercukupi atau tidaknya kebutuhan primer, sekunder, serta perhatian dan kasih sayang yang akan diperoleh anak. Hal tersebut tentu berkaitan erat dengan pendapatan keluarga, jumlah saudara dan pendidikan orang tua.

Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga, karena rumah tangga yang sehat merupakan aset pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi. Lingkungan yang tidak sehat menjadikan balita rawan terkena penyakit infeksi, dan Infeksi dapat menyebabkan kurang gizi atau sebaliknya.

11 Jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) Kota Yogyakarta

Diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak harus dilindungi sehingga mereka mampu tumbuh sehat, cerdas, dan bermental baik. Selain aturan perundangan tersebut, juga terdapat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Peraturan tersebut secara umum menjelaskan bahwa anak-anak memiliki hak terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah Kota/Kabupaten. Pelayanan yang diberikan diarahkan juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA). Upaya-upaya tersebut yang kemudian digagas dalam suatu program kebijakan KLA.

Pada bidang kesehatan pemerintah Kota Yogyakarta telah intensif melaksanakan program kesehatan ramah anak, terutama pada taraf fasilitas tingkat 1 (Puskesmas). Puskesmas yang memberikan pelayanan yang ramah anak menjadi salah satu daya ungkit untuk mewujudkan KLA. Dimana beberapa indikatornya adalah terdapat dokter dan psikolog anak, pegawai Puskesmas yang memahami Konvensi Hak Anak (KHA), ruang tunggu dan fasilitas gedung yang ramah terhadap anak.

Hal tersebut sudah membuahkan hasil dimana sejak tahun 2017 hingga saat ini seluruh Puskesmas (18 Puskesmas) yang ada di Kota Yogyakarta berhasil menyandang predikat ramah anak, dengan sebarannya sebagai berikut

NAMA PUSKESMAS	KEMANTREN
PUSKESMAS TEGAREJO	TEGALREJO
PUSKESMAS JETIS	JETIS
PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I	GONDOKUSUMAN
PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II	GONDOKUSUMAN
PUSKESMAS DANUREJAN I	DANUREJAN
PUSKESMAS DANUREJAN II	DANUREJAN
PUSKESMAS GEDONGTENGEN	GEDONGTEGEN
PUSKESMAS NGAMPILAN	NGAMPILAN
PUSKESMAS WIROBRAJAN	WIROBRAJAN
PUSKESMAS MANTRIJERON	MANTRIJERON
PUSKESMAS KRATON	KRATON
PUSKESMAS GONDONMANAN	GONDONMANAN
PUSKESMAS PAKUALAMAN	PAKUALAMAN
PUSKESMAS MERGANGSAN	MERGANGSAN
PUSKESMAS UMBULHARJO I	UMBULHARJO
PUSKESMAS UMBULHARJO II	UMBULHARJO
PUSKESMAS KOTAGEDE I	KOTAGEDE
PUSKESMAS KOTAGEDE II	KOTAGEDE
JUMLAH	18

Tabel 18. Puskesmas Ramah Anak di Kota Yogyakarta Berdasarkan kemantren Tahun 2023
Sumber: Bidang Perlindungan dan Pemenuha Hak Anak DP3AP2KB Kota Yogyakarta

C Gender dalam Pendidikan

1. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai Kota Pendidikan tidak lepas dari banyaknya institusi pendidikan di Kota Yogyakarta. Selain itu angka harapan dan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Yogyakarta yang melebihi rata-rata nasional dan tertinggi di Provinsi DIY. Di bawah ini adalah jenjang pendidikan penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2023.

KEMANTREN	Tdk/Blm Sekolah		Blm Tamat SD		SD/ Sederajat		SLTP/ Sederajat		SLTA/ Sederajat		Diploma I-III		Diploma IV/ Strata-I		Strata-II		Strata-III		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
TR	3078	2987	2035	2423	1566	1839	2428	2501	5559	5353	103	164	2533	2588	322	266	57	17	18327	19110
JT	2194	2177	1318	1276	1290	1672	1619	1770	4281	4409	58	114	1684	1730	190	159	23	11	13111	13977
GK	3567	3438	2028	2161	1508	1879	2218	2492	5922	6113	154	279	3731	3883	581	500	96	50	20837	22214
DN	1673	1541	1034	1075	856	1036	1329	1453	3428	3428	42	86	1450	1475	154	144	27	9	10376	10777
GT	1441	1427	1026	964	1015	1185	1381	1454	3079	3135	60	85	996	1033	98	102	12	9	9413	9800
NG	1431	1416	910	866	727	915	1125	1221	2851	2782	38	65	1284	1351	137	141	19	10	8853	9218
WB	2367	2250	1583	1649	1137	1211	1695	1809	3969	4058	75	134	2124	2253	266	223	33	22	13772	14334
MJ	3020	2887	1587	1599	1448	1710	1986	2173	5189	5285	72	135	2770	2936	331	325	30	25	17122	18100
KT	1654	1540	884	866	695	975	1194	1236	3321	3426	81	105	1842	1910	212	202	23	19	10417	11043
GM	1147	1138	607	695	698	821	1011	1058	2328	2302	35	60	988	1043	109	79	13	13	7148	7554
PA	717	701	547	514	356	479	591	672	1658	1817	32	67	792	903	110	77	8	7	5061	5561
MG	2687	2593	1501	1470	1174	1551	1795	1917	4553	4724	69	149	2538	2769	295	248	42	18	15310	16355
UH	6643	6515	3380	3438	3081	3682	3762	4004	9383	9326	204	316	6004	6558	911	787	133	73	34928	36630
KG	3299	3199	1666	1721	1919	2193	2058	1979	4794	4825	84	99	2550	2810	327	272	60	26	17387	17970
JUMLAH	34918	33809	20106	20717	17470	21148	24192	25739	60315	60983	1107	1858	31286	33242	4043	3525	576	309	202062	212643

Tabel 2.18. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kota Yogyakarta
Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas terlihat sejumlah 247.175 atau sekitar 60% penduduk Kota Yogyakarta di tahun 2023 telah mendapatkan program wajib belajar 9 tahun, angka absolut maupun prosentase tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada jenjang pendidikan tinggi angka partisipasi penduduk perempuan juga sudah mencapai 51%. Angka ini memperlihatkan bahwa akses pendidikan di Kota Yogyakarta sudah merata antara penduduk laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi di Tahun 2023 masih terdapat 109.550 atau sekitar 26% penduduk Kota Yogyakarta yang tidak atau belum sekolah. Penduduk yang tidak sekolah tentunya berdampak pada tingkat literasi dan penghidupannya. Oleh sebab itu pelaksanaan program kejar paket yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta harapannya dapat ditingkatkan dan menjangkau lebih banyak lagi penduduk yang belum mendapat kesempatan untuk mengenyam bangku sekolah.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Yogyakarta

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS mewakili dimensi pendidikan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah. Berikut HLS penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2021 hingga 2023.

JENIS KELAMIN	2021	2022	2023
LAKI-LAKI	17,46	17,47	17,48
PEREMPUAN	17,63	17,64	17,65
L+P	17,54	17,55	17,56

Tabel 2.19. HLS Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
Sumber: bps.go.id

Angka HLS Kota Yogyakarta dari tahun 2021 hingga tahun 2023 selalu mengalami kenaikan. HLS baiknya selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, karena hal tersebut menandakan bahwa adanya penurunan kemiskinan dan meningkatnya kondisi ekonomi serta hidup layak penduduk. HLS juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Kenaikan angka HLS menandakan bahwa sistem pendidikan di Kota Yogyakarta senantiasa mengalami pembangunan dan perbaikan

3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Yogyakarta

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Berikut adalah RLS penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2021 hingga 2023

JENIS KELAMIN	2021	2022	2023
LAKI-LAKI	11,91	12,02	12,24
PEREMPUAN	11,34	11,59	11,75
L+P	11,72	11,89	11,99

Tabel 2.20. RLS Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
Sumber: bps.go.id

RLS penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2021 hingga 2023 selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Akan tetapi RLS Laki-laki konsisten lebih tinggi dari yang Perempuan. Sehingga dari 1 aspek di Bidang Pendidikan ini, pemberdayaan perempuan masih perlu untuk ditingkatkan.

D. Gender dalam Ekonomi dan Ketenagakerjaan

1. Jumlah Kepala Keluarga Kota Yogyakarta

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepala keluarga identik dengan laki-laki yang mencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya. Sedangkan dari data yang ada diketahui bahwa peran kepala keluarga tidak hanya dijalankan oleh laki-laki, melainkan juga oleh perempuan. Sebagaimana di Kota Yogyakarta dapat kita lihat sebaran kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut.

KEMANTREN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
TEGALREJO	9339	3220
JETIS	6560	2666
GONDOKUSUMAN	10485	4016
DANUREJAN	5187	2029
NGAMPILAN	4674	1963
GEDONGTENGEN	4345	1609
KRATON	6912	2423
PAKUALAMAN	8735	3343
MANTRIJERON	5290	2142
GANDOMANAN	3629	1426
WIROBRAJAN	2556	1162
MERGANGSAN	7859	2891
UMBULHARJO	17858	5493
KOTAGEDE	8810	2570
JUMLAH	102239	36953

Tabel 2.21. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2023

Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Tabel diatas memperlihatkan sebesar 26% kepala keluarga di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 adalah perempuan, angka ini turun 9,5% dari tahun sebelumnya. Di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Yogyakarta kepala keluarga perempuan maka konteksnya adalah perempuan tersebut memikul tanggung jawab tunggal untuk menghidupi keluarganya. Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh PEKKA2 (Perempuan Kepala Keluarga), secara riil perempuan-perempuan yang menjadi kepala keluarga ini, antara lain: janda yang suaminya meninggal dunia, janda cerai, perempuan yang ditinggal suaminya dalam jangka waktu lama dan tidak diberi nafkah, perempuan lajang dari keluarga yang tidak mampu dan perempuan yang suaminya sedang sakit atau cacat. Para perempuan kepala keluarga ini rata-rata berasal dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah.

2. Jumlah Penduduk Penerima Manfaat Program Keluarga Sasaran Penerima Perlindungan Sosial (KSJPS)

KSJPS merupakan program perlindungan sosial dari Pemkot Yogyakarta untuk membantu keluarga fakir miskin, miskin dan rentan miskin. Berikut adalah sebaran penerima manfaat KSJPS pemuatkhiran tahun 2023 berdasarkan alamat KTP penduduk Kota Yogyakarta.

KEMANTREN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
TEGALREJO	2120	2336
JETIS	2250	2446
GONDOKUSUMAN	2611	2771
DANUREJAN	1708	1726
NGAMPILAN	635	677
GEDONGTENGEN	1361	1427
KRATON	1729	1934
PAKUALAMAN	809	859
MANTRIJERON	2747	2968
GANDOMANAN	958	1069
WIROBRAJAN	3196	3346
MERGANGSAN	2593	2766
UMBULHARJO	3703	3876
KOTAGEDE	1122	1333
JUMLAH	27542	29534

Tabel 2.22. Jumlah Penduduk Penerima Manfaat Program KSJPS Kota Yogyakarta Tahun 2023

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Jumlah absolut penduduk penerima manfaat program KSJPS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dengan penerima manfaat KSJPS laki-laki sebesar 13,63% sedangkan yang perempuan sebesar 13,89%.

3. Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Yogyakarta

Pengertian dari Badan Pusat Statistik (BPS) Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Sebaran penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut.

KEMANTREN	ANGKATAN KERJA		BUKAN ANGKATAN KERJA	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
TEGALREJO	9.819	5.953	8.508	13.157
JETIS	7.405	4.342	5.706	9.635
GONDOKUSUMAN	10.885	7.357	9.952	14.857
DANUREJAN	5.718	3.746	4.658	7.031
NGAMPILAN	4.804	3.160	4.049	6.058
GEDONGTENGEN	5.404	3.117	4.009	6.683
KRATON	5.588	3.945	4.829	7.098
PAKUALAMAN	2.757	1.966	2.304	3.595
MANTRIJERON	9.003	6.425	8.119	11.675
GANDOMANAN	4.131	2.596	3.017	4.958
WIROBRAJAN	7.414	4.941	6.358	9.393
MERGANGSAN	8.348	5.549	6.962	10.806
UMBULHARJO	18.233	12.599	16.695	24.031
KOTAGEDE	9.058	6.568	8.329	11.402
JUMLAH	108.567	72.264	93.495	140.379

Tabel 2.23. Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2023
Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah angkatan kerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan, meskipun dari segi jumlah penduduk perempuan di Kota Yogyakarta lebih banyak dari laki-laki. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya perempuan yang mengurus rumah tangga (Ibu Rumah Tangga) dan masuk kedalam kategori bukan angkatan kerja. Bahkan pekerjaan mengurus rumah tangga di Kota Yogyakarta seluruhnya tercatat dilakukan oleh perempuan sebagaimana tabel di bawah ini.

KEMANTREN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
TEGALREJO	0	5885
JETIS	0	4521
GONDOKUSUMAN	0	6091
DANUREJAN	1	3060
NGAMPILAN	0	2528
GEDONGTENGEN	0	3206
KRATON	0	2898
PAKUALAMAN	0	1510
MANTRIJERON	0	4604
GONDONANAN	0	2272
WIROBRAJAN	1	3840
MERGANGSAN	1	4581
UMBULHARJO	1	9338
KOTAGEDE	0	4265
JUMLAH	4	58598

Tabel 2.24. Penduduk Kota Yogyakarta yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2023
Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

4. Penduduk Bekerja dan Pengangguran Kota Yogyakarta

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (BPS Indonesia, 2014). Umumnya penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan lapangan kerja yang tersedia dengan laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2021 BPS DIY mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi se Provinsi DIY ada di Kota Yogyakarta. Adapun jumlah pengangguran yang tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dari tahun 2021 hingga 2023 adalah sebagai berikut.

KEMANTREN	PENDUDUK BEKERJA		PENGANGGURAN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
TEGALREJO	9.796	5.935	23	18
JETIS	7.135	4.199	270	143
GONDOKUSUMAN	10.781	7.279	104	78
DANUREJAN	5.634	3.719	84	27
NGAMPILAN	4.766	3.113	38	47
GEDONGTENGEN	5.177	2.986	227	131
KRATON	5.533	3.910	55	35
PAKUALAMAN	2.751	1.955	6	11
MANTRIJERON	8.993	6.411	10	14
GONDONANAN	4.065	2.523	66	73
WIROBRAJAN	7.195	4.766	219	175
MERGANGSAN	8.039	5.419	309	130
UMBULHARJO	18.014	12.266	219	333
KOTAGEDE	9.032	6.523	26	45
JUMLAH	106.911	71.004	1.656	1.260

Tabel 2.25. Penduduk Bekerja dan Pengangguran Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2023
Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

E. Gender dalam Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Kementerian PPPA RI Kebijakan/Program Responsif Gender merupakan kebijakan/program yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, kontrol dan menerima manfaat pembangunan serta mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin. Penyusunan kebijakan responsif gender dilakukan dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (termasuk lansia, anak2, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah). Tujuannya adalah untuk menjawab isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat dasar perencanaan dan penganggaran kebijakan yang responsif gender. Dan berikut ini adalah daftar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kota Yogyakarta yang telah dan belum menyusun GAP dan GBS dari Tahun 2021 hingga 2023.

OPD	2021	2022	2023
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	ada	ada	ada
Dinas Kesehatan	ada	ada	ada
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	ada	ada	ada
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	ada	ada	ada
Satuan Polisi Pamong Praja	ada	ada	ada
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	ada	ada	ada
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	ada	ada	ada

OPD	2021	2022	2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ada	ada	ada
Dinas Perdagangan	ada	tidak ada	tidak ada
Dinas Pertanian dan Pangan	tidak ada	ada	ada
Dinas Lingkungan Hidup	ada	ada	ada
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	ada	ada	ada
Dinas Perhubungan	ada	ada	ada
Dinas Kebudayaan		ada	ada
Dinas Pariwisata	ada	ada	ada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	ada	ada	ada
Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	ada	ada	ada
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	ada	ada	ada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	ada	ada	ada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ada	ada	ada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	ada	ada	ada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ada	ada	ada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ada	ada	ada
Sekretariat DPRD	ada	ada	tidak ada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	ada	ada	ada
Inspektorat	ada	ada	ada
RSUD Kota Yogyakarta	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Kemantren Tegalrejo	ada	ada	ada
Kelurahan Karangwaru	ada	tidak ada	tidak ada

OPD	2021	2022	2023
Kelurahan Kricak	ada	ada	ada
Kelurahan Bener	ada	ada	tidak ada
Kelurahan Tegalrejo	ada	ada	ada
Kemantren Jetis	ada	ada	ada
Kelurahan Bumijo	ada	ada	ada
Kelurahan Cokrodiningratan	ada	ada	tidak ada
Kelurahan Gowongan	ada	ada	tidak ada
Kemantren Gedongtengen	ada	ada	ada
Kelurahan Pringgokusuman	ada	ada	ada
Kelurahan Sosromenduran	ada	ada	ada
Kemantren Gondokusuman	ada	ada	ada
Kelurahan Terban	ada	ada	ada
Kelurahan Baciro	ada	ada	ada
Kelurahan Demangan	ada	ada	ada
Kelurahan Klitren	ada	ada	ada
Kelurahan Kotabaru	ada	ada	ada
Kemantren Danurejan	tidak ada	ada	ada
Kelurahan Bausasran	ada	ada	tidak ada
Kelurahan Suryatmajan	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Kelurahan Tegalpanggung	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Kemantren Wirobrajan	ada	ada	ada
Kelurahan Wirobrajan	ada	ada	ada
Kelurahan Patangpuluhan	ada	ada	tidak ada
Kelurahan Pakuncen	ada	ada	tidak ada
Kemantren Mantriheron	ada	ada	ada
Kelurahan Mantriheron	ada	ada	tidak ada
Kelurahan Suryodiningratan	ada	ada	ada

OPD	2021	2022	2023
Kelurahan Gedongkiwo	ada	ada	tidak ada
Kemantren Kraton	ada	ada	ada
Kelurahan Panembahan	ada	ada	ada
Kelurahan Patehan	ada	ada	tidak ada
Kelurahan Kadipaten	ada	ada	ada
Kemantren Ngampilan	ada	ada	ada
Kelurahan Ngampilan	ada	ada	ada
Kelurahan Notoprajan	ada	ada	ada
Kemantren Gondomanan	ada	ada	ada
Kelurahan Ngupasan	ada	ada	ada
Kelurahan Prawirodirjan	ada	ada	tidak ada
Kemantren Pakualaman	tidak ada	ada	tidak ada
Kelurahan Gunungketur	ada	tidak ada	tidak ada
Kelurahan Purwokinanti	tidak ada	tidak ada	ada
Kemantren Mergangsan	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Kelurahan Keparakan	ada	ada	ada
Kelurahan Wirogunan	ada	ada	ada
Kelurahan Brontokusuman	ada	ada	ada
Kemantren Umbulharjo	ada	ada	ada
Kelurahan Semaki	ada	ada	tidak ada
Kelurahan Muja Muju	tidak ada	ada	ada
Kelurahan Warungboto	ada	ada	ada
Kelurahan Tahunan	ada	ada	ada
Kelurahan Pandeyan	ada	ada	ada
Kelurahan Sorosutan	ada	tidak ada	ada
Kelurahan Giwangan	ada	ada	tidak ada
Kemantren Kotagede	ada	ada	ada
Kelurahan Prenggan	ada	ada	ada

OPD	2021	2022	2023
Kelurahan Rejowinangun	ada	ada	ada
Kelurahan Purbayan	ada	ada	ada
Sekretariat Daerah	ada	ada	ada
Bagian Tata Pemerintahan	ada	ada	ada
Bagian Hukum	ada	ada	ada
Bagian Kesejahteraan Rakyat	ada	ada	ada
Bagian Administrasi Pembangunan	ada	ada	ada
Bagian Perekonomian dan Kerjasama	tidak ada	ada	ada
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	tidak ada	ada	ada
Bagian Umum dan Protokol	ada	ada	ada
Bagian Organisasi	ada	ada	ada
Bagian Administrasi dan Keuangan	tidak ada	tidak ada	ada
Sekretariat DPRD	ada	ada	tidak ada
Inspektorat	ada	ada	ada
Pokja PUG	ada	ada	ada
Tim Teknis PUG	ada	ada	ada

Tabel 2.26. OPD di Kota Yogyakarta yang Sudah dan Belum Membuat GAP dan GBS Tahun 2021-2023
Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta

F. Gender dalam Politik

1. Jumlah Calon Legislatif Kota Yogyakarta

Kebijakan afirmatif dengan memberikan kuota 30% bagi kaum perempuan diatur dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif (UU 12/2003, UU 10/2008) dan Undang-Undang Partai Politik (UU 31/2002, UU 2/2008, UU 2/2011), maupun ratifikasi berbagai konvensi mengenai HAM. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan diskriminasi positif dalam rangka meningkatkan jumlah keterwakilan dan peran politik perempuan di DPR. Adapun tingkat partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif Kota Yogyakarta periode 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PARTAI POLITIK	CALEG LAKI-LAKI		CALEG PEREMPUAN	
	Σ	%	Σ	%
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	20	62,5%	12	37,5%
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	24	61,5%	15	38,5%
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	24	63%	14	37%
Partai Golongan Karya (Golkar)	22	55%	18	45%
Partai Nasional Demokrasi (Nasdem)	25	62,5%	15	37,5%
Partai Berkarya	10	59%	7	41%
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	26	65%	14	35%
Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	13	48%	14	52%
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	57%	3	43%
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3	50%	3	50%
Partai Amanat Nasional (PAN)	26	65%	14	35%
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	33%	2	67%
Partai Demokrat	21	60%	14	40%
Partai Bulan Bintang (PBB)	12	63%	7	37%
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	50%	1	50%
JUMLAH	232	60,3%	153	39,7%

Tabel 2.27. Jumlah Calon Legislatif Kota Yogyakarta Berdasarkan Partai dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024
Sumber: KPU Kota Yogyakarta

FRAKSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
PDI PERJUANGAN	11	2
PARTAI DEMOKRAT	1	0
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	6	0
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	5	0
PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	4	0
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	2	1
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	0
GERINDRA	3	2
TOTAL	33	5

Tabel 2.28. Jumlah Anggota DPRD Kota Yogyakarta Berdasarkan Fraksi dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024
Sumber: KPU Kota Yogyakarta

proporsi keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota Yogyakarta Periode 2019-2024 = $5/38 = 13\%$

2. Jumlah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Aktif Tahun 2023

LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah mufakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Adapun sebaran ketua LPMK di Kota Yogyakarta sebagai berikut.

KEMANTREN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
TEGALREJO	0	4
JETIS	0	3
GONDOKUSUMAN	0	5
DANUREJAN	0	3
NGAMPILAN	0	2
GEDONGTENGEN	0	2
KRATON	1	2
PAKUALAMAN	0	2
MANTRIJERON	0	3
GONDOMANAN	0	2
WIROBRAJAN	0	3
MERGANGSAN	0	3
UMBULHARJO	0	7
KOTAGEDE	0	3
JUMLAH	1	44

Tabel 2.29. Jumlah Ketua LPMK Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Periode 2023-2028
Sumber: LPMK Kota Yogyakarta

Pedoman Pelaksanaan Ketugasan LPMK di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 40 Tahun 2008. Didalamnya memuat ketugasan dari masing-masing pengurus LPMK, dalam hal merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan ketugasan tersebut khususnya pada urusan: keagamaan; keamanan, ketentraman dan ketertiban; pendidikan dan penerangan; kependudukan; dan pemuda, olahraga dan peranan wanita.

G. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Yogyakarta

Kedudukan dan peran ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Merujuk pada Pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik, PNS juga berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

1. Jumlah ASN Pemerintah Kota Yogyakarta

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa jumlah ASN di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini tergantung pada jumlah ASN yang pensiun dan jumlah penerimaan ASN di tahun tertentu. Sepanjang tahun 2021 hingga 2023 ASN perempuan jumlahnya lebih banyak daripada ASN laki-laki, dengan perbandingan pada tahun 2023 kurang lebih 3:5 atau 62% dari jumlah keseluruhan ASN di Kota Yogyakarta adalah Perempuan.

JENIS KELAMIN	2021	2022	2023
LAKI-LAKI	1.989	2.016	2.081
PEREMPUAN	3.021	3.253	3.505
L+P	5.010	5.269	5.586

Tabel 2.30. Jumlah ASN Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
Sumber: bkpp.jogjakota.go.id

Dalam praktek penyelenggaraan pelayanan dalam pemerintahan dibentuklah struktur hierarki, dari pimpinan hingga kepada level staff. Pada umumnya posisi pimpinan ini merupakan posisi yang banyak dipegang oleh laki-laki, namun banyak juga perempuan yang menduduki posisi-posisi strategis yang memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang berdampak pada sistem masyarakat. Berikut adalah sebaran ASN di Pemkot Yogyakarta berdasarkan jabatan dan jenis kelamin, serta berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin dari tahun 2021 s/d 2023.

JENIS JABATAN	JENIS KELAMIN	2021	2022	2023
JABATAN STRUKTURAL	LAKI-LAKI	438	343	344
	PEREMPUAN	433	335	345
JFT-PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	345	341	299
	PEREMPUAN	1181	1125	1015
JFT-KESEHATAN	LAKI-LAKI	135	177	163
	PEREMPUAN	629	891	772
JFT-TEKNIS	LAKI-LAKI	156	323	241
	PEREMPUAN	107	307	180
JABATAN FUNGSIONAL	LAKI-LAKI	915	832	1034
	PEREMPUAN	671	595	1193

Tabel 2.31. Jumlah ASN Kota Yogyakarta Berdasarkan Jabatan Tahun 2021-2023
Sumber: bkpp.jogjakota.go.id

JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	2021	2022	2023
TAMAT SD/SEDERAJAT	LAKI-LAKI	56	46	28
	PEREMPUAN	0	0	0
SMP/SEDERAJAT	LAKI-LAKI	128	103	66
	PEREMPUAN	4	3	2
SMA/SEDERAJAT	LAKI-LAKI	566	496	461
	PEREMPUAN	222	176	138
DIPLOMA	LAKI-LAKI	261	312	356
	PEREMPUAN	710	898	1004
STRATA 1	LAKI-LAKI	741	815	913
	PEREMPUAN	1683	1744	1948
STRATA 2	LAKI-LAKI	237	244	256
	PEREMPUAN	402	432	413
STRATA 3	LAKI-LAKI	0	0	1
	PEREMPUAN	0	1	1

Tabel 2.32. Jumlah ASN Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2023
Sumber: bkpp.jogjakota.go.id

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN Kota Yogyakarta dengan jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/Sederajat dari Tahun 2021 s/d 2023 rutin mengalami penurunan. Berbanding terbalik dengan ASN Kota Yogyakarta dengan jenjang pendidikan Diploma dan S1,2,3 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 s/d 2023. Hal ini menandakan bahwa latar belakang pendidikan ASN di Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik ASN laki-laki maupun perempuan.

2. Jumlah Mantri Pamong Praja Pemerintah Kota Yogyakarta

Mantri Pamong Praja (MPP) adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kemantren yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berikut adalah jumlah MPP dari tahun 2019 hingga 2022.

JENIS KELAMIN	2021	2022	2023
LAKI-LAKI	12	12	13
PEREMPUAN	2	2	1

Tabel 2.33. Jumlah MPP Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Jabatan Tahun 2021-2023
Sumber: bkpp.jogjakota.go.id

Proporsi MPP Perempuan di Kota Yogyakarta masih sangat kecil, bahkan di Tahun 2023 mengalami penurunan, yaitu hanya 7%.

3. Jumlah Lurah Pemerintah Kota Yogyakarta

Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat kemantren sebagaimana Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan. Kelurahan mempunyai tugas membantu Kemantren dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi dan pengaduan, perekonomian, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Kelurahan. Berikut jumlah lurah berdasarkan kemantren dan jenis kelamin di tahun 2022.

KEMANTREN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENSIUN
TEGALREJO	1	2	1
JETIS	1	1	1
GONDOKUSUMAN	4	0	1
DANUREJAN	3	0	0
NGAMPILAN	0	2	0
GEDONGTENGEN	1	1	0
KRATON	2	1	0
PAKUALAMAN	1	1	0
MANTRIJERON	1	1	1
GONDONANAN	2	0	0
WIROBRAJAN	2	1	0
MERGANGSAN	1	1	1
UMBULHARJO	5	2	0
KOTAGEDE	2	1	0
JUMLAH	26	14	5

Tabel 2.34. Jumlah Lurah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
Sumber: bkpp.jogjakota.go.id

Dari tahun-tahun sebelumnya jumlah lurah laki-laki selalu lebih banyak dari lurah perempuan. Di tahun 2023 terdapat 5 kelurahan dengan kekosongan posisi lurah dan dengan prosentase lurah laki-laki mencapai 65%. Sama halnya dengan MPP, jabatan lurah memiliki peranan strategis sebagai komando di wilayah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Proporsi kepemimpinan perempuan perempuan di wilayah yang minim, memungkinkan kurang teradvokasinya isu-isu gender, terutama perempuan dan anak.

BAB III

DATA ANAK

A. Jumlah dan Persentase Penduduk Anak Kota Yogyakarta

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, serta sifat khusus yang wajib dilindungi demi kepentingan bangsa di masa depan. Data Anak, data mengenai kondisi tentang anak perempuan dan anak laki-laki di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0 -1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13- 15 tahun, 16-17 tahun. Data terpilih adalah data terpilih menurut jenis kelamin, status, kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan. Berikut adalah jumlah dan persentase penduduk anak di Kota Yogyakarta dan sebarannya di setiap kemantren tahun 2023.

KEMANTREN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
TEGALREJO	4747	4571
JETIS	3374	3267
GONDOKUSUMAN	5252	5153
DANUREJAN	2651	2419
NGAMPILAN	2242	2124
GEDONGTENGEN	2248	2124
KRATON	2445	2321
PAKUALAMAN	1255	1196
MANTRIJERON	4370	4084
GONDONANAN	1707	1656
WIROBRAJAN	3618	3398
MERGANGSAN	3846	3647
UMBULHARJO	9361	9000
KOTAGEDE	4684	4465
JUMLAH	51800	49425

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2023
Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin

Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Kota Yogyakarta

Pada Tahun 2023 jumlah penduduk di Kota Yogyakarta adalah 414.705 jiwa yang terdiri dari 202.062 jiwa penduduk laki-laki dan 212.643 jiwa penduduk perempuan. Dari angka tersebut jumlah anak di Kota Yogyakarta mencapai 101.225 jiwa dengan jumlah anak laki-laki sebanyak 51.800 jiwa dan jumlah anak perempuan sebanyak 49.425 jiwa. Dengan demikian prosentase jumlah anak di Kota Yogyakarta adalah 24,41%. Angka tersebut mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2022 dengan prosentase anak sebesar 24,78%.

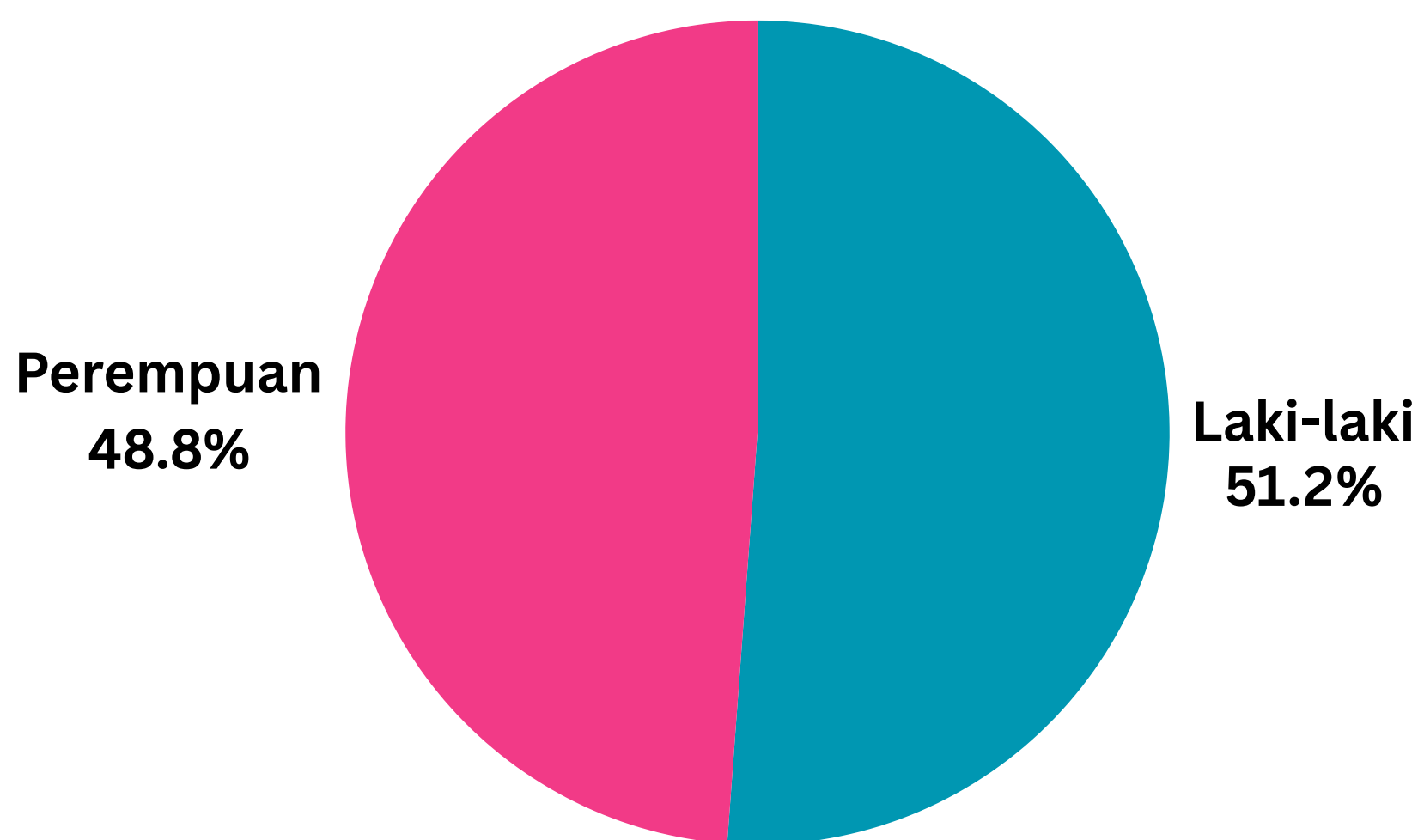


Diagram 3.1. Persentase Jumlah Penduduk Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Kota Yogyakarta

Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa persentase jumlah penduduk anak laki-laki dan perempuan cukup berimbang, selisih persentase yang tidak besar. Sedangkan untuk perbandingan berdasarkan kelompok usia Baduta, Balita, dan Remaja dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

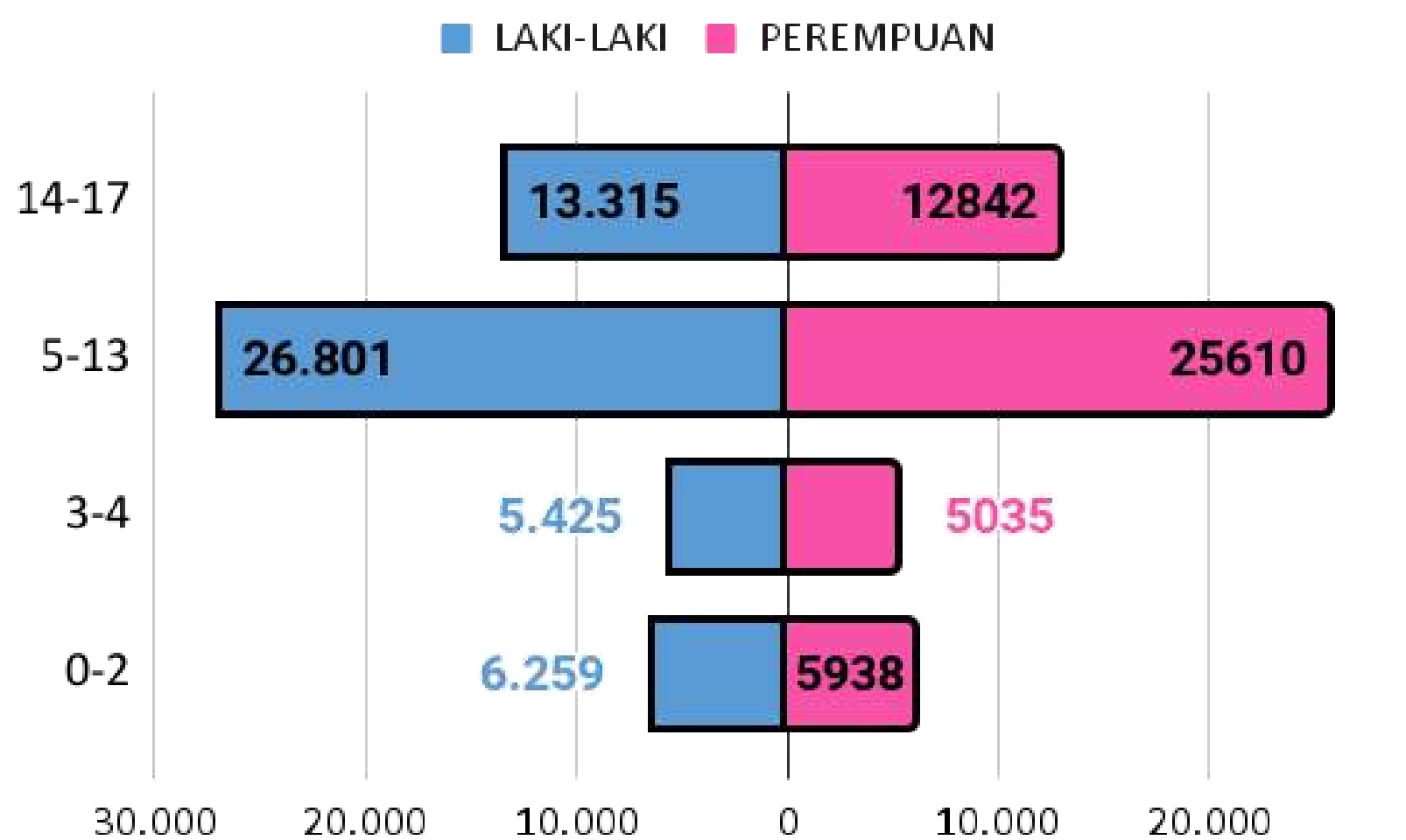


Diagram 3.2. Persentase Jumlah Penduduk Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia
Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Kota Yogyakarta

B. Perlindungan Anak Kota Yogyakarta

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab seluruh pihak, baik bagi orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan negara (UNICEF, 2020). Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman. Pertama, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Kedua, anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan yang didalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. PUHA sebagai strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

1. Anak Penyandang Disabilitas

Adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik, mental, intelektual atau sensorik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak. Anak dengan disabilitas memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi oleh semua pihak. Salah satu hak anak penyandang disabilitas yaitu mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Data terbaru di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 terdapat 3.103 penyandang disabilitas. 8,93% diantaranya merupakan anak-anak yaitu sekitar 277 orang.

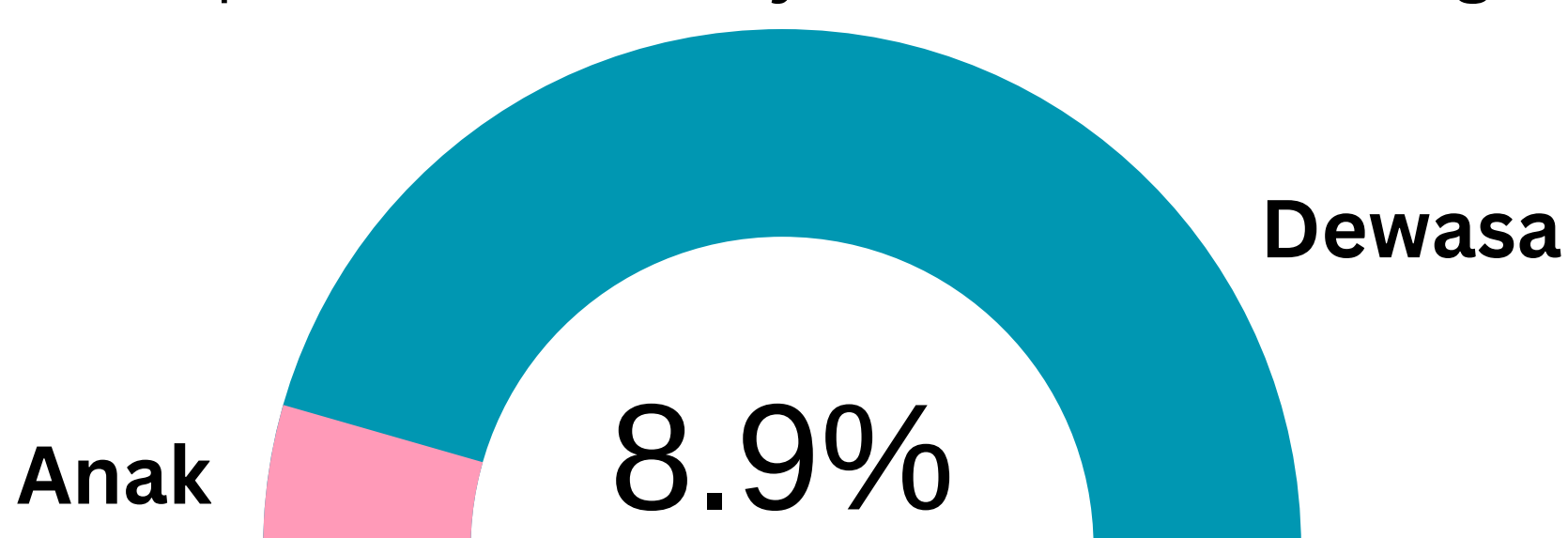


Diagram 3.3. Persentase Anak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Tahun 2022
Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

KEMANTREN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
TEGALREJO	17	9
JETIS	13	5
GONDOKUSUMAN	15	7
DANUREJAN	8	4
NGAMPILAN	5	3
GEDONGTENGEN	13	5
KRATON	20	14
PAKUALAMAN	12	6
MANTRIJERON	7	5
GONDOMANAN	6	7
WIROBRAJAN	6	2
MERGANGSAN	12	9
UMBULHARJO	26	19
KOTAGEDE	15	7
JUMLAH	175	102

Tabel 3.2. Jumlah Anak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Tahun 2022
Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin
Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Penyandang disabilitas ini merupakan salah satu dari yang termasuk kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok-kelompok individu yang lebih rentan dalam situasi bencana. Menurut pasal 55 ayat 2 Undang-undang Penanggulangan Bencana nomor 24 tahun 2007, yang termasuk kelompok rentan adalah: a. Bayi, balita, dan anak-anak b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui c. Penyandang cacat (disabilitas), dan d. Orang lanjut usia. Berdasarkan data diatas jumlah anak laki-laki dengan kedisabilitasannya lebih banyak daripada anak perempuan.

2. Anak Jalanan

Permasalahan anak jalanan terjadi karena beberapa faktor, diantaranya : permasalahan ekonomi yang berkaitan erat dengan kemiskinan, kondisi lingkungan yang justru mengarahkan anak pada kondisi yang tidak kondusif secara mentalitas, kondisi orang tua yang tidak responsif dalam memberikan perhatian pada anak, bahkan tidak dipungkiri, adanya kekerasan yang dilakukan orang tua pada anak.

KEMANTREN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
TEGALREJO	1	1
JETIS	0	0
GONDOKUSUMAN	0	0
DANUREJAN	0	0
NGAMPILAN	0	0
GEDONGTENGEN	0	0
KRATON	0	0
PAKUALAMAN	0	0
MANTRIJERON	0	0
GONDONANAN	0	0
WIROBRAJAN	0	0
MERGANGSAN	2	0
UMBULHARJO	0	0
KOTAGEDE	0	0
JUMLAH	3	1

Tabel 3.3. Jumlah Anak Jalanan Kota Yogyakarta Tahun 2022
Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin
Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa di Kota Yogyakarta masih terdapat anak jalanan yang tersebar di dua Kemantren yaitu Tegalrejo dan Mergangsan. Untuk masing-masing kemantren ada 2 orang anak. Diharapkan kedepan semua Kemantren di Kota Yogyakarta bisa zero anak jalanan. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan anak jalanan, diantaranya adalah pendekatan preventif serta pendekatan represif.

Pendekatan preventif merupakan upaya mengajak anak jalanan untuk diarahkan pada lingkungan formal, seperti pelatihan, training, peningkatan softskill. Sedangkan pendekatan represif merupakan bentuk kebijakan dan program yang telah terorganisir oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran anak jalanan di masyarakat. (2013, Profil Gender dan Anak Kota Yogyakarta).

C. Pemenuhan Hak Anak (Hak Sipil) Kota Yogyakarta

Anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin yang masih di dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Jenis data pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak, terdiri atas 5 (lima) klaster kebutuhan hak anak, meliputi:

1. Hak sipil dan kebebasan, antara lain: data anak yang memiliki akta kelahiran, informasi layak anak, lembaga partisipasi anak;
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain: data tentang lembaga konsultasi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain: data kematian bayi, status gizi balita, imunisasi, dan data rumah tangga dengan akses air bersih;
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, antara lain: data partisipasi sekolah dan data sekolah ramah anak;; dan
5. Perlindungan khusus, antara lain: data anak berkebutuhan khusus (disabilitas, autis, istimewa), data kekerasan terhadap anak, data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), data anak jalanan, dan data anak yang terisolasi.

Lalu Berikut ini adalah data-data terkait dengan hak sipil dan kebebasan anak di Kota Yogyakarta.

1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 27, dijelaskan bahwa akta kelahiran merupakan bentuk dari identitas anak yang perlu dipenuhi oleh orang tua. Hal ini karena, keberadaan akta kelahiran merupakan salah satu kunci bagi anak dalam mengakses pendidikan, dan juga sarana kesehatan. Berikut adalah jumlah dan persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia anak di Kota Yogyakarta dan sebarannya di setiap kemandren pada tahun 2023.

KEMANTREN	L	%	P	%
TEGALREJO	4.727	99,58%	4.540	99,32%
JETIS	3.350	99,29%	3.258	99,72%
GONDOKUSUMAN	5.217	99,33%	5.138	99,71%
DANUREJAN	2.645	99,77%	2.419	100,00%
NGAMPILAN	2.239	99,87%	2.120	99,81%
GEDONGTENGEN	2.228	99,11%	2.107	99,20%
KRATON	2.447	100,08%	2.319	99,91%
PAKUALAMAN	1.247	99,36%	1.192	99,67%
MANTRIJERON	4.363	99,84%	4.093	100,22%
GANDOMANAN	1.702	99,71%	1.648	99,52%
WIROBRAJAN	3.611	99,81%	3.386	99,65%
MERGANGSAN	3.839	99,82%	3.621	99,29%
UMBULHARJO	9.353	99,91%	8.993	99,92%
KOTAGEDE	4.689	100,11%	4.485	100,45%
JUMLAH	51.657	99,72%	49.319	99,79%

Tabel 3.4. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kemandren
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Secara keseluruhan kepemilikan akta kelahiran penduduk anak Kota Yogyakarta sudah mencapai 99.75%. Kemandren dengan persentase kepemilikan akta kelahiran terkecil adalah Kemandren Gedongtengen, dan kemandren dengan persentase kepemilikan akta kelahiran terbesar adalah Kemandren Kotagede.

2. Kartu identitas Anak (KIA)

Pembuatan KIA didasari atas pertimbangan bahwa, anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional. Padahal, identitas kependudukan sangat penting sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Perlu diketahui, KIA dibagi menjadi dua. Pertama, KIA untuk anak berusia kurang dari 5 tahun dan berlaku hingga anak berumur 5 tahun. Kedua, KIA untuk anak berusia di atas 5 tahun dan berlaku hingga usianya 17 tahun. Pemberian identitas yang resmi dan diakui secara nasional itulah yang diupayakan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan Kartu Identitas Anak. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta pada Tahun 2023 sejumlah 414.705 jiwa. Dari angka tersebut jumlah anak yang berusia dibawah 18 tahun ada 101.225 berarti 24.41% jumlah penduduk Kota Yogyakarta terdiri dari anak-anak berusia 0-17 tahun. Berikut adalah jumlah anak dengan kepemilikan KIA dan sebarannya per kemantren di Kota Yogyakarta tahun 2023.

KEMANTREN	L	%	P	%
TEGALREJO	3.698	77,90%	3.591	78,56%
JETIS	2.650	78,54%	2.626	80,38%
GONDOKUSUMAN	4.159	79,19%	4.129	80,13%
DANUREJAN	2.189	82,57%	2.007	82,97%
NGAMPILAN	1.833	81,76%	1.687	79,43%
GEDONGTENGEN	1.747	77,71%	1.657	78,01%
KRATON	1.914	78,28%	1.804	77,73%
PAKUALAMAN	1.008	80,32%	975	81,52%
MANTRIJERON	3.420	78,26%	3.198	78,31%
GANDOMANAN	1.345	78,79%	1.342	81,04%
WIROBRAJAN	2.967	82,01%	2.808	82,64%
MERGANGSAN	2.923	76,00%	2.787	76,42%
UMBULHARJO	7.474	79,84%	7.168	79,64%
KOTAGEDE	3.567	76,15%	3.433	76,89%
JUMLAH	40.894	78,95%	39.212	79,34%

Tabel 3.5. Jumlah dan Persentase Kepemilikan KIA Penduduk Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kemantren
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Capaian persentase kepemilikan KIA penduduk anak di Kota Yogyakarta adalah 79,14%. Angka ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kemantren dengan persentase kepemilikan KIA terkecil adalah Kemantren Mergangsan, dan kemantren dengan persentase kepemilikan akta kelahiran terbesar adalah Kemantren Danurejan.

3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) menurut Depsos RI (2004: 4), yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Berikut adalah jumlah LKSA yang ada di Kota Yogyakarta.

LKSA	2021	2022	2023
Panti Anak	12	14	16
Rumah Singgah	4	4	5
Taman Anak Sejahtera/Penitipan Anak	3	3	3

Tabel 3.6. Jumlah LKSA Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
Sumber: Kelurahan se-Kota Yogyakarta

Dari tahun 2021-2023 jumlah LKSA di Kota Yogyakarta selalu bertambah. Fungsi dari LKSA sendiri menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997) sebagai berikut:

- Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.
- Pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
- Pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang). Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.

D. Permasalahan Anak (Isu-Isu tentang Anak) Kota Yogyakarta

Terdapat beberapa persoalan krusial terkait dengan perlindungan anak antara lain mengenai kesehatan, pendidikan, perlindungan dan lain sebagainya.

1. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sebelum mencapai usia 19 tahun. Sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

KEMANTREN	JUMLAH PASANGAN
TEGALREJO	3
JETIS	3
GONDOKUSUMAN	10
DANUREJAN	3
NGAMPILAN	10
GEDONGTENGEN	8
KRATON	3
PAKUALAMAN	8
MANTRIJERON	7
GONDOMANAN	3
WIROBRAJAN	1
MERGANGSAN	12
UMBULHARJO	11
KOTAGEDE	10
JUMLAH	92

Tabel 3.7. Jumlah Calon Pasangan Pernikahan Usia Dini Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren Tahun 2023
Sumber: Kelurahan se-Kota Yogyakarta

Dari 92 pasangan usia dini yang didaftarkan di kelurahan se Kota Yogyakarta, tidak semua berlanjut pada pernikahan. Calon pengantin yang masih dibawah usia 19 tahun diwajibkan menjalani assesment calon pengantin di Puspaga, yang kemudian mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama.

Pernikahan dini dapat terjadi dengan berbagai alasan dan salah satunya adalah hubungan seks di luar nikah. Namun untuk kasus di Kota Yogyakarta sendiri, pernikahan dini hampir seluruhnya disebabkan oleh kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). Di tahun 2023 85% pernikahan usia dini yang disebabkan oleh KTD. Meskipun demikian hendaknya pernikahan dini tidak dijadikan satu-satunya solusi, karena pernikahan dini justru bisa menimbulkan perkara lain. Penguatan peran keluarga dalam pendidikan seks sejak dini sangat diperlukan, agar anak tahu akan risiko yang akan dihadapinya apabila menjalani kehidupan seks bebas. Di Tahun 2023 total calon pengantin usia dini yang menjalani asesment dikarenakan kehamilan adalah 41 pasang. Kemudian total kasus dispensasi yang pernikahan yang disetujui oleh pengadilan agama di Tahun 2023 adalah 23 pasangan. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 65 pasangan yang diputus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Dari tabel diatas pula dapat dilihat bahwa Kemantren Mergangsan menjadi Kemantren yang paling tinggi angka calon pengantin usia dini yang mendaftarkan di kelurahan. Akan tetapi untuk kasus pernikahan usia dini sendiri tidak mempunyai pola dari segi wilayah maupun waktu. Dan berikut adalah jumlah calon pasangan usia dini setiap bulannya di Tahun 2023.

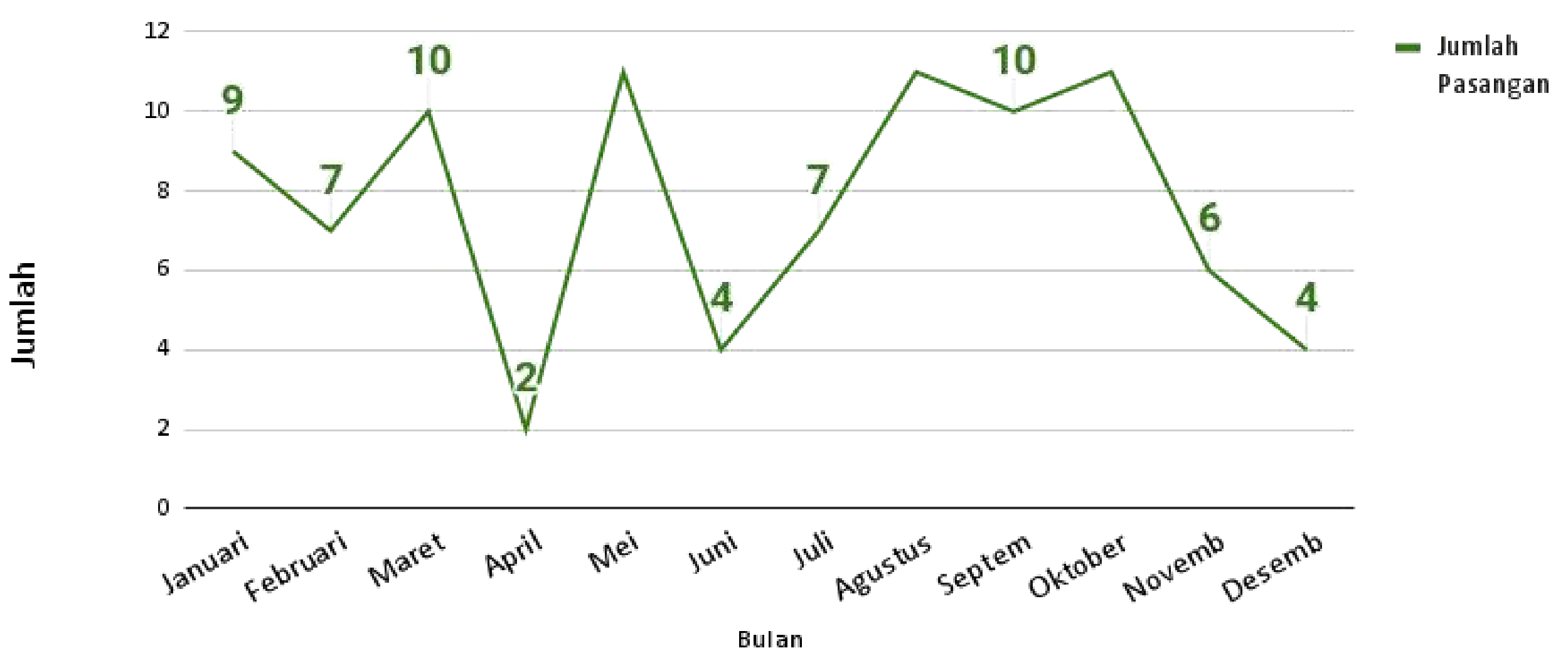


Diagram 3.4. Grafik Calon Pasangan Pengantin Usia Dini Setiap Bulan yang Mendaftar di Kelurahan Tahun 2023

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

2. Balita dalam Kondisi Stunting

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun (1000 HPK). Stunting berkembang dalam jangka panjang karena kombinasi dari beberapa atau semua faktor. Karena mengalami kekurangan gizi menahun, bayi stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurnya. Tapi ingat, stunting itu pasti bertubuh pendek, sementara yang bertubuh pendek belum tentu stunting. Oleh karena itu perlu usaha jangka panjang untuk mencegah stunting pada anak-anak.

Terkait dengan angka stunting di Kota Yogyakarta, di Tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 12,45%. Berikut ini jumlah dan persentase balita stunting di Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan sebarannya di setiap kemantren.

PUSKESMAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
MJ	54	29	9,80
KT	24	16	11,05
MG	44	40	10,53
UH I	90	92	16,38
UH II	60	35	13,69
KG I	55	41	15,43
KG II	24	14	9,5
GK I	44	42	14,60
GK II	15	14	10,66
DN I	15	14	12,08
DN II	13	11	10,04
PA	10	3	5,78
GM	19	14	10,03
NG	47	28	22,12
WB	33	36	8,89
GT	44	29	19,95
JT	38	30	10,24
TR	77	49	11,35
JUMLAH	706	537	12,45

Tabel 3.8. Jumlah Balita Stunting Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin dan Puskesmas Tahun 2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Jumlah Baduta Stunting di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 berjumlah 1.243 anak yang tersebar di 18 Puskesmas yang ada di Kota Yogyakarta. Rata-rata setiap puskesmas menangani kasus stunting sejumlah 88 kasus. Untuk menekan jumlah angka stunting dilakukan beberapa upaya diantaranya yaitu dimulai dari sebelum anak lahir, yakni saat para ibu atau pasangan usia subur merencanakan akan menikah, mereka harus dicek kesehatannya, mengkonsumsi asam folat, periksa hb, mengkonsumsi tambah darah. Banyak perempuan yang hamil dalam kondisi yang sebenarnya belum siap sehingga kemungkinan anaknya bisa stunting

3. Dapur Balita

Dapur Balita merupakan sebuah gerakan pemberdayaan yang muncul di masa pandemi covid 19 sebagai salah satu solusi bagi pemantauan gizi dan kesehatan khususnya untuk pemberian makanan tambahan bagi balita yang selama ini diberikan melalui posyandu. Jumlah Dapur Balita di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut.

2021	2022	2023
123	155	176

Tabel 3.9. Jumlah Dapur Balita Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023
Sumber: Pokja 4 PKK Kota Yogyakarta

Jumlah Dapur balita di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami kenaikan hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan asupan gizi terhadap anak balita semakin besar. Dapur balita di Kota Yogyakarta berbasis RW. Sampai saat ini jumlah dapur balita ada 155. Dapur balita tumbuh dari swadaya masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungannya. Dapur balita peduli Covid 19 juga bertujuan memantau tumbuh kembang anak melalui orang tua, selain itu secara sosial untuk meningkatkan gotong royong peduli bagi anak, sebagai individu yang rentan selama masa pandemik dengan tujuan jangka panjang adalah dengan berbagi makanan yang bergizi secara rutin diharapkan juga untuk pencegahan stunting.

4. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan keadaan dimana kondisi anak usia sekolah tidak mampu meneruskan pendidikan yang tersedia berdasarkan usianya. Meskipun telah dicanangkan tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah tetap saja masih ditemukan kasus putus sekolah di level pendidikan dasar maupun menengah. Berikut ini kami sampaikan jumlah angka putus sekolah Tahun 2023 di Kota Yogyakarta.

Jenis Kelamin	Angka Putus Sekolah (APS)
Laki-laki	1
Perempuan	1

Tabel 3.10. Angka Putus Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2023
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Sekolah
Laki-laki	99,99%
Perempuan	99,99%

Tabel 3.11. APS Kota Yogyakarta Tahun 2023
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

E. Kelembagaan Kota Layak Anak (KLA)

1. Kampung Ramah Anak (KRA)

Kampung ramah anak adalah pembangunan yang berbasis dari RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha yang berada di lingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin, memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi. Pentingnya Kampung Ramah Anak sebagai bagian dari pembangunan Kabupaten/Kota layak Anak. Berikut jumlah KRA yang terbentuk pada tahun 2011 hingga tahun 2023.

TAHUN PEMBENTUKAN	JUMLAH
TAHUN 2011	2
TAHUN 2012	12
TAHUN 2013	32
TAHUN 2014	68
TAHUN 2015	42
TAHUN 2016	6
TAHUN 2017	9
TAHUN 2018	9
TAHUN 2019	13
JUMLAH	193

Tabel 3.12. Jumlah KRA Kota Yogyakarta Berdasarkan Tahun Pembentukan
Sumber: Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Selama 4 tahun terakhir ini tidak ada penambahan kampung ramah anak yang terbentuk, jumlahnya masih sama dengan tahun 2019 yaitu ada 193. Di Kota Yogyakarta prosentase Kampung Ramah Anak baru mencapai 31.28% ini artinya dari 616 RW yang ada di Kota Yogyakarta baru 193 RW yang sudah KRA, yang sudah menerapkan komitmen untuk menghormati, menjamin, memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan. Berdasarkan Kemantren, persebaran KRA di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut.

KEMANTREN	JUMLAH
TEGALREJO	12
JETIS	13
GONDOKUSUMAN	19
DANUREJAN	15
NGAMPILAN	8
GEDONGTENGEN	8
KRATON	14
PAKUALAMAN	12
MANTRIJERON	12
GANDOMANAN	10
WIROBRAJAN	13
MERGANGSAN	17
UMBULHARJO	27
KOTAGEDE	13
JUMLAH	193

Tabel 3.13. Jumlah KRA Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren s/d Tahun 2023
Sumber: Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta

2. Puskesmas Ramah Anak (PRA)

Kesehatan merupakan salah satu hak anak yang wajib dipenuhi. Oleh sebab itu fasilitas kesehatan harus ramah anak agar anak-anak senang memeriksakan kesehatan mereka ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Untuk mewujudkan hal tersebut maka puskesmas harus mempunyai fasilitas yang mendukung. Beberapa indikator yang harus dipenuhi terkait puskesmas ramah anak salah satunya adalah mempunyai sarana bermain anak di lingkungan Puskesmas tersebut.

TAHUN PEMBENTUKAN	2017	2018
JUMLAH	10	18

Tabel 3.14. Jumlah PRA Kota Yogyakarta Berdasarkan Tahun Pembentukan
Sumber: Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Puskesmas Ramah Anak di Kota Yogyakarta mulai terbentuk pada tahun 2017, pada awalnya jumlah PRA yang terbentuk ada 10 Puskesmas (55,56%) . Sejak tahun 2018 semua Puskesmas di Kota Yogyakarta 100% sudah ramah anak. Pelayanan ramah anak di Puskesmas merupakan salah satu pendukung untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

3. Sekolah Ramah Anak (SRA)

Tujuan utama sekolah ramah anak adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi anak saat berada di sekolah. Tidak ada diskriminasi dan kekerasan yang dialami anak di sekolah. Kondisi tersebut dapat diwujudkan apabila tersedia sistem Pendidikan yang mendukung, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang mengerti dan didukung sarana prasarana yang memadai. Berikut ini kami sampaikan jumlah Sekolah Ramah Anak yang terbentuk di Kota Yogyakarta.

SEKOLAH	JUMLAH
TK NEGERI	11
TK SWASTA	3
SD/MI NEGERI	66
SD/MI SWASTA	6
SMP/MTS NEGERI	17
SMP/MTS SWASTA	21
JUMLAH	124

Tabel 3.15. SRA Kota Yogyakarta Tahun 2023
Sumber: Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta

4. Pesantren Ramah Anak

Akhir-akhir ini kembali marak adanya berita kasus kekerasan yang terjadi di Pesantren. Isu kekerasan menjadi penting untuk diketahui oleh publik dan diselesaikan bersama, karena kerap kali muncul di media massa, termasuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah pondok pesantren. Pesantren Ramah Anak mengupayakan perlindungan bagi para santri dari kekerasan, dan memastikan anak dapat tumbuh berkembang dengan aman dan nyaman, serta dapat memperoleh pendidikan. Saat ini di Kota Yogyakarta baru ada 2 Pesantren Ramah Anak dari total keseluruhan pesantren di Kota Yogyakarta.

5. Tempat Peribadatan Ramah Anak

Tempat peribadatan sebagaimana 6 agama yang diakui di Indonesia meliputi Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara serta Klenteng. Berikut ini kami sampaikan tempat peribadatan ramah anak yang ada di Kota Yogyakarta.

Prosentase masjid ramah anak di kota Yogyakarta masih sangat kecil yaitu 3.67% (19 masjid dan mushola ramah anak). Sedangkan prosentase gereja yang sudah ramah anak adalah 5.56% (3 gereja dari 54 gereja yang ada). Pura, Klenteng dan Vihara masing-masing tercatat ada 1 yang sudah ramah anak. Diharapkan kedepannya tempat peribadatan ramah anak di Kota Yogyakarta bisa bertambah. Selain sebagai tempat berlangsungnya salah satu fungsi keluarga yaitu fungsi agama, tempat peribadatan juga menjalankan fungsi keluarga sosialisasi dan pendidikan, serta cinta kasih.

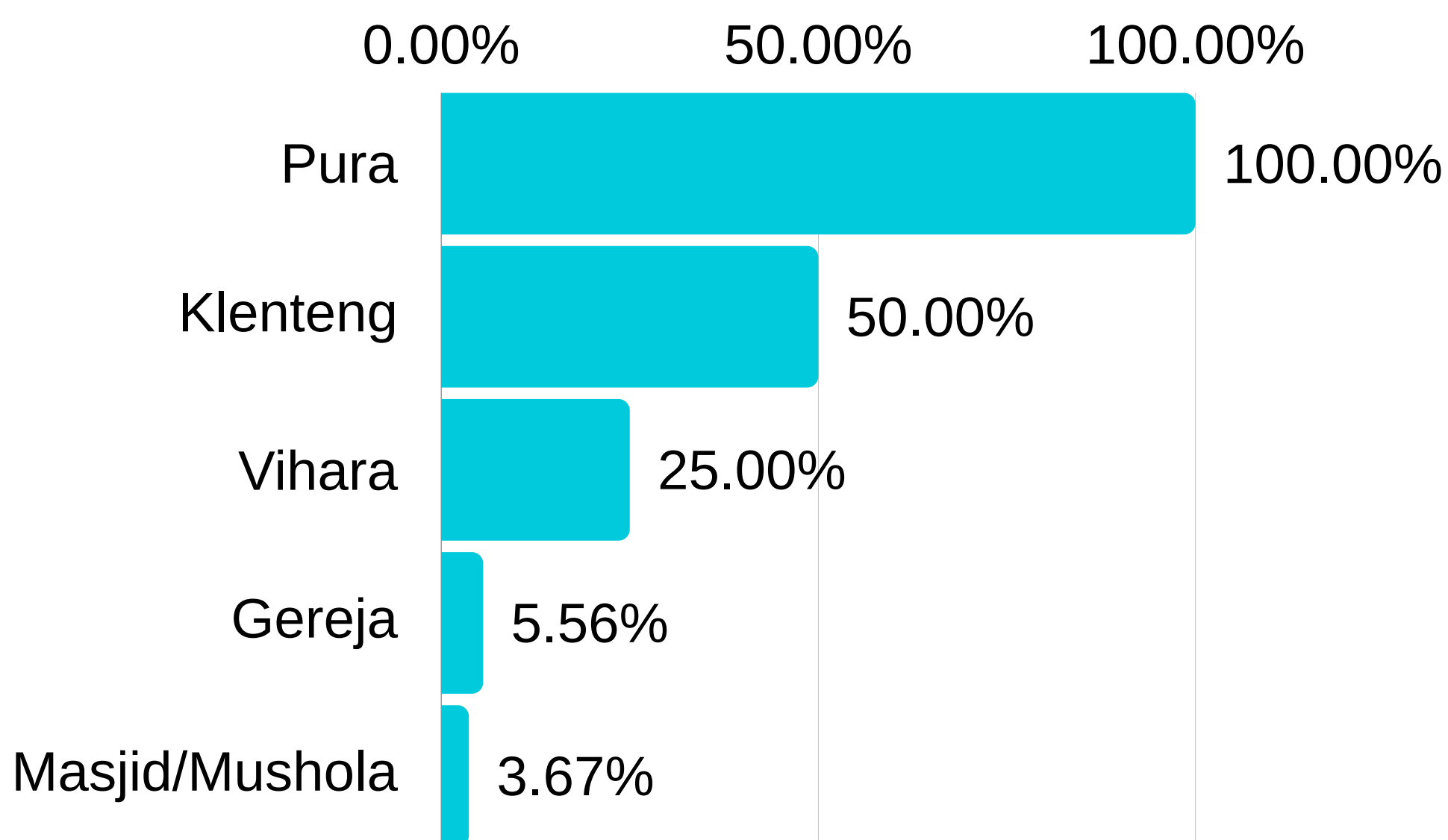


Diagram 3.5. Tempat Peribadatan Ramah Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023
Sumber: Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta

6. Polsek Ramah Anak

Jumlah Polsek ramah anak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 di Kota Yogyakarta baru terbentuk 2 Polsek ramah anak sedangkan pada tahun 2022 ini mengalami penambahan sebanyak 7. Sampai dengan Tahun 2023, 9 Polsek yang sudah ramah anak meliputi Polsek Gondokusuman, Kotagede, Danurejan, Umbulharjo, Tegalrejo, Jetis, Mergangsan, Wirobrajan dan Gondomanan. Diharapkan kedepannya semua Polsek di Kota Yogyakarta sudah ramah anak.

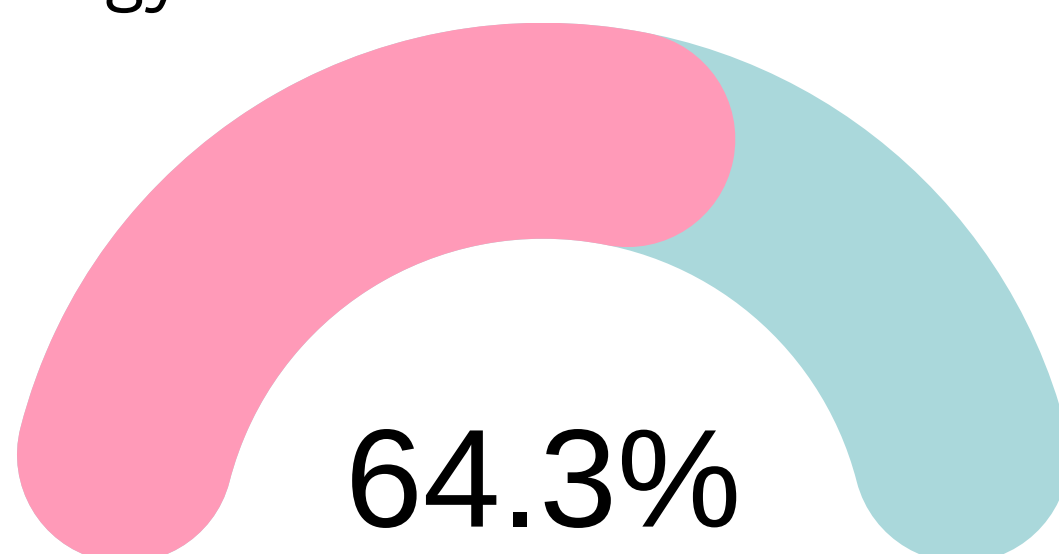


Diagram 3.6. Polsek Ramah Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023
Sumber: Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta

7. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Definisi dari PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Berikut ini jumlah PATBM di Kota Yogyakarta.

TAHUN PEMBENTUKAN	JUMLAH
TAHUN 2017	1
TAHUN 2018	20
TAHUN 2019	6
TAHUN 2020	9
TAHUN 2021	9
JUMLAH	45

Tabel 3.16. Jumlah KRA Kota Yogyakarta Berdasarkan Tahun Pembentukan
Sumber: Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel dan diagram PATBM paling banyak dibentuk pada tahun 2018 (44,44%), kemudian di tahun 2021 seluruh kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta sudah memiliki PATBM yang artinya kesadaran masyarakat dalam rangka melakukan perlindungan anak dari tindak kekerasan semakin meningkat.

8. Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana) dan Kecamatan Layak Anak (Kelana)

Pembentukan Dekelana dan Kelana, selain untuk mendukung perkuatan Kota Layak Anak (KLA) juga untuk mendorong para stakeholder di Kelurahan dan Kecamatan agar lebih peduli terhadap anak

TAHUN PEMBENTUKAN	2017	2018	2019	2020
JUMLAH	14	10	11	10

Tabel 3.17. Jumlah Dekelana Kota Yogyakarta Berdasarkan Tahun Pembentukan
Sumber: Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Pada mulanya yaitu pada tahun 2017 prosentase Kelurahan layak anak di Kota Yogyakarta hanya 31,11% dari jumlah kelurahan yang ada. Dari tahun ke tahun jumlah Dekelana di Kota Yogyakarta semakin bertambah hingga pada tahun 2020 seluruh Kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta sudah 100% menjadi Kelurahan layak anak. Dengan adanya Kelurahan Layak Anak

diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak, kelurahan yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya.

KEMANTREN	TAHUN PEMBENTUKAN
MERGANGSAN	2016
DANUREJAN	2016
TEGALREJO	2016
JETIS	2017
UMBULHARJO	2017
KOTEGEDE	2017
GANDOMANAN	2018
GEDONGTENGEN	2018
GONDOKUSUMAN	2018
WIROBRAJAN	2018
MANTRIJERON	2019
PAKUALAMAN	2019
NGAMPILAN	2020
KRATON	2020

Tabel 3.18. Kelana Kota Yogyakarta Berdasarkan Tahun Pembentukan
Sumber: Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Pembentukan Kelana di Kota Yogyakarta pertama kali di Tahun 2016 (3 Kemantren). Penambahan jumlah Kelana paling banyak terjadi pada tahun 2018. Dalam kurun waktu 5 tahun semua Kemantren di Kota Yogyakarta sudah layak anak semua. Hal ini menandakan bahwa semua Kemantren di Kota Yogyakarta sudah berkomitmen dalam menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

F. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

PUSPAGA merupakan singkatan dari Pusat Pembelajaran Keluarga, yang memiliki tujuan sebagai unit pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) masalah keluarga dan anak.

1. Jumlah Klien

Jumlah Klien Puspaga di Tahun 2023 adalah sebanyak 3.261 orang, dengan 1.131 diantaranya laki-laki dan 2.130 perempuan. Keseluruhannya mendapatkan layanan berupa Tatap Muka.

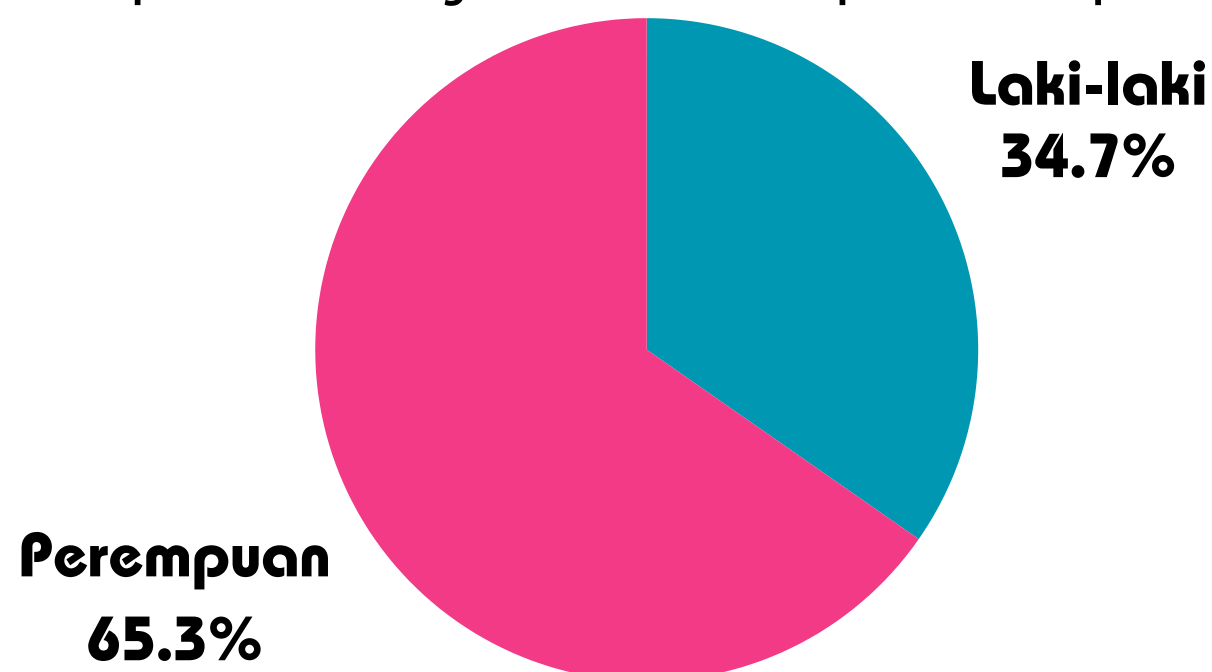


Diagram 3.7. Persentase Klien Puspaga Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023
Sumber: Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Dari diagram diatas, hampir dua kali lipat klien puspaga di Tahun 2023 adalah perempuan.

2. Kasus yang Dilaporkan

Di Tahun 2023 kasus terbanyak yang dilaporkan di Puspaga yaitu tentang kekerasan, diikuti dengan pola pengasuhan anak.

KASUS	JUMLAH
Pola pengasuhan anak/Parenting	766
Kurang fokus belajar	18
Manajemen emosi	501
Kesulitan bersosialisasi	0
Manajemen stress	35
Kekerasan	1883
Konflik kekerasan	31
KDRT	1
Kesehatan mental remaja	25
Traumatis	0
Demotivasi	0
Kesehatan mental dewasa	1
Konseling pranikah	0
JUMLAH	3261

Tabel 3.19. Jumlah Klien Puspaga Kota Yogyakarta Berdasarkan Kasus yang Dilaporkan
Sumber: Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Kekerasan menjadi topik yang paling sering disosialisasikan oleh Puspaga dalam rangka pencegahan tidak kekerasan di masyarakat. Sedangkan, parenting atau pola asuh orang tua terhadap anak meliputi memenuhi kebutuhan fisik yaitu makanan dan minuman, dan juga memenuhi kebutuhan psikologi yakni kasih sayang, rasa aman, serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

3. Layanan yang Diakses

Di Tahun 2023 dari beberapa layanan yang diakses oleh klien, Sosialisasi memiliki jumlah yang paling banyak (3.036 klien) dan diikuti dengan Konsultasi assessment ortu caten (156 klien).

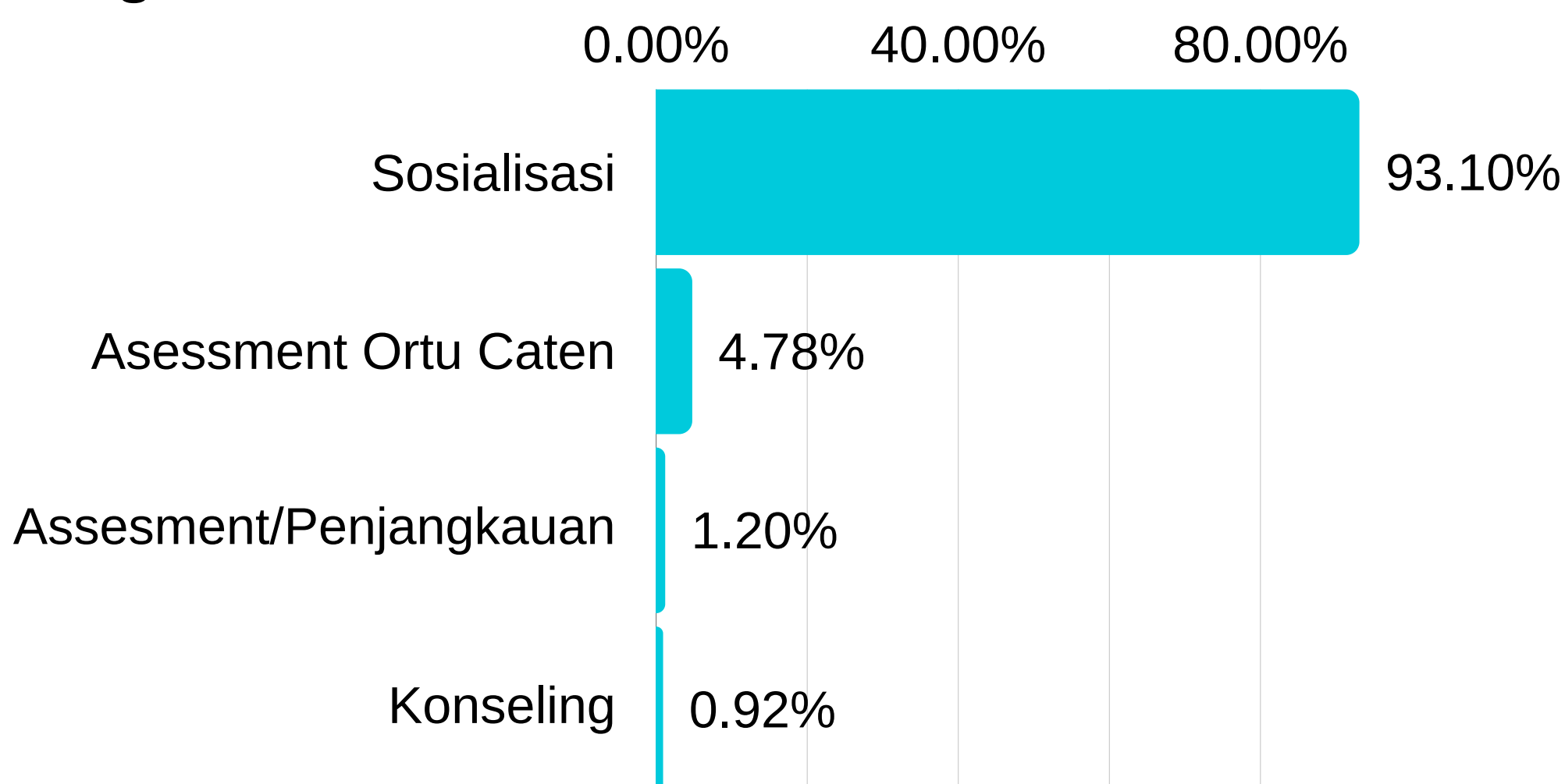


Diagram 3.8. Layanan yang Diakses Klien Puspaga Kota Yogyakarta Tahun 2023
Sumber: Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta

4. Assesment Orang Tua Calon Pengantin Usia Dini

Assesment orang tua calon pengantin (catin) usia dini merupakan layanan yang disediakan oleh Puspaga guna orang tua catin yang masih di bawah usia 19 Tahun. Assesment ini digunakan sebagai prasyarat bagi catin usia dini untuk mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama. Di Tahun 2023 angka layanan ini cukup besar, yaitu 4,78% (156 orang tua) dari 48 pasang catin usia dini dengan kategori usia catin sebagai berikut.



Diagram 3.9. Kategori Usia Pasangan Catin Kota Yogyakarta yang Diassesment Tahun 2023
Sumber: Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Sedangkan kategori usia catin (jiwa) adalah sebagai berikut.

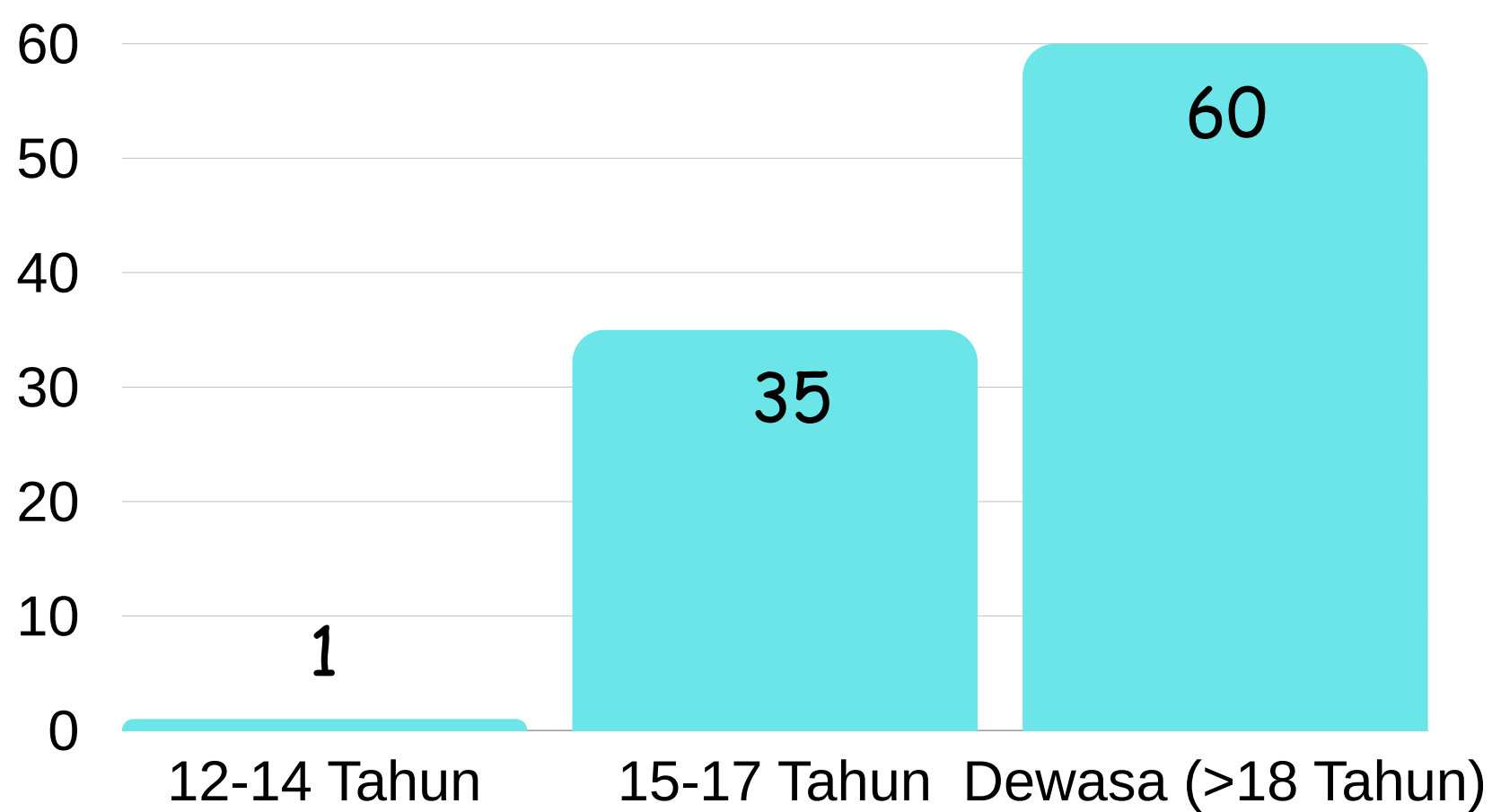


Diagram 3.10. Kategori Usia Catin (jiwa) Kota Yogyakarta yang Diassesment Tahun 2023
Sumber: Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Alasan assesment catin di Tahun 2023, 85% (41 pasang) dikarenakan oleh KTD (Kehamilan tidak Diinginkan).

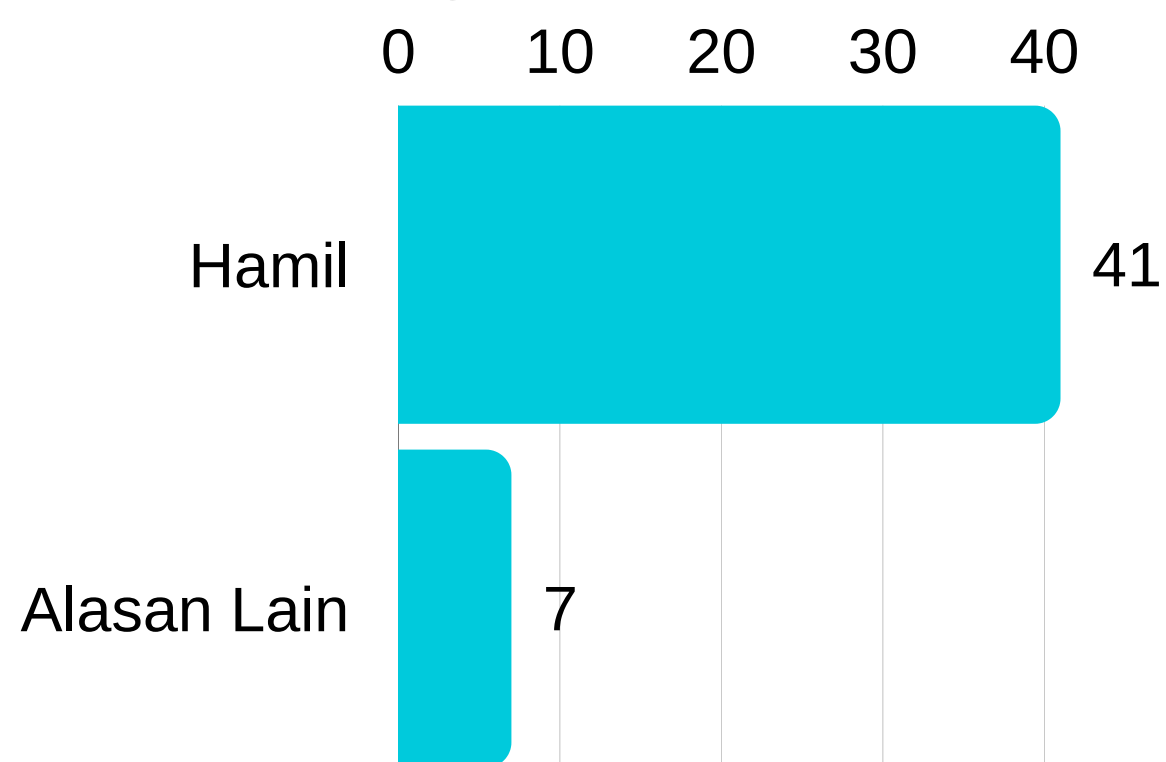


Diagram 3.11. Alasan Catin Kota Yogyakarta yang Diassesment Tahun 2023
Sumber: Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta

BAB IV

KEKERASAN

DI KOTA YOGYAKARTA

Tindakan kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dengan sengaja atau bentuk kekuatan lainnya, ancaman, atau perbuatan nyata terhadap seseorang, orang lain datau terhadap suatu kelompok atau komunitas yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar cedera, kematian, kerugian psikologis, dalah perkembangan atau deprivasi (Unicef, 2005).

Keterbukaan dan ketersediaan data yang lengkap dan akurat menjadi kebutuhan esensial dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) telah membuat sistem pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi yang bernama SIGA (Sistem Informasi Gender Anak). Aplikasi SIGA kemudian digunakan sebagai sumber penarikan data kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta dengan metode penarikan data rutin setiap bulannya.

A. Jumlah Korban Kekerasan di Kota Yogyakarta

Fenomena gunung es masih melekat erat dengan kekerasan di wilayah manapun, sehingga rekapitulasi jumlah kekerasan di aplikasi pencatatan dan pelaporan SIGA sangat bergantung dengan pada kesadaran korban, kepeduliandi lingkungan sekitar serta kemudahan akses lembaga/portal layanan pengaduan tindak kekerasan. Terdapat peningkatan jumlah korban kekerasan di Tahun 2023 dari tahun sebelumnya. Di Kota Yogyakarta jumlah korban perempuan lebih banyak daripada korban laki-laki, yaitu sebesar 87.9%nya.

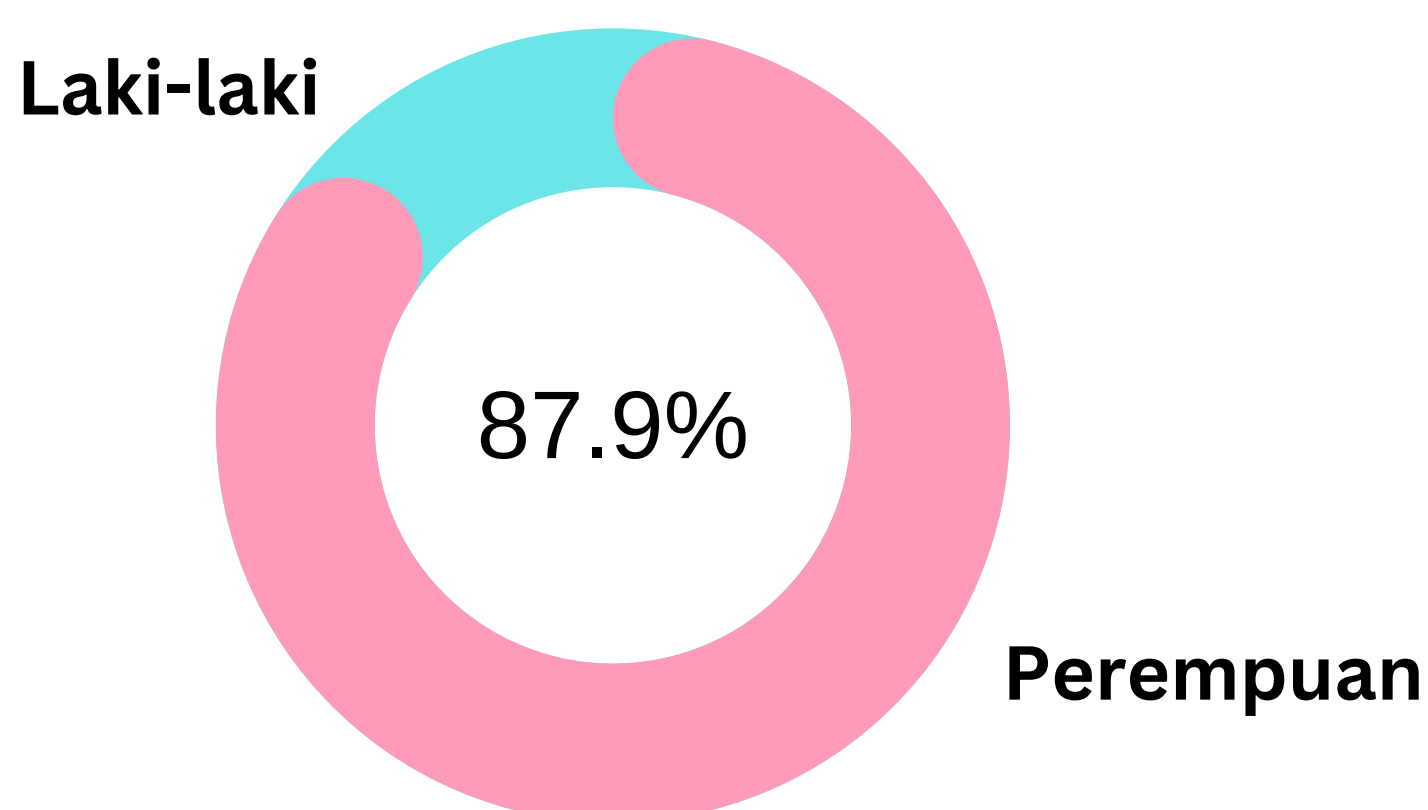


Diagram 4.1. Persentase Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Total keseluruhan korban kekerasan di Tahun 2023 mengalami peningkatan sejumlah 25 orang dari tahun sebelumnya, yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 23 orang perempuan.

B. Prevalensi Korban Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Yogyakarta

Target prevalensi korban kekerasan terhadap perempuan Tahun 2023 adalah 0,10%. Sedangkan untuk capaiannya di Tahun 2023 adalah 0,10258% dengan persebarannya di masing-masing kemantren adalah sebagai berikut.



Gambar 4.1. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan Kota Yogyakarta Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Berikut adalah jumlah korban kekerasan berdasarkan jenis kelamin Tahun 2023 dan sebarannya di setiap kemantren.

KEMANTREN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
TEGALREJO	1	21	23
JETIS	3	15	17
GONDOKUSUMAN	2	18	18
DANUREJAN	1	7	9
NGAMPILAN	0	12	12
GEDONGTENGEN	1	10	10
KRATON	1	12	15
PAKUALAMAN	0	4	4
MANTRIJERON	2	17	18
GANDOMANAN	1	10	11
WIROBRAJAN	4	22	22
MERGANGSAN	2	17	21
UMBULHARJO	8	41	43
KOTAGEDE	4	12	15
JUMLAH	30	218	248

Tabel 4.1. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Total keseluruhan korban kekerasan di Tahun 2023 mengalami peningkatan sejumlah 25 orang dari tahun sebelumnya, yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 23 orang perempuan.

1. Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok umur dibedakan menjadi usia anak (0-17 Tahun), usia remaja (18-24 Tahun), usia dewasa (25-59) dan lansia (60 tahun keatas). Berikut adalah jumlah korban kekerasan berdasarkan kelompok umur yang terjadi di Kota Yogyakarta pada Tahun 2023 dan sebarannya di setiap kemantren.

KEMANTREN	0-17 TAHUN		18-24 TAHUN		25-59 TAHUN		60+ TAHUN		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
TEGALREJO	1	5	0	7	0	9	0	0	1	21
JETIS	2	2	1	3	0	10	0	0	3	15
GONDOKUSUMAN	0	4	0	8	2	6	0	0	2	18
DANUREJAN	0	2	0	2	1	3	0	0	1	7
NGAMPILAN	0	1	0	4	0	7	0	0	0	12
GEDONGTENGEN	0	2	1	3	0	4	0	1	1	10
WIROBRAJAN	0	3	0	0	1	9	0	0	1	12
MANTRIJERON	0	1	0	1	0	2	0	0	0	4
KRATON	2	4	0	3	0	8	0	2	2	17
GANDOMANAN	1	1	0	3	0	6	0	0	1	10
PAKUALAMAN	2	4	1	5	0	13	1	0	4	22
MERGANGSAN	2	3	0	1	0	12	0	1	2	17
UMBULHARJO	7	8	0	6	1	26	0	1	8	41
KOTAGEDE	3	1	0	0	1	10	0	1	4	12
JUMLAH	20	41	3	46	6	125	1	6	30	218

Tabel 4.2. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Korban kekerasan selain tidak memandang jenis kelamin juga tidak memandang usia. Di Tahun 2023 didominasi oleh usia 25-59 tahun sejumlah 131 orang dan 85%nya adalah Perempuan. Usia dewasa justru menjadi yang paling rawan terutama pada perempuan yang sudah menikah, yaitu rawan menjadi korban KDRT. Perlu menjadi catatan pula bahwa jumlah korban usia anak juga cukup banyak yaitu sebesar 24,5%.

2. Korban Kekerasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut adalah jumlah korban kekerasan berdasarkan tingkat pendidikan yang terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 dan sebarannya di setiap kemantren.

KEMANTREN	TDK SEKOLAH		BLM TAMAT SD		TAMAT SD		TAMAT SLTP		TAMAT SLTA		TAMAT DIPLOMA		TAMAT S1		TAMAT S2		TAMAT S3		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
TR	0	0	1	2	0	3	0	3	0	10	0	2	0	1	0	0	0	0	1	21
JT	0	0	1	2	1	2	1	2	0	6	0	1	0	2	0	0	0	0	3	15
GK	0	1	0	1	0	1	0	5	1	7	0	3	1	0	0	0	0	0	2	18
DN	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7
NG	0	0	0	0	0	2	0	2	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	12
GT	0	0	0	1	0	1	1	3	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	1	10
WB	0	0	0	0	0	2	0	2	0	6	0	0	1	2	0	0	0	0	1	12
MJ	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
KT	1	0	1	2	0	1	0	4	0	5	0	1	0	3	0	1	0	0	2	17
GM	0	0	0	0	1	1	0	1	0	6	0	1	0	1	0	0	0	0	1	10
PA	0	0	0	2	4	3	0	3	0	11	0	0	0	3	0	0	0	0	4	22
MG	0	0	1	1	1	1	0	3	0	9	0	0	0	2	0	0	0	0	2	16
UH	0	1	4	2	1	5	2	7	0	19	0	1	1	4	0	1	0	1	8	41
KG	0	0	3	1	0	1	1	2	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	12
JUMLAH	1	2	11	16	8	24	5	39	1	97	1	13	3	23	0	2	0	1	30	217

Tabel 4.3. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Di tahun 2023 tingkat pendidikan korban kekerasan paling banyak adalah Tamat SLTA, yaitu sejumlah 98 orang atau 39,7%.

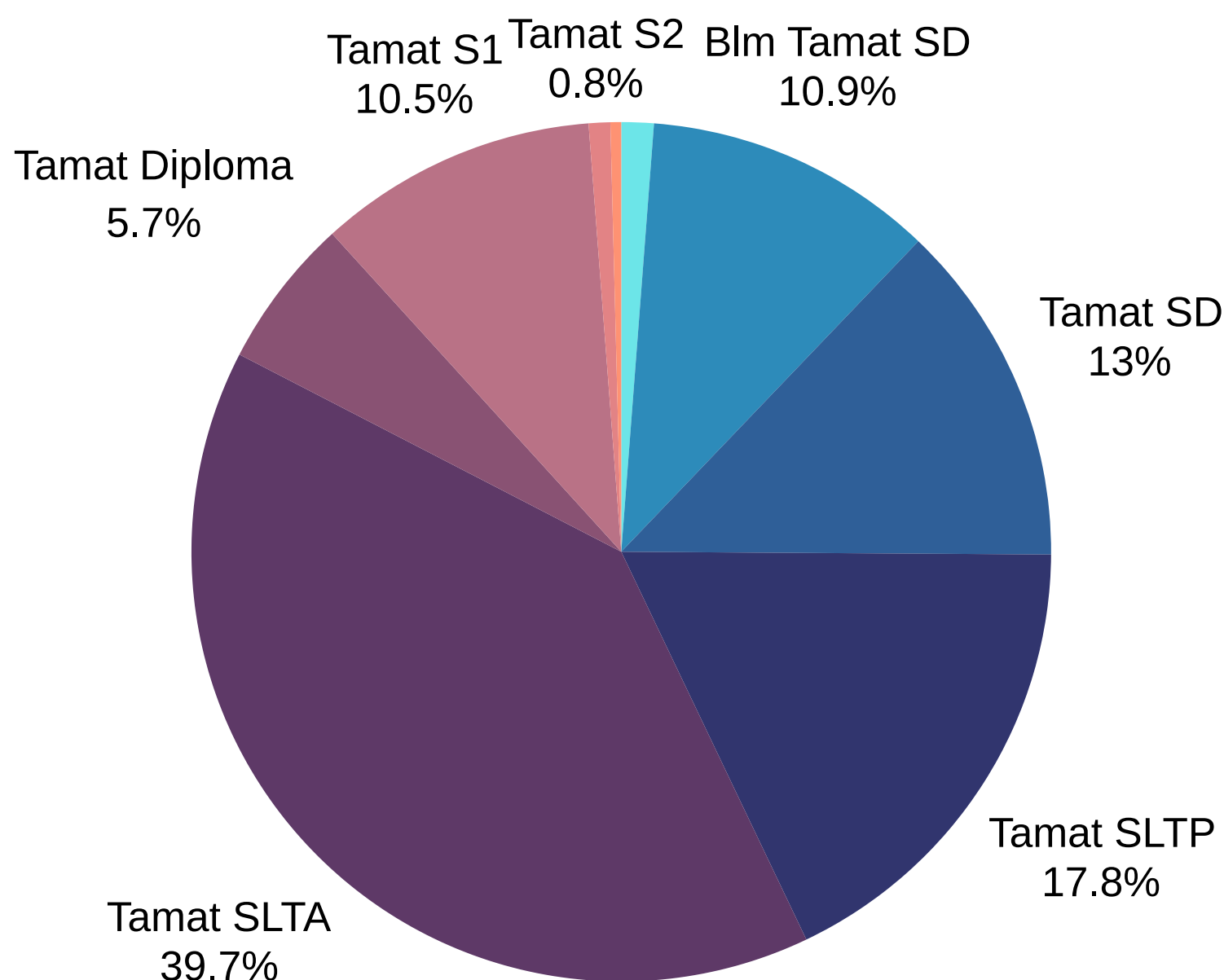


Diagram 4.2. Persentase Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

3. Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan

Berikut adalah jumlah kekerasan berdasarkan jenis kekerasan yang terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2023.

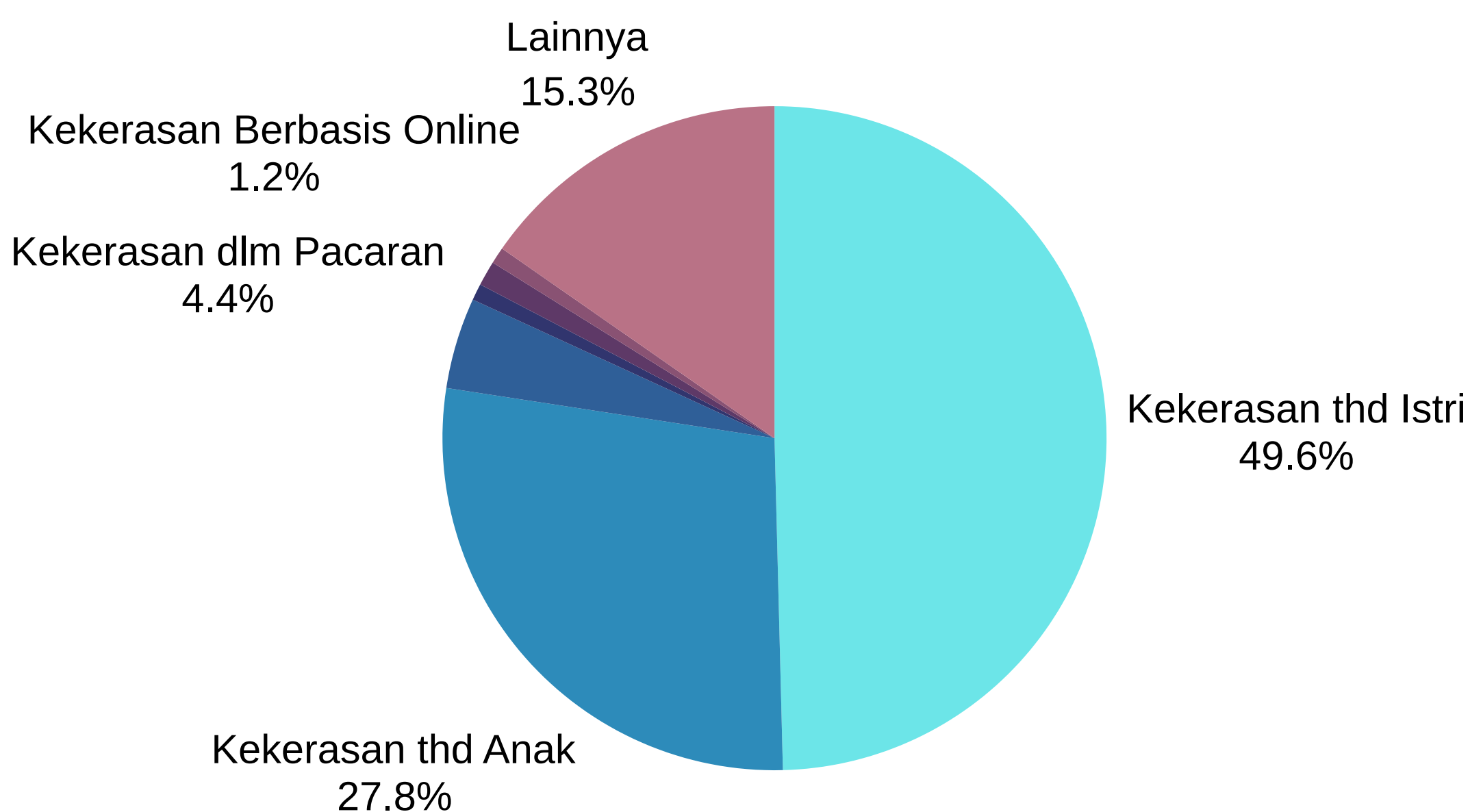


Diagram 4.3. Persentase Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Suami yang notabene adalah pasangan dan menjadi orang terdekat dari korban justru menjadi pelaku yang paling banyak melakukan kekerasan di tahun 2023 (kekerasan terhadap istri). Artinya perempuan masih rawan menjadi korban di dalam ranah rumah tangga.

Berikut adalah sebaran jumlah kekerasan berdasarkan jenis kekerasan di setiap kemantren dan jenis kelamin.

KEMANTREN	KEKERASAN THD ISTRI		KEKERASAN THD ANAK		KEKERASAN DLM PACARAN		KEHAMILAN TDK DIKEHENDAKI PD ANAK		KEKERASAN BERBASIS ONLINE		KEKERASAN DI TEMPAT KERJA		LAINNYA		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
TEGALREJO	0	12	1	5	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	23
JETIS	0	8	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	14
GONDOKUSUMAN	0	6	0	6	0	0	0	1	0	1	0	0	2	4	2	18
DANUREJAN	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7
NGAMPILAN	0	8	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
GEDONGTENGEN	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	10
WIROBRAJAN	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	12
MANTRIJERON	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4
KRATON	0	10	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17
GONDOMANAN	0	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	10
PAKUALAMAN	0	15	3	5	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	22
MERGANGSAN	0	9	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	17
UMBULHARJO	0	27	7	8	0	1	0	1	0	1	0	0	1	3	8	41
KOTAGEDE	0	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	11
JUMLAH	0	123	22	47	0	11	0	2	0	3	0	2	8	30	30	218

Tabel 4.4. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kekerasan, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

4. Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan

Di Siga bentuk kekerasan dibagi menjadi 8 (delapan) bentuk, diantaranya: kekerasan fisik, psikis, perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, penelantaran, eksploitasi dan trafficking. Berikut adalah jumlah korban kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 dan sebarannya di setiap kemantren.

KEMANTREN	FISIK		PSIKIS		PERKOSAAN		PELECEHAN		PENCABULAN		PENELANTARAN		EKSPLOITASI		TRAFFICKING		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			L	P
TEGALREJO	1	12	0	5	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	23
JETIS	1	6	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13
GONDOKUSUMAN	0	6	2	4	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	1	2	18
DANUREJAN	0	2	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
NGAMPILAN	0	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
GEDONGTENGEN	0	3	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	10
WIROBRAJAN	0	3	1	6	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	12
MANTRIJERON	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
KRATON	1	9	1	4	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	17
GANDOMANAN	0	4	1	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	10
PAKUALAMAN	3	11	1	7	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22
MERGANGSAN	2	6	0	9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17
UMBULHARJO	2	18	6	18	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	8	41
KOTAGEDE	1	5	3	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12
JUMLAH	11	96	19	79	0	4	0	22	0	11	0	1	0	0	0	5	30	218

Tabel 4.5. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Bentuk Kekerasan, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Kekerasan psikis menjadi bentuk kekerasan dengan korban terbanyak di Tahun 2023, yaitu sebesar 43,1%. Persentase pelecehan seksual menurun dari tahun sebelumnya, dari 10% ke 8,9%.

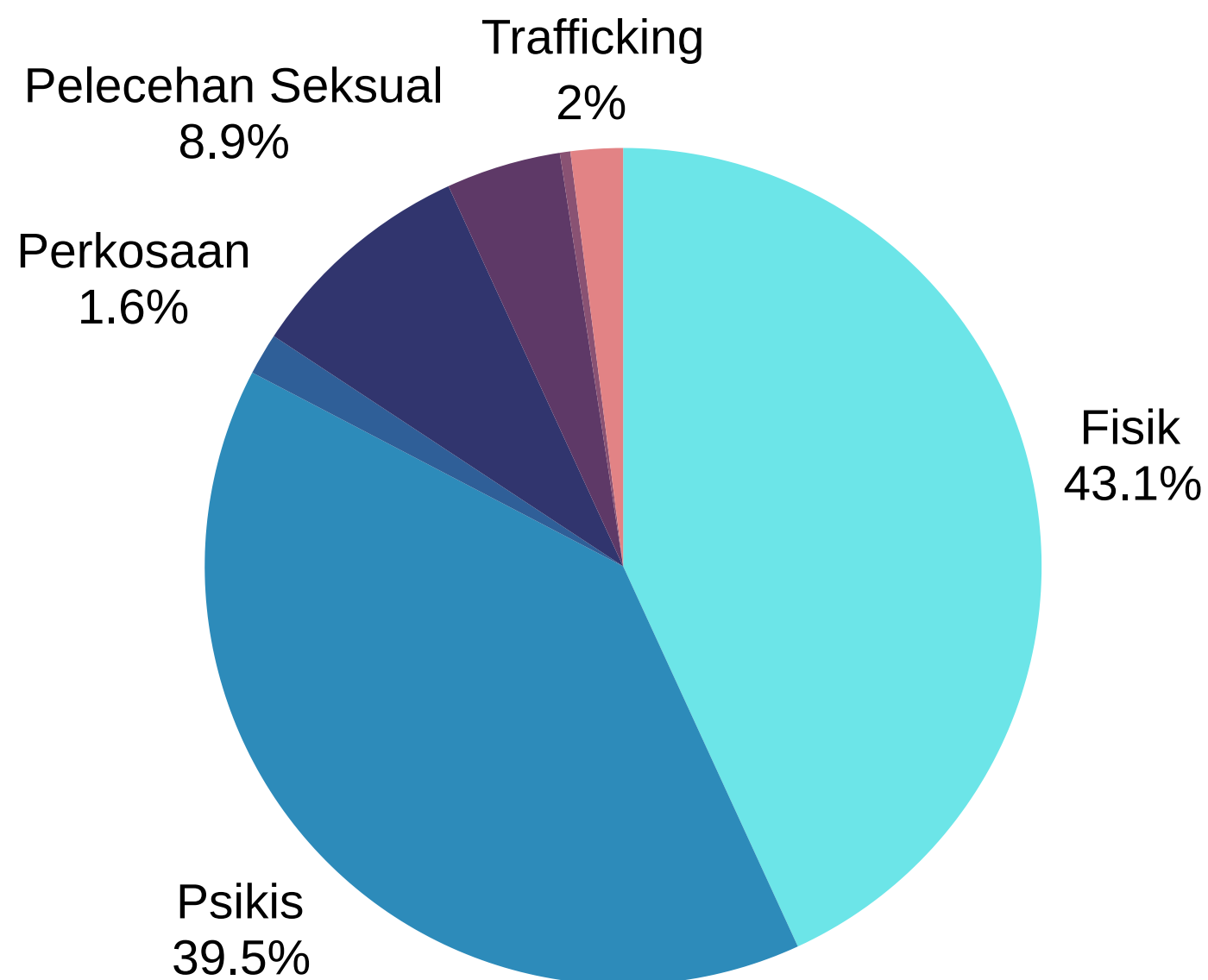


Diagram 4.4. Persentase Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Bentuk Kekerasan Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

5. Korban Kekerasan Berdasarkan Lokasi Kasus

Kekerasan bisa terjadi dimanapun, dari rumah sendiri maupun di rumah korban. Di Tahun 2023 Rumah Pelaku menjadi lokasi paling rawan kekerasan, diikuti dengan Rumah Korban. Angka kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah juga terlihat naik dari tahun sebelumnya.

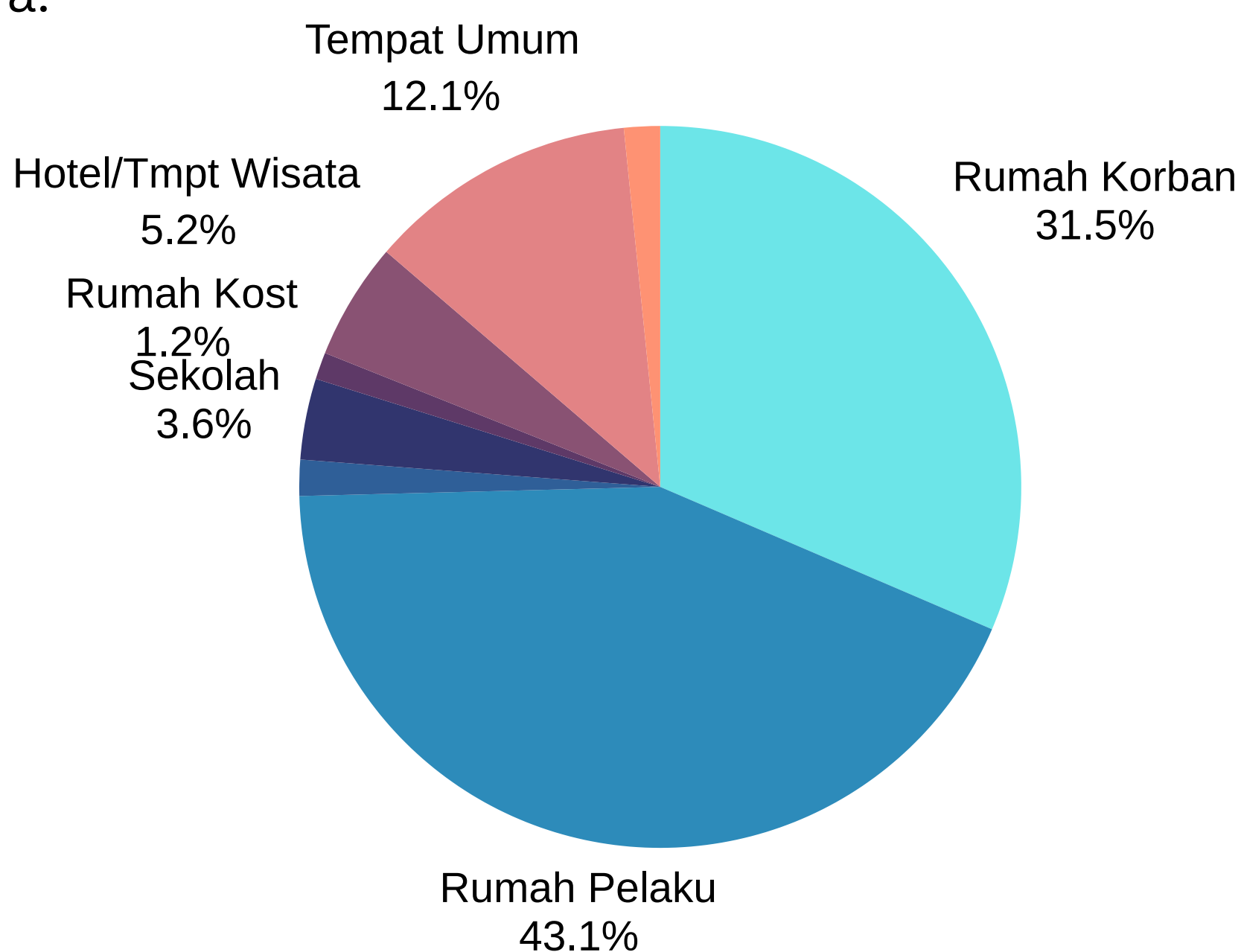


Diagram 4.5. Persentase Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Lokasi Kasus Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Berikut adalah sebaran jumlah kekerasan berdasarkan lokasi kasus di setiap kemantren dan jenis kelamin.

KEMANTREN	RUMAH KORBAN		RUMAH PELAKU		TEMPAT KERJA		SEKOLAH		RUMAH KOST		HOTEL/TMPT WISATA		TEMPAT UMUM		LAINNYA		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			L	P	L	P
TEGALREJO	0	6	1	7	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	0	1	21
JETIS	0	8	3	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15
GONDOKUSUMAN	2	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	2	18
DANUREJAN	1	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	7
NGAMPILAN	0	2	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
GEDONGTENGEN	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	10
WIROBRAJAN	1	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	12
MANTRIJERON	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
KRATON	0	3	1	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	17
GONDONANAN	0	2	1	4	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	1	10
PAKUALAMAN	2	9	0	10	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	4	22
MERGANGSAN	0	5	1	7	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	0	0	2	17
UMBULHARJO	1	12	6	21	0	0	1	1	0	1	0	2	0	4	0	0	8	41
KOTAGEDE	1	5	1	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	12
JUMLAH	8	70	15	92	0	4	5	4	0	3	0	13	2	28	0	4	30	218

Tabel 4.6. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Lokasi Kasus, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung paling aman, justru menjadi yang paling tidak aman bagi korban kekerasan. Agar rumah menjadi tempat yang aman, maka peran dari masing-masing anggota keluarga untuk saling menjaga dan melindungi merupakan hal yang wajib dilakukan. Diantaranya adalah orang tua menjalankan 8 fungsi keluarga, memberikan contoh dan menjadi panutan bagi anak-anaknya. Orang tua yang harmonis akan berdampak pada kondisi anak yang menjadi penyayang dan terlindungi. Sehingga akan meminimalisir orang tua maupun anak menjadi korban maupun pelaku kekerasan.

6. Pelayanan yang diberikan Kepada Korban Kekerasan

Hak korban KDRT diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Lalu untuk korban kekerasan seksual diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dan korban kekerasan terhadap anak diatur dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak perlindungan bagi korban kekerasan diantaranya adalah diberikan pelayanan/penanganan berupa konseling, shelter, penanganan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial maupun penanganan pengaduan. Di Tahun 2023 Konseling menjadi layanan yang paling banyak diberikan kepada korban kekerasan, yaitu mencapai 52,8%.

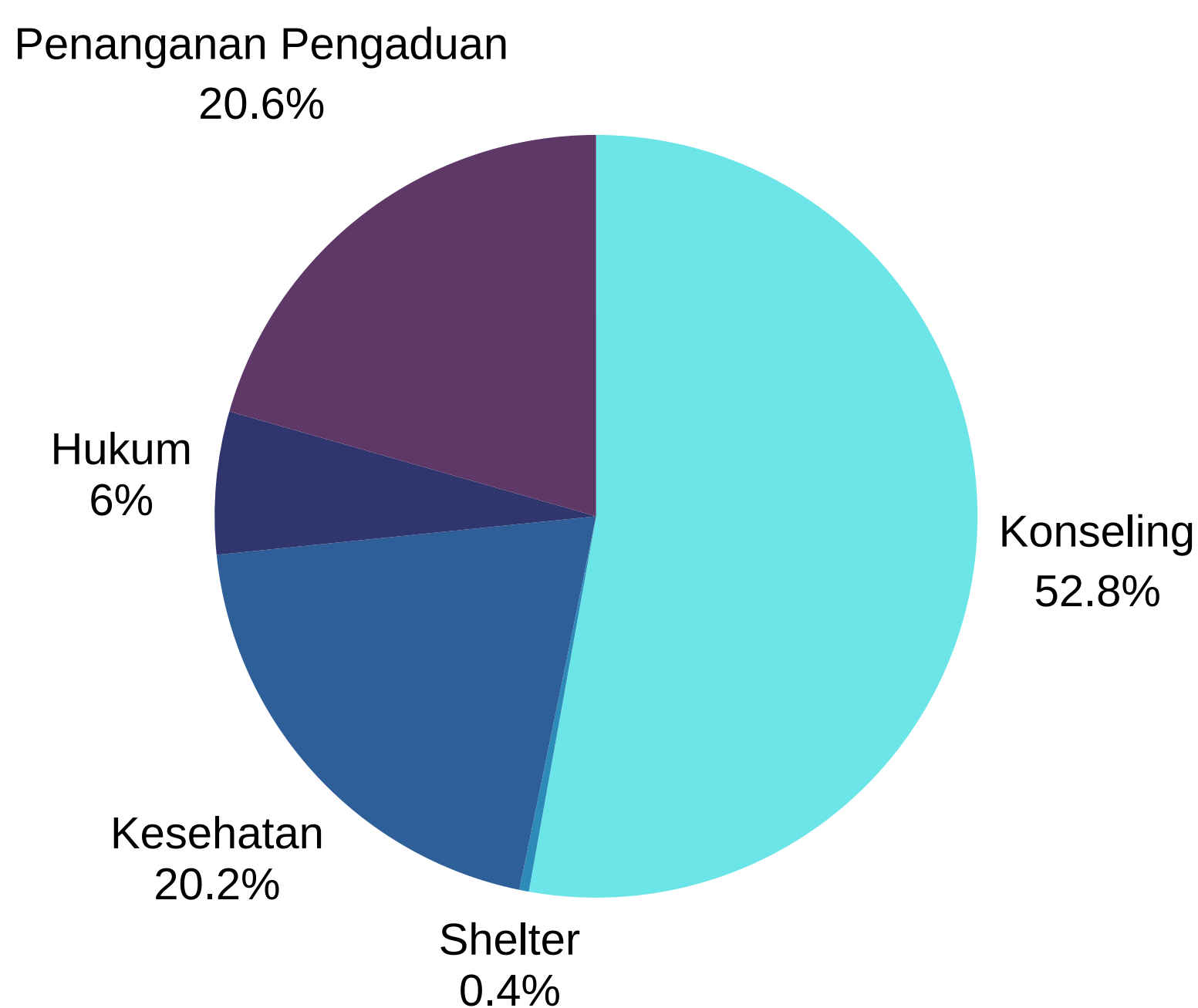


Diagram 4.6. Persentase Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Layanan yang Diberikan Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Berikut adalah sebaran jumlah kekerasan berdasarkan layanan yang diberikan di setiap kemantren dan jenis kelamin.

KEMANTREN	KONSELING		SHELTER		KESEHATAN		BANTUAN HUKUM		REHABILITASI		REINTEGRASI		PENANGANAN PENGADUAN		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			L	P
TEGALREJO	0	5	0	0	1	12	0	2	0	0	0	0	0	2	1	21
JETIS	3	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	3	15
GONDOKUSUMAN	1	9	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	1	1	2	18
DANUREJAN	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7
NGAMPILAN	0	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12
GEDONGTENGEN	1	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	10
WIROBRAJAN	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	12
MANTRIJERON	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
KRATON	0	9	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	4	2	17
GANDOMANAN	1	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10
PAKUALAMAN	2	10	0	1	1	6	0	3	0	0	0	0	1	2	4	22
MERGANGSAN	1	12	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	2	2	17
UMBULHARJO	7	27	0	0	1	4	0	3	0	0	0	0	0	7	8	41
KOTAGEDE	2	4	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	4	4	12
JUMLAH	20	111	0	1	3	47	2	13	0	0	0	0	5	46	30	218

Tabel 4.7. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Layanan yang Diberikan, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

7. Korban Kekerasan Berdasarkan Kondisi Disabilitas

Selain perempuan dan anak, kekerasan juga rawan terjadi pada penyandang disabilitas. Keterbatasan dalam menyampaikan perasaan, dan kesulitan akses yang dialami oleh penyandang disabilitas menjadi salah satu pemicu adanya diskriminasi dan kekerasan. Di Tahun 2023 tidak ada korban kekerasan disabilitas.

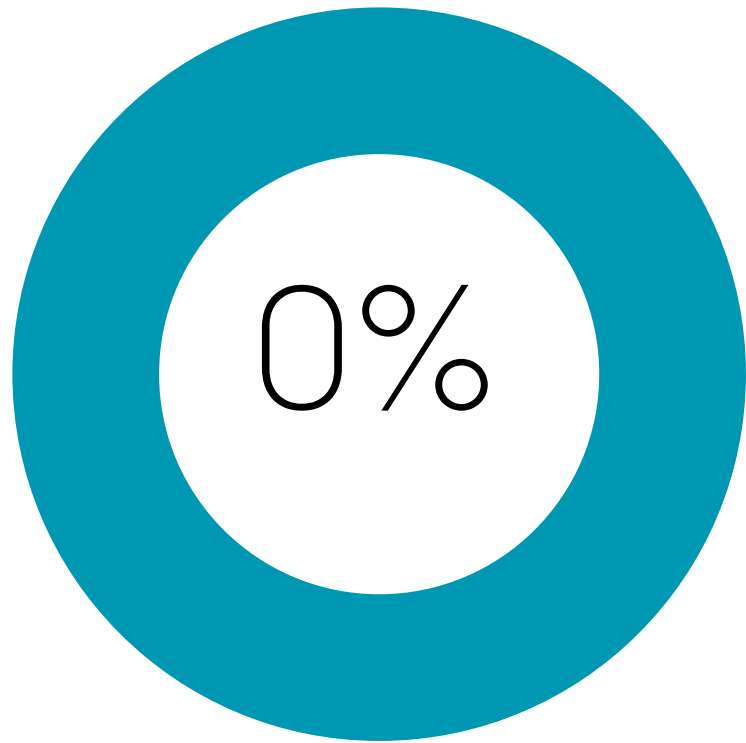


Diagram 4.7. Persentase Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Kondisi Disabilitas Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

8. Korban Kekerasan Berdasarkan Kategori KDRT

KDRT menurut UU PKDRT No 23 Tahun 2004 adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 2 UU PKDRT menegaskan bahwa ruang lingkup dari undang-undang ini tidak hanya terhadap perempuan, tapi pihak-pihak sebagaimana di bawah ini: a. Suami, istri, dan anak; b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga; c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.

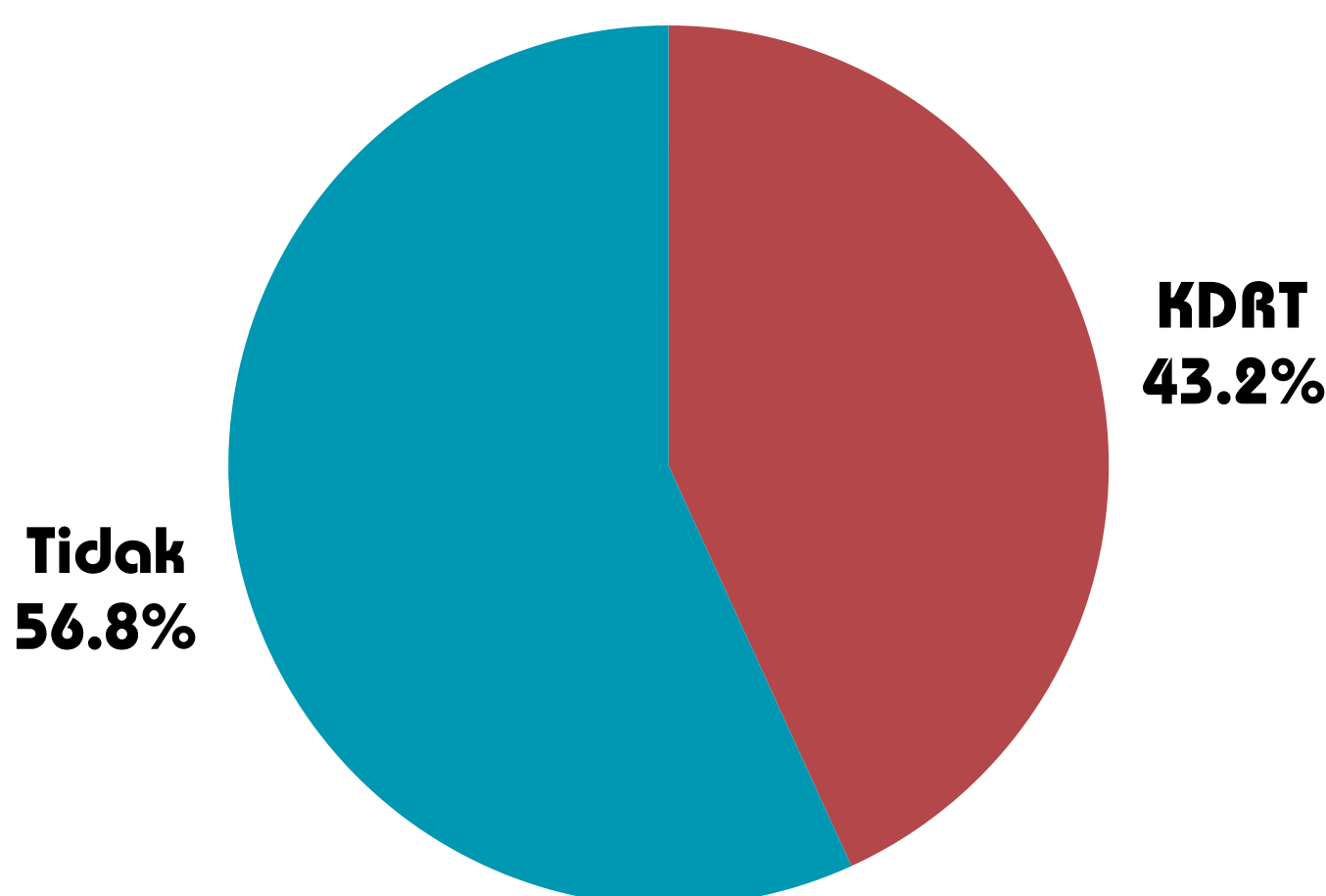


Diagram 4.8. Persentase Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan kategori KDRT Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

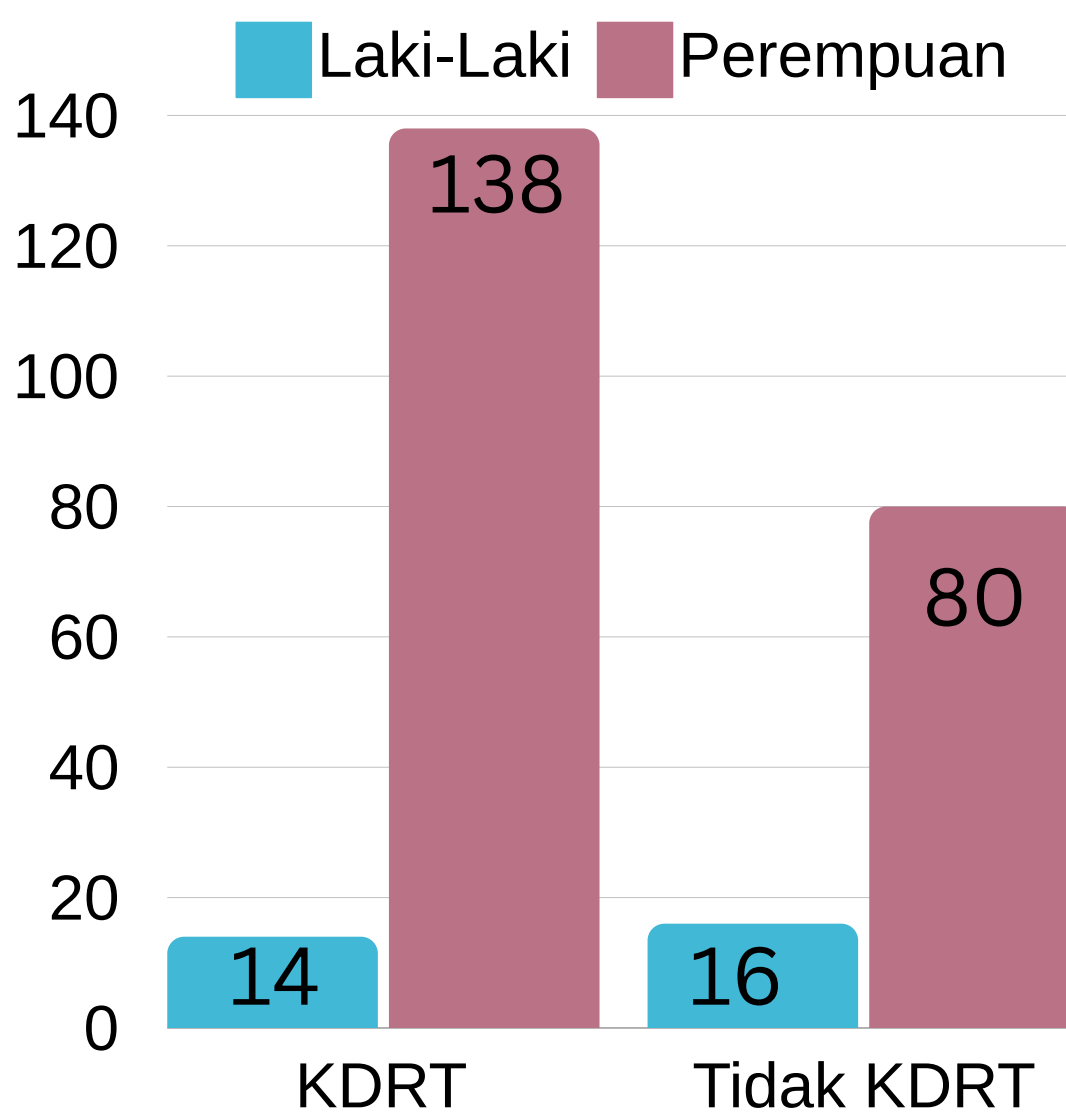


Diagram 4.9. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Kategori KDRT dan Jenis Kelamin Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

9. Korban Kekerasan Berdasarkan Status Pernikahan

Status pernikahan korban kekerasan di Tahun 2023 paling banyak adalah sudah menikah (46,7%) dan hampir keseluruhannya adalah perempuan.

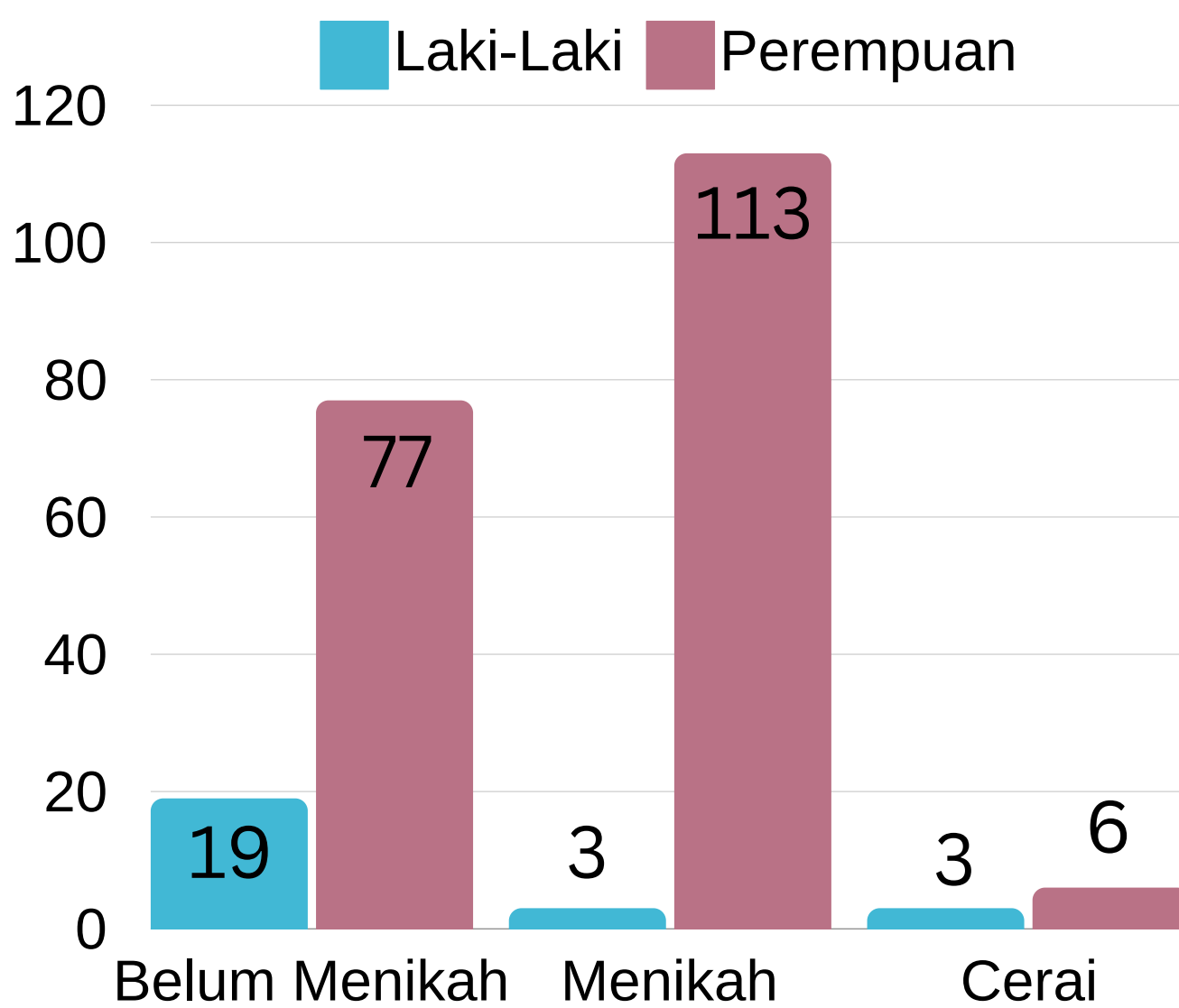


Diagram 4.10. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Status Pernikahan dan Jenis Kelamin Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

C. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak di Kota Yogyakarta

Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 menyebutkan: Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking jual beli anak. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak diantaranya yaitu: Kekerasan fisik, Kekerasan psikis/emosi, Kekerasan seksual, Kekerasan sosial (penterlantaran). Kekerasan fisik yang dialami anak, akan mempengaruhi jiwanya. Demikian juga kekerasan psikis anak, akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya.

Adapun kekerasan seksual mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis. Dalam kebanyakan kasus, anak-anak yang mendapat kekerasan seksual lebih menderita secara mental. Konsekuensi dari kekerasan terhadap anak bervariasi tergantung pada jenis kekerasan dan keparahannya, kekerasan yang dialami oleh anak akan mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik anak. Di Tahun 2023 korban kekerasan terhadap anak mencapai 61 anak.

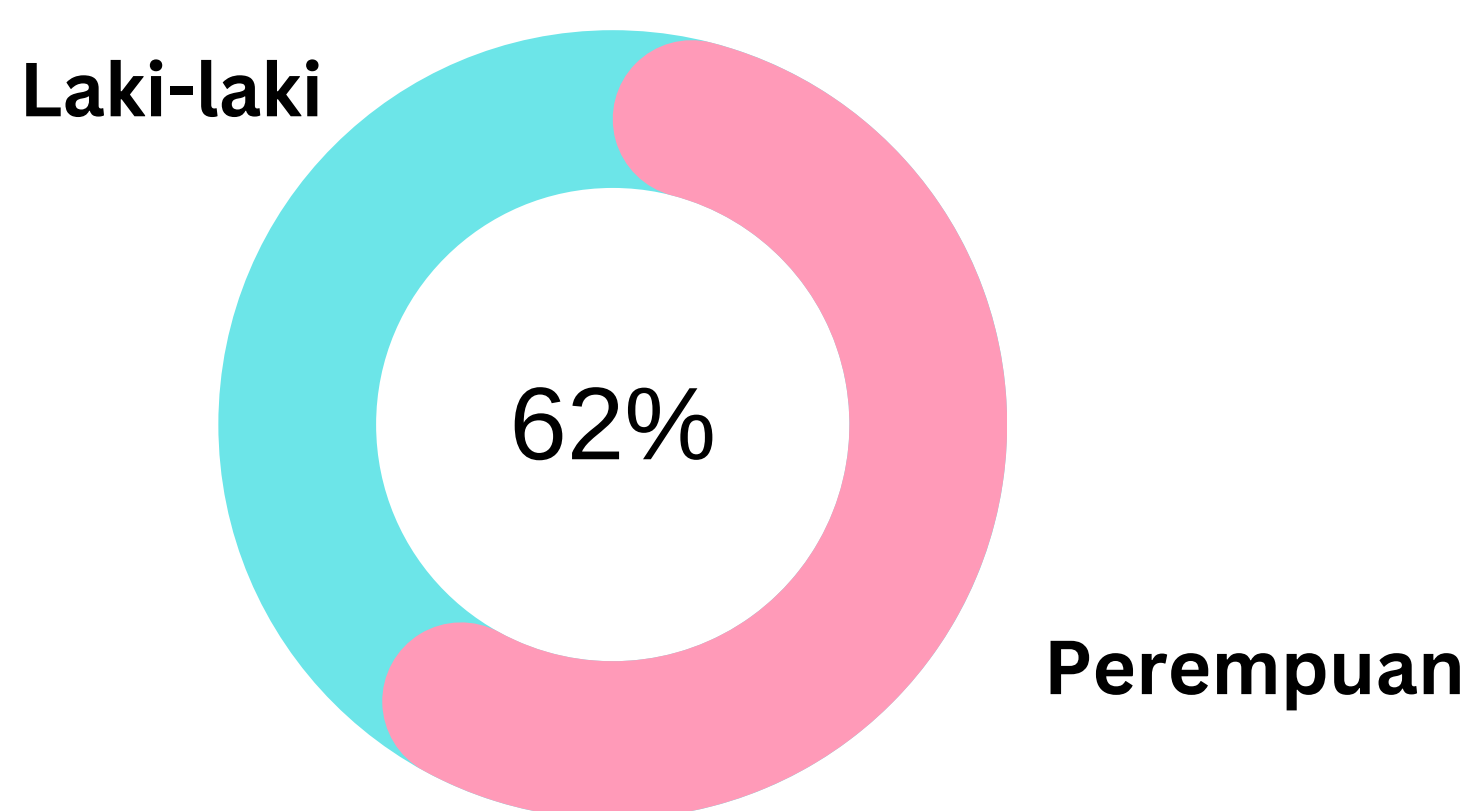


Diagram 4.11. Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Total keseluruhan korban kekerasan terhadap anak di Tahun 2023 ini mengalami peningkatan sejumlah 6 orang dari tahun sebelumnya, yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Masih sama seperti tahun sebelumnya berdasarkan jenis kelamin, jumlah korban anak perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan korban anak laki-laki. Perbandingan ini dapat menunjukkan adanya peran isu gender dalam kekerasan terhadap anak. Perempuan ditempatkan dalam kondisi yang lebih lemah dan lebih mungkin menjadi korban kekerasan.

D. Prevalensi Korban Kekerasan terhadap Anak di Kota Yogyakarta

Target prevalensi korban kekerasan terhadap Anak Tahun 2023 adalah 0,06%. Sedangkan untuk capaiannya di Tahun 2023 adalah 0,6% dengan persebarannya di masing-masing kemantren adalah sebagai berikut.



Gambar 4.2. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Berikut adalah jumlah korban kekerasan berdasarkan jenis kelamin Tahun 2023 dan sebarannya di setiap kemantren.

KEMANTREN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
TEGALREJO	1	5	6
JETIS	2	2	4
GONDOKUSUMAN	0	4	4
DANUREJAN	0	2	2
NGAMPILAN	0	1	1
GEDONGTENGEN	0	2	2
KRATON	0	3	3
PAKUALAMAN	0	1	1
MANTRIJERON	2	4	6
GANDOMANAN	1	1	2
WIROBRAJAN	2	4	6
MERGANGSAN	2	3	5
UMBULHARJO	7	8	15
KOTAGEDE	3	1	4
JUMLAH	20	41	61

Tabel 4.8. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023

Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Dari 14 Kemantren di Kota Yogyakarta kemantren dengan jumlah korban kekerasan anak paling banyak yaitu Kemantren Umbulharjo dengan jumlah korban ada 15. Sedangkan kemantren dengan jumlah korban kekerasan terhadap anak paling sedikit ada di Kemantren Ngampilan dan Pakualaman dengan jumlah korban ada 1.

1. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah korban kekerasan terhadap anak terbagi dalam 3 kelompok umur yakni, 0 -5 th (Balita), 6 - 10 th dan 11 - 17 (Remaja) th dengan persebaran di setiap kemantren sebagai berikut.

KEMANTREN	0-5		6-10		11-17		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P
TEGALREJO	0	0	1	0	0	5	1	5
JETIS	0	0	0	1	2	1	2	2
GONDOKUSUMAN	0	1	0	1	0	2	0	4
DANUREJAN	0	0	0	1	0	1	0	2
NGAMPILAN	0	0	0	0	0	1	0	1
GEDONGTENGEN	0	0	0	1	0	1	0	2
KRATON	0	0	0	0	0	3	0	3
PAKUALAMAN	0	0	0	1	0	0	0	1
MANTRIJERON	1	0	0	1	1	3	2	4
GONDOMANAN	0	0	0	0	1	1	1	1
WIROBRAJAN	0	0	0	2	2	2	2	4
MERGANGSAN	0	0	1	1	1	2	2	3
UMBULHARJO	0	1	4	1	3	6	7	8
KOTAGEDE	0	0	3	0	0	1	3	1
JUMLAH	1	2	9	10	10	29	20	41

Tabel 4.9. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Berdasarkan kelompok usia, kasus kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi pada kelompok umur 11-17 th (remaja) yang jumlahnya mencapai 64%. Anak usia remaja yang menjadi korban kekerasan bisa berdampak pada kesulitan mengelola/mengendalikan emosi dan perasaan. Sedangkan untuk Korban kekerasan yang berusia 0-5 th (balita) berpotensi untuk mengalami trauma jangka panjang akibat kekerasan yang dialaminya. Korban kekerasan terhadap anak juga berpotensi mengalami masalah kesehatan dan justru menjadi pelaku kekerasan pada anak di masa depan. Hal ini mengharuskan adanya upaya pendampingan yang lama dan

berlangsung terus menerus. Apabila dicermati dari masing-masing kelompok umur korban terhadap anak perempuan selalu lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki.

2. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Tingkat pendidikan

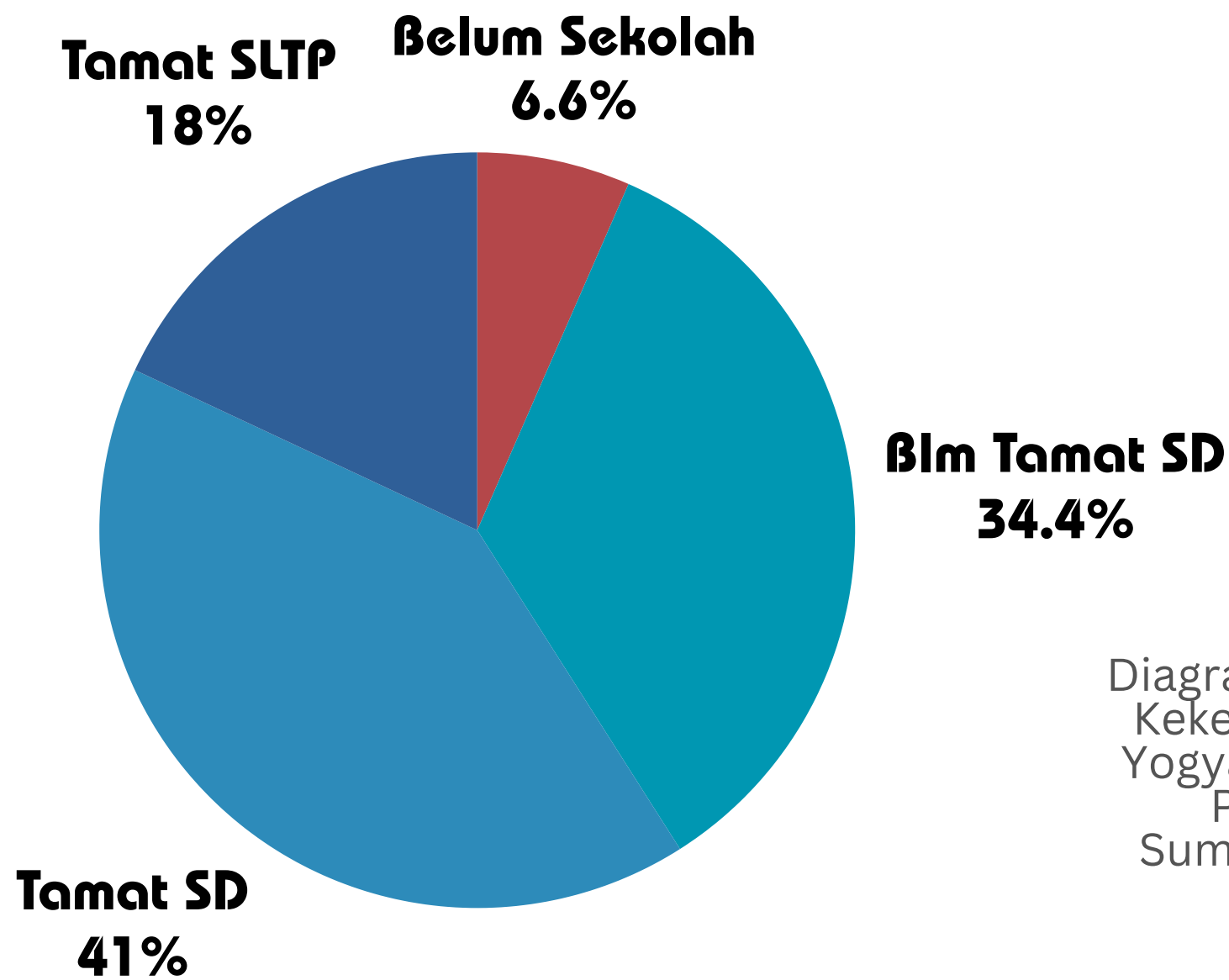


Diagram 4.12. Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Korban kekerasan terhadap anak dengan tingkat pendidikan Tamat SD menjadi yang paling banyak di Tahun 2023, yang mencapai 41% (25 orang yang terdiri dari perempuan 16 orang dan laki-laki 9 orang) disusul mereka yang belum tamat SD sebesar 34,4% (21 orang). Terdapat 1 kasus anak mengalami kekerasan seksual berakibat pada kehamilan tak dikehendaki yang menjadikannya tidak dapat melanjutkan Pendidikan formalnya. Tanpa kebijakan yang berpihak pada anak maka hak Pendidikan anak akan tak terpenuhi. Dampak kekerasan pada anak dapat mengganggu perkembangan otak dan merusak sistem saraf. Akibatnya, hal ini berpengaruh terhadap kemampuan kognitif anak sehingga prestasinya dalam bidang akademik dan kejuruan dapat menurun. Kemudian untuk sebaran jumlah korban kekerasan terhadap anak di setiap kemantren adalah sebagai berikut.

KEMANTREN	BELUM SEKOLAH		BLM TAMAT SD		TAMAT SD		TAMAT SLTP		TAMAT SLTA		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
TEGALREJO	0	0	1	2	0	1	0	2	0	0	1	5
JETIS	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	2	2
GONDOKUSUMAN	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4
DANUREJAN	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
NGAMPILAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
GEDONGTENGEN	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
WIROBRAJAN	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
MANTRIJERON	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
KRATON	1	0	1	2	0	1	0	1	0	0	2	4
GONDOMANAN	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
PAKUALAMAN	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	2	4
MERGANGSAN	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	2	3
UMBULHARJO	0	1	2	1	3	5	2	1	0	0	7	8
KOTAGEDE	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1
JUMLAH	2	2	7	14	9	16	2	9	0	0	20	41

Tabel 4.10. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Tingkat pendidikan, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Korban kekerasan dengan tingkat Pendidikan Tamat SD dan Tamat SLTP paling banyak berasal dari Kemantren Umbulharjo.

3. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan
Berikut adalah jumlah kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kekerasan yang terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2023.

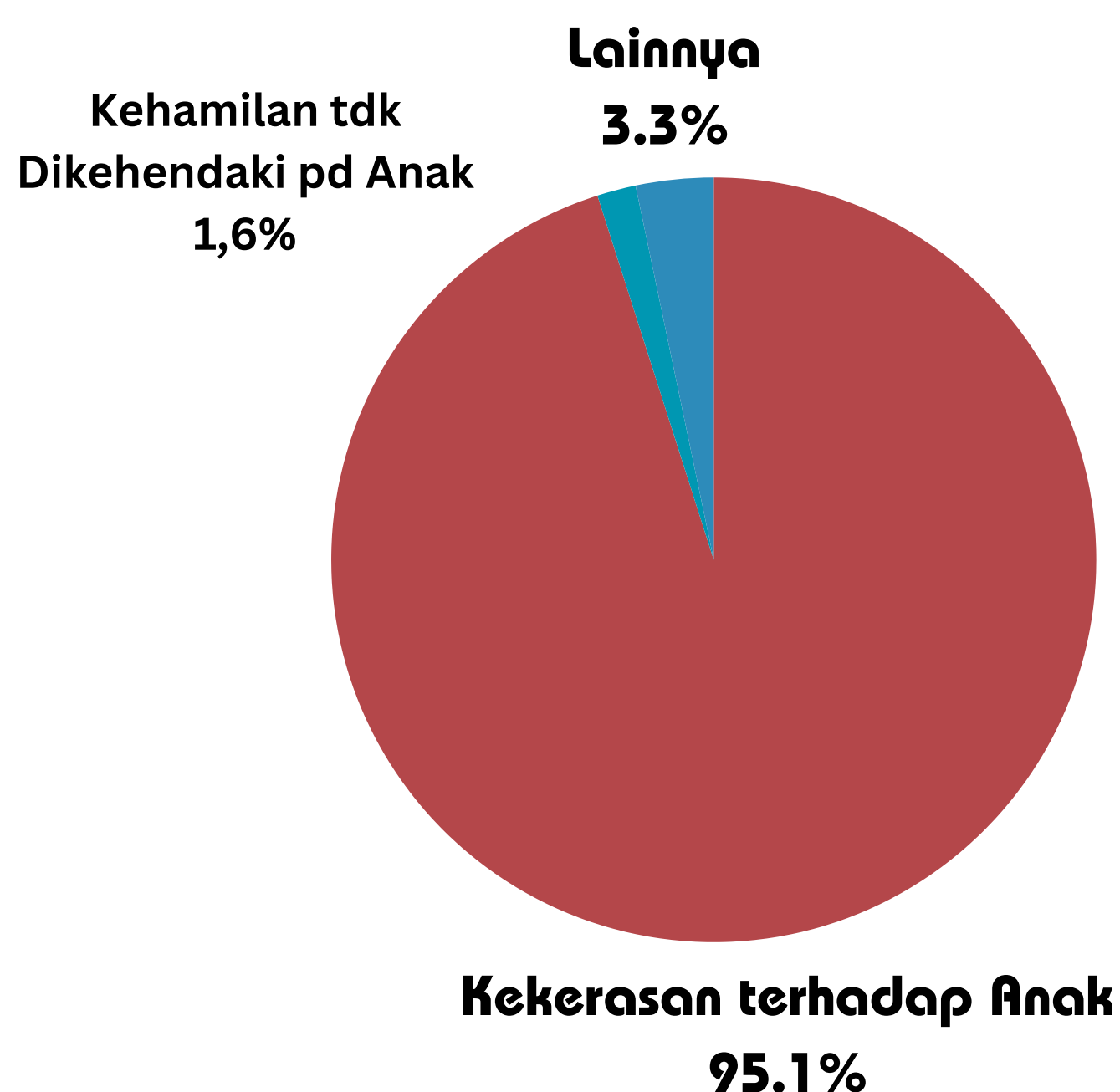


Diagram 4.13. Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Kekerasan yang terjadi pada korban usia anak, pada umumnya dikategorikan pada jenis kekerasan terhadap anak. Anak tetapi jika terjadi kekerasan hingga terjadi kehamilan, maka kekerasan tersebut masuk pada jenis kekerasan “kehamilan tidak dikehendaki pada anak”, yang pada Tahun 2023 terdapat 1 korban anak perempuan dari Kemantren Umbulharjo. Kemudian apabila jenis kekerasan tersebut sulit untuk diidentifikasi jenisnya, maka akan dikategorikan jenisnya pada “kekerasan lainnya”.

4. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Bentuk Kekerasan
Dari delapan bentuk kekerasan, di Tahun 2023 kekerasan psikis, perkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan selalu dialami oleh anak-anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki lebih banyak mengalami kekerasan dalam bentuk fisik. Berikut adalah sebaran korban kekerasan terhadap anak di setiap kemantren

KEMANTREN	FISIK		PSIKIS		PERKOSAAN		PELECEHAN SEKSUAL		PENCABULAN		TRAFFICKING		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
TEGALREJO	1	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	1	5
JETIS	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
GONDOKUSUMAN	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4
DANUREJAN	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
NGAMPILAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GEDONGTENGEN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
WIROBRAJAN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
MANTRIJERON	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KRATON	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	2	4
GANDOMANAN	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
PAKUALAMAN	2	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4
MERGANGSAN	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3
UMBULHARJO	2	1	5	4	0	0	0	0	0	2	0	1	7	8
KOTAGEDE	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1
JUMLAH	9	4	11	16	0	1	0	10	0	7	0	3	20	41

Tabel 4.11. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Bentuk Kekerasan, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

pelarangan, pemaksaan, isolasi sosial, penguntitan dan atau kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis dan mengakibatkan penderitaan fisik. Bentuk kekerasan ini sangat sulit untuk dideteksi sebab tidak meninggalkan bekas yang kasat mata seperti pada kekerasan fisik. Akan tetapi, dampak dari kekerasan ini justru sulit untuk disembuhkan karena menyerang kondisi psikologis korban. Kekerasan Psikis pada umumnya juga terjadi pada korban pencabulan, perkosaan dan pelecehan seksual. Selain menyerang secara fisik, bentuk kekerasan tersebut juga berdampak pada kondisi psikis korbannya.

Di tahun 2023 terdapat pula korban kekerasan trafficking sejumlah 3 anak, yang keseluruhannya adalah perempuan. Hal ini sangat memprihatinkan disaat anak-anak seharusnya dilindungi dan dipehuni haknya, justru menjadi korban trafficking yang bisa berdampak pada kondisi psikis dan sosial anak tersebut.

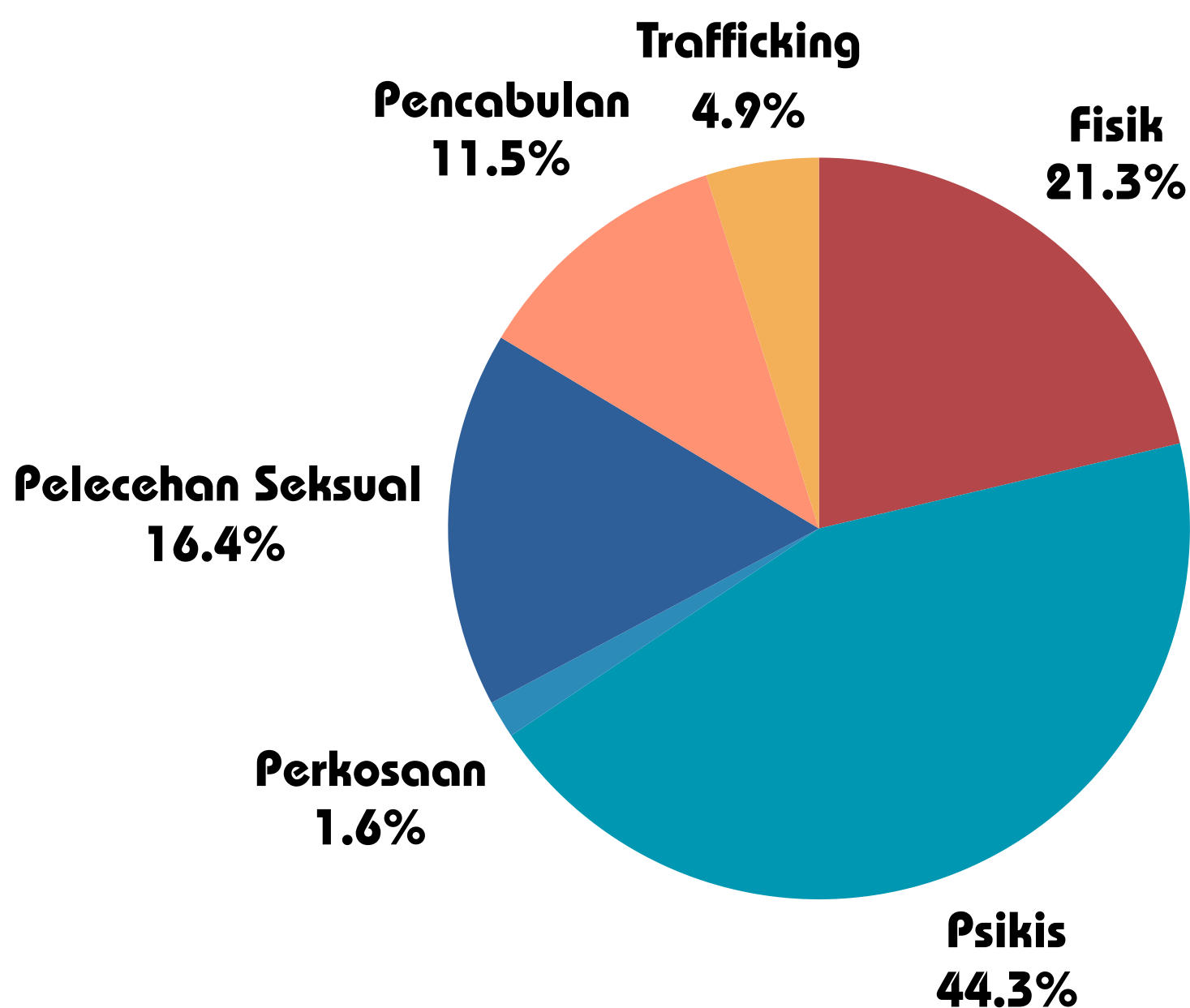


Diagram 4.14. Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Bentuk Kekerasan Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

5. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Lokasi Kasus

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja. Apabila dilihat dari tempat kejadiannya tampak bahwa tempat kejadian kasus kekerasan terhadap anak didominasi oleh kekerasan yang terjadi di rumah pelaku yang mencapai 49%. Kemudian di tempat umum 16% dan sekolah 14%. Seharusnya tempat-tempat ini aman bagi anak-anak tetapi malah banyak menjadi lokus kejadian kekerasan terhadap anak. Berikut sebaran korban kekerasan berdasarkan lokasi kasusnya di setiap kemantren.

KEMANTREN	RUMAH KORBAN		RUMAH PELAKU		TEMPAT KERJA		SEKOLAH		HOTEL/ TMPT WISATA		TEMPAT UMUM		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
TEGALREJO	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5
JETIS	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2
GONDOKUSUMAN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4
DANUREJAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
NGAMPILAN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GEDONGTENGEN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
WIROBRAJAN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
MANTRIJERON	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KRATON	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3
GONDONANAN	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
PAKUALAMAN	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	2	0	2	4
MERGANGSAN	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3
UMBULHARJO	0	0	6	5	0	0	1	1	0	2	0	0	7	8
KOTAGEDE	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1
JUMLAH	0	6	13	17	0	0	5	4	0	6	2	8	20	41

Tabel 4.12. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Lokasi Kasus, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Pencanangan Kota Layak Anak (KLA) dimana Kota Yogyakarta berhasil memperoleh predikat “Utama”, yang harapannya dapat meningkatkan kawasan-kawasan layak anak di Kota Yogyakarta. Begitu pula dengan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang kemudian menjadi ujung tombak pencegahan kekerasan pada anak yang cukup banyak pula terjadi di sekolah.

disadari oleh tenaga pengajar maupun orang tua korban. Yang kemudian pelaku juga biasanya merupakan pelaku usia anak (teman sekolah). Disamping itu kolaborasi dari dinas pendidikan, lembaga pendidikan, tenaga pengajar, orangtua siswa, dan siswa itu sendiri sangat diperlukan. Tentu saja Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DP3AP2KB telah melakukan upaya pencegahan berupa sosialisasi terkait dengan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah dasar dan menengah pertama.

6. Pelayanan yang diberikan Kepada Korban Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak mempunyai dampak yang sangat luas dan panjang. Anak korban kekerasan akan membawa trauma selama hidupnya. Di sisi lain korban kekerasan semasa kecil mempunyai potensi untuk menjadi pelaku pada masa yang akan datang sewaktu korban tersebut telah dewasa. Trauma yang luas dan panjang ini harus mendapatkan pelayanan secara komprehensif. Penanganan yang komprehensif adalah penanganan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Dari sejumlah layanan yang diberikan, layanan konseling merupakan layanan yang paling banyak dipilih baik itu oleh anak laki-laki maupun perempuan, selanjutnya penanganan pengaduan menempati urutan kedua.

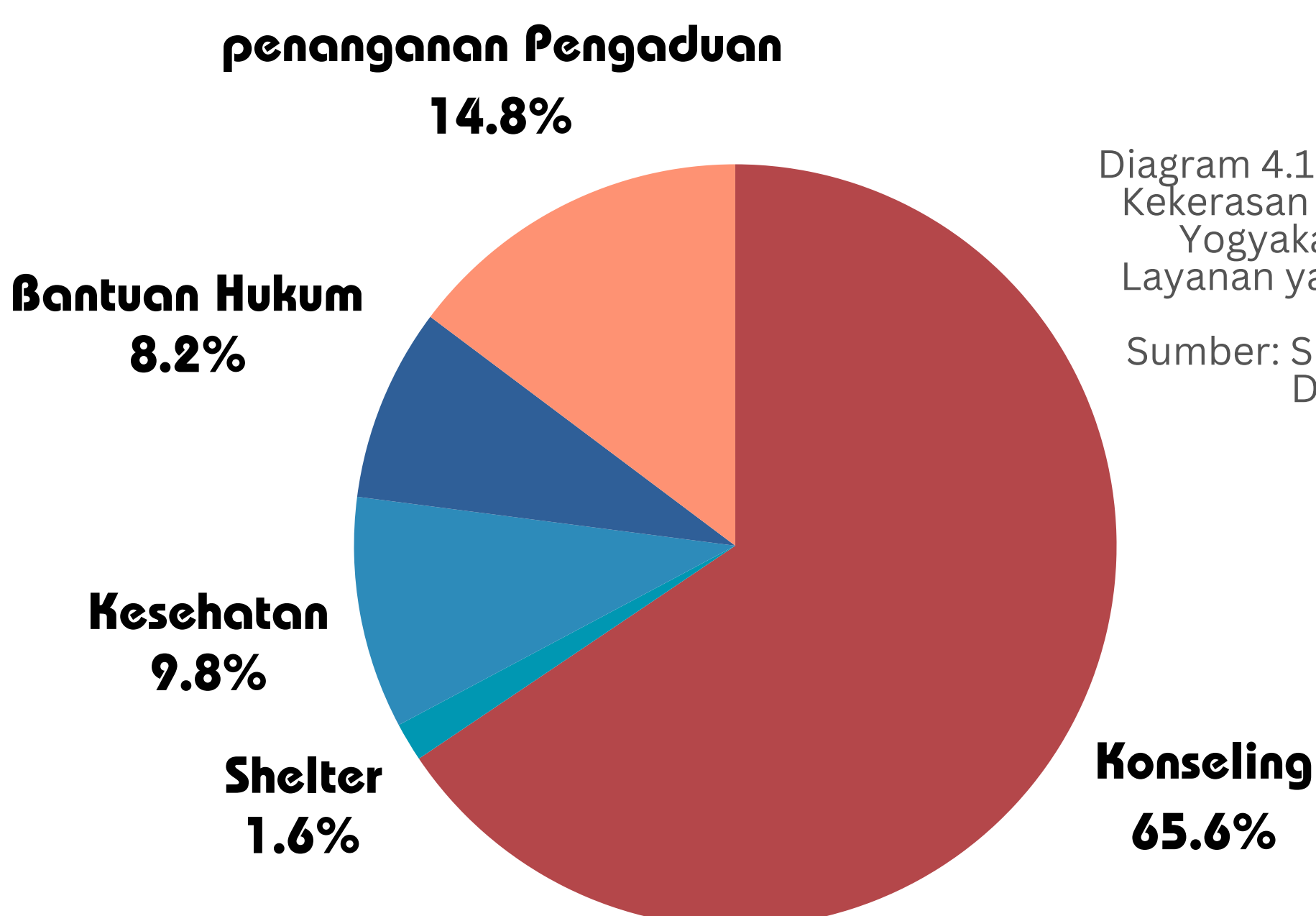


Diagram 4.15. Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Layanan yang Diberikan Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

Berikut adalah sebaran jumlah korban kekerasan terhadap anak berdasarkan kemantren dan jenis kelaminnya.

KEMANTREN	KONSELING		SHELTER		KESEHATAN		BANTUAN HUKUM		PENANGANAN PENGADUAN		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
TEGALREJO	0	2	0	0	1	1	0	1	0	1	1	5
JETIS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
GONDOKUSUMAN	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4
DANUREJAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
NGAMPILAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
GEDONGTENGEN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
WIROBRAJAN	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
MANTRIJERON	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KRATON	0	3	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4
GONDOMANAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
PAKUALAMAN	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	2	4
MERGANGSAN	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3
UMBULHARJO	6	8	0	0	1	0	0	0	0	0	7	8
KOTAGEDE	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1
JUMLAH	13	27	0	1	3	3	2	3	2	7	20	41

Tabel 4.13. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Layanan yang Diberikan, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

7. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kondisi Disabilitas

Selain perempuan dan anak, kekerasan juga rawan terjadi pada penyandang disabilitas. Keterbatasan dalam menyampaikan perasaan, dan kesulitan akses yang dialami oleh penyandang disabilitas menjadi salah satu pemicu adanya diskriminasi dan kekerasan. Di Tahun 2023 tidak ada korban kekerasan disabilitas.

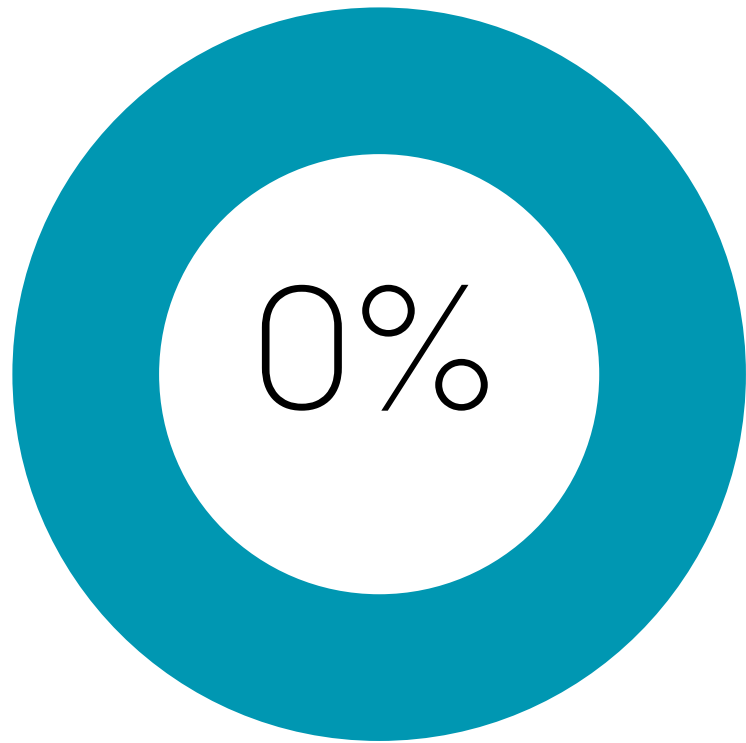


Diagram 4.16. Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Kondisi Disabilitas Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

8. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kategori KDRT

KDRT menurut UU PKDRT No 23 Tahun 2044 adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 2 UU PKDRT menegaskan bahwa ruang lingkup dari undang-undang ini tidak hanya terhadap perempuan, tapi pihak-pihak sebagaimana di bawah ini: a. Suami, istri, dan anak; b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga; c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.

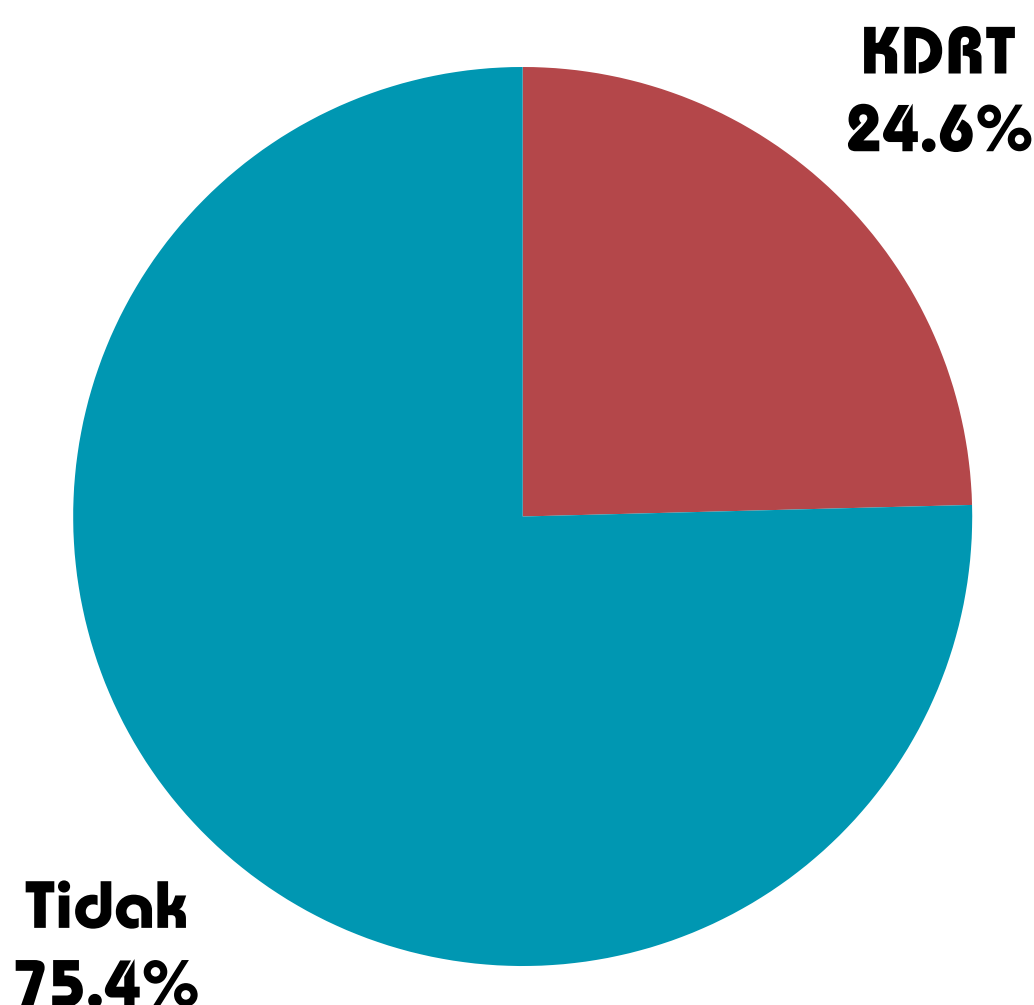


Diagram 4.17. Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan kategori KDRT Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

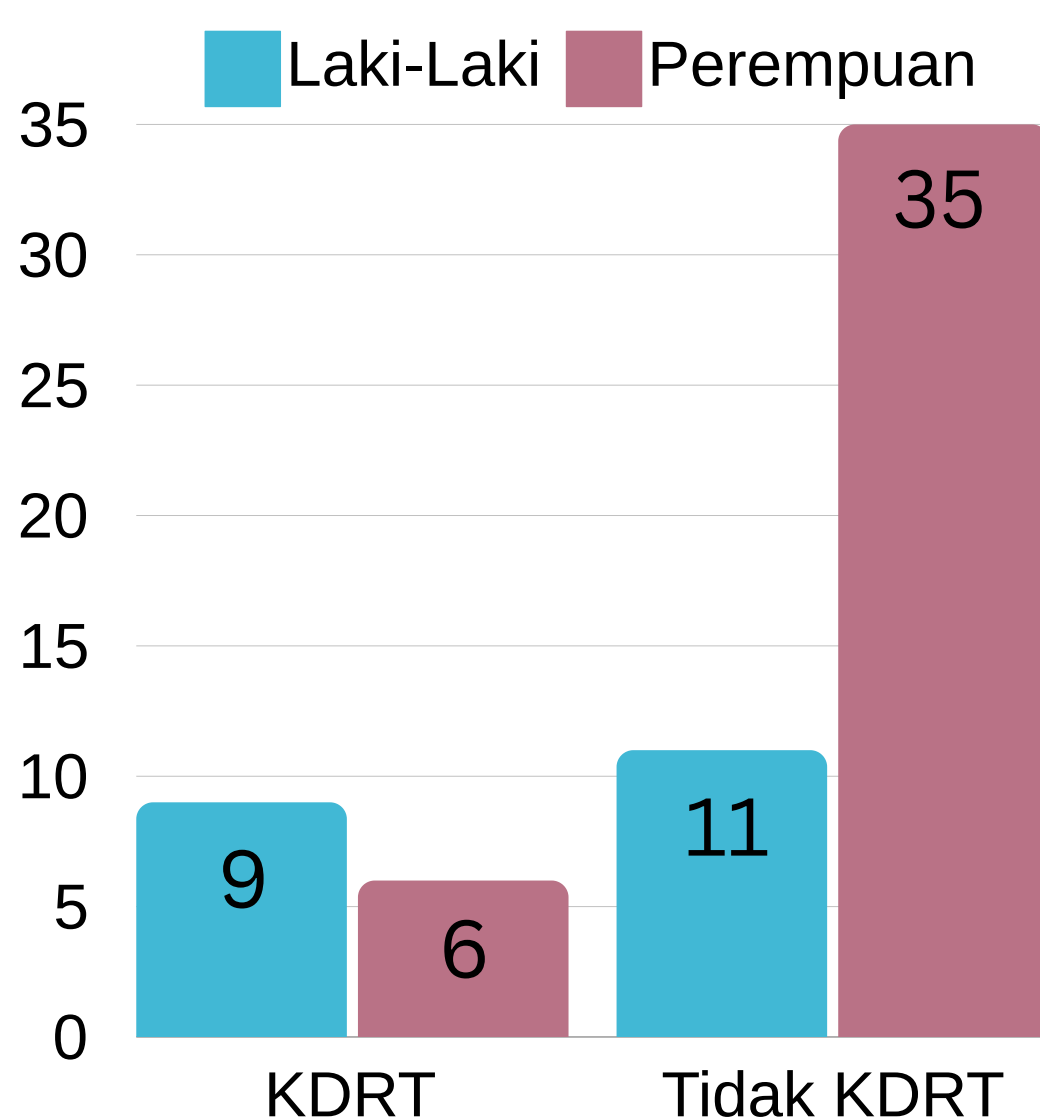


Diagram 4.18. Jumlah Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Berdasarkan Kategori KDRT dan Jenis Kelamin Tahun 2023
Sumber: SIGA Data Pelayanan DP3AP2 DIY

9. Korban Kekerasan Berdasarkan Status Pernikahan

Status pernikahan korban kekerasan terhadap anak di Tahun 2023 keseluruhannya adalah Belum Menikah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tingkat kesetaraan gender di Kota Yogyakarta sudah tinggi, hal ini dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mencapai angka 98,47% di tahun 2023, dimana angka tersebut sudah mendekati angka 100. Dari jumlah penduduk yang bekerja pun, jumlah perempuan yang bekerja juga cukup tinggi. ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural pun juga cukup banyak. Hal diatas menunjukkan bahwa kesempatan berkembang dan berkarir sama terbuka lebar baik untuk laki-laki dan perempuan. Namun yang perlu menjadi perhatian dan catatan adalah untuk perempuan yang berpolitik. Keikutsertaan perempuan dalam politik masih rendah, dapat dilihat dari jumlah legislator perempuan yang ada di DPRD Kota Yogyakarta. Undang-undang mengamanatkan jumlah perempuan dalam parlemen adalah 30%, namun yang ada pada saat ini sangat jauh mendekati target. Perempuan masih membutuhkan dorongan dan juga ajakan untuk mulai berpolitik serta menyuarakan kepentingannya. Sampai saat ini partai politik masih terkesan memasang kader perempuan sebagai pelengkap saja.

Angka pelaporan kasus kekerasan yang terjadi di Kota Yogyakarta cukup tinggi, hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran korban dan kepedulian masyarakat untuk melapor. Disamping itu lembaga penanganan kekerasan juga rajin dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kasus/klien yang mereka tangani. Di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 tercatat ada 248 korban kekerasan dengan 87,9% nya adalah perempuan dan prevalensi 0,102. Kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh jenis kekerasan terhadap istri, dengan kata lain suaminya sendiri yang menjadi pelaku. Sedangkan untuk korban anak tercatat ada 61 korban, dengan prevalensi 0,06%. Sebagian besar yang menjadi korban adalah anak perempuan yaitu 62%. Sejumlah korban yang ada 41% dengan jenjang Pendidikan sudah tamat SD. Bentuk kekerasan terhadap anak didominasi oleh kekerasan psikis, dan beberapa diantaranya terjadi di lingkungan sekolah. Kota Yogyakarta sebagai kota layak anak dengan predikat “Utama” harapannya bisa mendorong upaya pencegahan kekerasan,

terutama pada anak melalui fasilitas yang ramah anak berupa kampung ramah anak, puskesmas ramah anak, masjid ramah anak, polsek ramah anak, sekolah ramah anak dll.

Selain kasus kekerasan masih ada lagi permasalahan anak yaitu pernikahan dini dan jumlah balita stunting. Persentase balita stunting pada Tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar 12,45%. Sedangkan untuk Jumlah dispensasi pernikahan usia dini yang telah diputus Pengadilan Agama di Tahun 2023 ada 23 pasangan, sementara berdasarkan data dari kelurahan jumlah caten pernikahan dini ada 92 pasang.

B. SARAN

1. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk membangun kesadaran ketersediaan data pilah.
2. Meningkatkan dan terus mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan reproduksi dan juga bahayanya kekerasan, serta pemahaman dan pembekalan kepada para calon pengantin agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, jauh dari kekerasan.
3. Mengedukasi partai politik untuk lebih membuka kesempatan kader perempuan yang memiliki potensi untuk duduk di posisi strategis dan kemudian menjadi legislator.
4. Edukasi metode parenting yang baik bagi para calon orang tua dan orang tua, supaya pola asuh yang buruk tidak terulang kembali



Dinas Pemberdayaan Yogyakarta



@Dp3ap2kbKota



dp3ap2kb_yk